Kumpulan Tulisan
Kader-Kader PMII Jogjakarta

SENJAKALA DEMOKRASI DI INDONESIA

Catatan Kritis Madzhab Jogja

PUSTAKA INDONESIA SATU

PMII

PMII

Kumpulan Tulisan
Kader-kader PMII Jogja

SENJAKALA DEMOKRASI DI INDONESIA

Catatan Kritis Madzhab Jogja

PUSTAKA INDONESIA SATU

SENJAKALA DEMOKRASI DI INDONESIA

Catatan Kritis Madzhab Jogja

© Pustaka Indonesia Satu 2013
All rights reserved

xii+ 223 hlm; 16 x 24 cm
Cetakan 1, Juni 2013
ISBN: 978-979-3244-21-1

Penulis: Kader-kader PMII Jogja
Penyunting: Muhammad Fathollah & Romel Masykuri
Penyelaras Bahasa: Romel Masykuri
Lay Out: Lingkar Media
Desain Sampul: Lingkar Media

Copyright © 2013

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang.
Dilarang Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan Oleh:

Pustaka Indonesia Satu
Jl. Jeruk No 06 Menteng Jakarta Pusat 10330
Telp/Fax: (021) 3909109
Email: fis_bersatu@yahoo.com

Dicetak Oleh:

Lingkar Media
Jl. Sidobali UH II No 399 Yogyakarta
Telp (0274) 580296, 6861550, 0856 4345 5556
Email: lingkarmedia@mail.com

KATA PENGANTAR

Memelihara Tradisi Kritis Madzhab PMII

Ngatawi Al-Zastrouw

Dunia tulis menulis tampaknya menjadi tradisi akademik yang cukup mapan di kalangan kader PMII Yogyakarta. Tidak ada data yang jelas yang menunjukkan sejak kapan tradisi itu dimulai. Berdasarkan cerita bersambung (dari mulut kemulut) yang pernah penulis dengar, tradisi ini sudah dimulai sejak era Slamet Effendi Yusuf. Pada generasi ini lahir penulis-penuiis angkatan pertama yang juga menjadi wartawan dan kontributor media massa, seperti Slamet Effendi Yusuf sendiri, Ichwan Syam, Masdar Farid Mas'udi, Ayip Muhammad, Andi Muarli Sunrawa dan lain-lain.

Generasi penulis berikutnya adalah angkatan Arif Mudatsir Mandan, Arifin Junaedi, Enceng Shobirin Najmudin, Abdul Mun'im DZ, Imam Azis, Chalidi Ibhar, Ahmad Suaedi dan lain-lain. Pada generasi ini tidak hanya lahir penulis artikel tetapi juga para penyair yang melukis puisi dan esai kebudayaan. Dari penulis angkatan 70-an dan awal 80-an ini, kemudian

nyambung ke angkatan pertengahan 80-an dan 90-an yaitu angkatan penulis beserta kawan-kawan. Pada generasi ini, PMII mengalami "panen penulis" karena pada dekade ini lahir beberapa penulis muda yang sangat kritis, seperti Ilyasa, KH. Darwis, Istifa'iyah, Erlina Farida, Hairussalim HS, M. Jadul Maula, Eman Hermawan, Amiruddin Ar-raniy, AS. Burhan, M. Arief Hakim, Nuruddin Amin. Kemudian disusul generasi Ahmad Fikri, Zaenal Arifin Thoha (alm.), Mushoffa Irfan, Nida'ussa'adah, Hidayatuth Thoyyibah, Nur Hidayati, Ulfatin Choiriyah dan puluhan penulis lainnya yang tidak penulis ingat lagi.

Pada generasi akhir 90-an dan masuk dekade awal 200-an, lahir penulis-penulis muda kader-kader PMII yang cukup handal, seperti Nur Khalik Ridwan, Abdul Rozaqi, Islah Gusmian, Syafiq Aleha, Kuswaedi dan beberapa penyair PMII yang karyanya bahkan sudah masuk dalam dunia sastra nasional. Sejak pertengahan dekade 2000-an penulis sudah tidak lagi mengikuti perkembangan dunia tulis menulis di kalangan kader-kader PMII Yogyakarta.

Menurut penulis, kenyataan ini menunjukkan bawa PMII tidak saja menjadi ladang pergumulan ide dan gagasan bagi para kader, lebih dari itu juga merupakan tempat berlatih untuk menyamai gagasan tersebut kepada publik, sehingga para kadernya memiliki kemampuan tehnis untuk menyampaikan gagasannya kepada publik melalui keterampilan menulis, baik dalam bentuk buku maupun berbagai artikel dan laporan di media massa.

Dalam catatan penulis, sejak dekade 70-an sampai akhir 90-an, paling tidak ada tiga pangkalan yang menjadi tempat eksplorasi gagasan para kader PMII Jogja. Pertama, komunitas menulis yang ada di kampus, seperti Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) ARENA, maupun LPM yang ada di bawah naungan Fakultas. Di lembaga inilah para aktifis dan kader PMII melakukan pergulatan ide sekaligus berlatih menuangkan gagasan yang diperdebatkan dalam bentuk tulisan. Dari sini, kemampuan, bakat dan naluri tulis menulis mereka diasah dan dilatih. Pangkalan kedua kelompok diskusi. Dalam ingatan penulis ada beberapa kelompok diskusi yang

menjadi ajang pedebatan untuk mengasah ketajaman intelektual para kader PMII Jogja, misalnya kelompok diskusi Harakat Indonesia (PMII Cabang Yogyakarta), Putra bangsa (Asrama Putra IAIN), Indonesia Mini (Para aktivis lintas Komisariat), yang menjadi embrio LKiS dan beberapa kelompok diskusi lainnya yang dimiliki oleh masing-masing Rayon, bahkan Korp (angkatan).

Pangkalan ketiga adalah dunia aktifs jalanan. Pada saat itu, dunia aktifis jalanan menjadi sarana disksusi dan perdebatan yang sangat kreatif dan kritis. Ketiga pangkalan ini berkelindan dan saling terkait membentuk satu kesatauan yang saling mendukung sama lain.

Pola interaksi antara tiga pangkalan yang berlangsung secara kait-mengkait ini telah melahirkan para penulis yang kaya nuansa dan multi perspektif. Seorang aktifis jalanan pada saat itu tidak hanya mengetahui strategi aksi dan tehnis lapangan, tetapi mereka juga menguasai teori-teori sosial, konsep gerakan dan berbagai wacana yang berkembang pada zamannya. Ini terjadi karena disamping turun ke jalan, mereka juga melakukan pergumulan teoritik di berbagai kelompok diskusi. Demikian sebaliknya, seorang aktifis diskusi juga memahami peta dan situasi lapangan karena meskipun tidak turun langsung ke lapangan untuk ikut aksi, tetapi mereka sering bergumul dengan para aktifis jalanan untuk *sharing* pemikran, tukar gagasan dan tukar informasi untuk dianalisa bersama. Proses interaksi yang solid dan iklim akademik yang kondusif inilah yang menjadi pemicu munculnya nalar kreatif yang bisa mengalahkan tekanan pragmatisme dan kuatnya rezim Orde Baru yang represif.

Apa yang terjadi menunjukkan bahwa kuatnya hegemoni Negara dengan aparat dan sistem birokrasinya yang represif justru menjadi sumber inspirasi dan pembakar semangat mahasiswa, khususnya para kader PMII, untuk terus berkreasi. Selain itu, kondisi keterbatasan ekonomi yang dialami oleh para aktifis pada saat itu juga menjadi salah satu faktor pendorong terciptanya nalar kreatif yang menciptakan tradisi tulis menulis di kalangan aktifis. Menulis tidak saja ekspresi idealisme tetapi

juga sekaligus strategi bertahan hidup (*survive*), karena banyak aktifis yang menggantungkan hidup dari hasil menulis.

Sejak awal dekade 2000-an, penulis tidak lagi mengikuti perkembangan dunia tulis menulis di kalangan aktifis PMII Yogyakarta. Tetapi ternyata, tradisi itu masih hidup dan berkembang di kalangan aktifis dan kader-kader muda PMII Yogyakarta. Munculnya kumpulan tulisan dalam buku yang ada di tangan pembaca kali ini merupakan bukti masih hidupnya tradisi tulis menulis di kalangan kader PMII Yogyakarta.

****

Di luar tradisi kepenulisan yang tidak pernah henti di kalangan kader PMII Jogja, maraknya dunia tulis menulis ini juga menunjukkan adanya kepekaan para kader dalam melihat dan membaca realitasnya. Artinya, bagi para kader PMII realitas bukanlah sesuatu yang bisa dibiarkan berlalu begitu saja. Realitas adalah teks hidup yang perlu dibaca dan dimaknai sesuai perspektif yang berkembang pada zamannya. Hal ini bisa terlihat jelas melalui buku kumpulan yang ada di tangan pembaca kali ini. Demokrasi dan hukum yang oleh kaum reformis dianggap sebagai obat mujarab untuk menyelesaikan problem bangsa Indonesia setelah tumbangnya rezim Orde Baru, di mata kader PMII ternyata, secara faktual, menyisakan berbagai persoalan sebagai akibat sampingan yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya, seperti munculnya politik uang, komodifikasi hukum, kompetisi yang tidak sehat dan sebagainya. Hal ini terlihat jelas dalam berbagai artikel yang ada di dalam buku ini yang merupakan cerminan kepekaan para kader PMII dalam membaca relitas zamannya.

Kedua, tradisi tulis menulis ini juga bisa dilihat sebagai peneguhan sikap dan cara pandang para kader PMII terhadap berbagai isu dan persoalan yang ada. Buku kumpulan tulisan ini memang ditulis oleh beberapa orang yang masing-masing mewakili pemikiran individu. Namun jika dilihat secara menyeluruh, ada kesamaan perspektif dan cara pandang dari tiap-tiap individu yang kalau ditelusuri lebih lanjut bermuara

pada cara pandang kelembagaan PMII. Artinya, sekalipun pemikiran yang tertuang dalam beberapa tulisan ini dibuat secara individual namun secara bawah sadar pemikiran tersebut berada dalam satu paradigma yang sama yaitu paradigma kritis "madzhab PMII".

Ketiga, tradisi menulis merupakan cara yang paling elegan untuk melakukan mobilitas sosial para kader PMII. Secara sosiologis, mayoritas kader PMII adalah berasal dari desa dengan latar belakang pendidikan pesantren. Kondisi inilah yang menyebabkan mereka sering dipandang sebelah mata oleh kaum modernis. Dengan tumbuhnya tradisi menulis, sekat-sekat dan dinding sosial yang dibangun oleh kaum modernis tersebut berhasil dijebol oleh para kader PMII yang dipandang sebelah mata. Melalui tulisannya yang kritis dan daya analisisnya yang tajam, para kader PMII yang dianggap tradisional tersebut telah mampu menunjukkan kualitasnya dalam dunia intelektual akademik. Dan hal ini telah membuka jalan yang lebar bagi para kader PMII untuk melakukan mobilitas sosial secara vertikal.

Akhirnya, melalui buku kumpulan tulisan para kader muda PMII (karena ditulis oleh para keder angkatan 2007 ke bawah) kita dapat membuktikan kuatnya tradisi akademik para kader PMII dan tingginya kepekaan mereka dalam merespon dan membaca realitas. Saya yakin buku yang ada di tangan pembaca kali ini dapat menjadi *guide* yang cukup efektif dalam membaca dan memahami realitas kekinian yang sedang mengarah pada suasana krisis yang makin rumit. Buku ini juga merupakan sumbangan yang sangat berharga dari para kader PMII untuk bangsanya. Selamat membaca !!!

Jakarta, 22 Juni 2013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

- Memelihara Tradisi Kritis Madzhab PMII iii

DAFTAR ISI ix

BAB I : POLITIK, HUKUM, DAN DEMOKRASI 1

- Melawan Politik Uang 3
- Tradisi Jebakan Politik *Offside* 7
- Kemiskinan dan Demokrasi 11
- Menyoal Independensi Pers 15
- Sisi Lain Penegakan Hukum Indonesia 19
- Mencontreng Juga Amalan Agama 23
- Gelombang Politik Transaksional 27
- Meretas Relasi Media dan Politik 31
- Kegagapan Bangsa Bernama Indonesia 35
- Baliho Caleg, Kreatif Tanpa Kreativitas 39
- Melihat Wajah Politisi Indonesia 43
- Ironi Budaya Politik Kita 47
- Dusta Penggembala Demokrasi 51
- Tingkat Harapan untuk DPR 55
- Wibawa DPR dan Gedung Baru 59

BAB II : EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK 63
- CAFTA vs Industri dalam Negeri 65
- Menjawab Tantangan Ekonomi Global 69
- *Food Estate,* Liberalisasi Kebijakan Pertanian 71
- Menziarahi Kedaulatan Pangan Nusantara 75

BAB III : KEBUDAYAAN DAN SEJARAH 79
- Merenungkan Ramalan Ronggowarsito 81
- Jihad 10 November 1945 85
- Raibnya Kearifan Sungai 89
- Lebaran di Bawah Hegemoni Kapitalis 93

BAB IV : KONFLIK, MULTIKULTURALISME, DAN KEAGAMAAN 97
- Tragedi WTC dan Terorisme di Indonesia 99
- Poso dan Stigma Terorisme 103
- Negara Darurat Konflik 107
- Spirit Perdamaian Maulid Nabi 111
- Ramadan, Ajang Bermuhasabah 115

BAB V : SOSIAL DANLINGKUNGAN HIDUP 119
- Islam dan Krisis Lingkungan 121
- Urgensi Kajian Tafsir Berbasis Ekologi 125

BAB VI : KORUPSI 129
- Mengakhiri Gempa (di) KPK 131
- Resolusi Pemberantasan Korupsi 135
- Kawal Hibah Sampai ke Daerah 139

BAB VII : GERAKAN SOSIAL INDONESIA 143
- PMII dan Keberagamaan Multikulturalis 145
- Arti Demonstrasi bagi Demokrasi 149
- Aktifis *La Raiba Fihi* 155
- Menjaga Komitmen Gerakan 157
- Disorientasi Gerakan Mahasiswa 161
- BBM, Polisi, dan Demonstrasi 165
- Memelihara Semangat Perlawanan Kaum Muda 169

- Menggagas Ulang Gerakan Perempuan 173

BAB VIII : PENDIDIKAN 177

- Hindari Sarjana Prematur 179
- Ironi Pendidikan Perempuan Desa 183
- Hikayat Bongkar Pasang Kurikulum 187
- Menunggu Lahirnya Guru Inspiratif 191
- Pendidikan Indonesia, antara Isi dan Cangkang 195
- Universitas yang Kehilangan Identitas 199

EPILOG 205

- Mencari Pemimpin yang Berani Bertindak 207
- Menjadi Narator-Zaman: Memegang Kembali Kepemimpinan Gagasan di Tengah Kebuntuan Perubahan 213

BILBIOGRAFI PENULIS 219

BAB I

POLITIK, HUKUM, DAN DEMOKRASI

Melawan Politik Uang[1]

Oleh: Nur Kholis Anwar

Masyarakat Jawa Barat (Jabar) pada tanggal 24 Februari 2013 ini akan merayakan pesta demokrasi. Mereka akan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan siapa yang pantas duduk di kursi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk melayani masyarakat Jabar. Tentunya pilgub ini lebih kompetitif dengan adanya lima Cagub-Cawagub yang maju untuk memperebutkan kursi Gubernur Jabar.

Sudah sebaiknya masyarakat Jabar memilih sesuai dengan hati nurani dan rasionalitasnya. Jangan sampai masyarakat memilih Cagub-Cawagub hanya karena iming-iming uang semata. Sebab, hal itu akan melukai rasa keadilan dan berdampak buruk bagi kepemimpinan Gubernur Jabar lima tahun kedepan. Seharusnya praktik politik uang *(money politics)* untuk membeli suara rakyat dalam pilgub ini harus dicegah untuk kebaikan bersama.

Salah satu sebab mengapa praktik politik uang semakin marak di lingkungan masyarakat adalah karena para calon telah terbiasa membagi-bagikan uang kepada masyarakat sebagai bentuk *shodakoh* politik. Hal itu

1 Dipublikasikan di Sinar Harapan, 23 Februari 2013

dilakukan mulai dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan presiden. Istilah serangan fajar digunakan calon untuk memastikan kemenangannya dengan memberikan tambahan uang kepada masyarakat.

Dalam sistem demokrasi, satu orang mempunyai satu suara (*one man one vote)* untuk menentukan pilihannya. Gagasan demokrasi langsung dalam setiap pemilu sejatinya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari jual beli suara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas publik calon terpilih. Akan tetapi dalam praktiknya terjadi penetrasi demokrasi yang mengakibatkan hilangnya nurani publik dalam pemilu. Nurani dibeli dengan sedikit uang, maka demokrasi semakin kehilangan makna.

Bahkan dalam demokrasi langsung sebagaimana yang terjadi selama ini, praktik politik uang semakin tak dapat dikendalikan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang melarang praktik haram ini, seolah dibuat hanya untuk dilanggar.

Praktik politik uang dalam setiap pesta demokrasi itulah yang kemudian menyebabkan masyarakat tidak bisa membedakan antara penyelenggaraan mekanisme politik dengan politik uang. Sebab, politik uang dalam sebuah pemilihan umum seakan menjadi keharusan. Nurani politik mati lantaran kalah dengan iming-iming kekuasaan dan uang. Tidak ada yang bisa kita harapkan dari putaran politik uang dalam setiap pemilu. Sebab, politik uang hanya akan merugikan masyarakat sendiri.

Saatnya Melawan!

Pemilu di mana saja membutuhkan dana yang tidak sedikit. Di tengah suburnya politik uang dan mayoritas pemilih irasional, bisa jadi demokrasi langsung akan menguntungkan Cagub-Cawagub yang kaya atau yang didampingi oleh kelompok bisnis tertentu.

Kita teringat dengan ungkapan Vedi Hadiz, sosiolog di National University of Singapore, malah menduga, ke depan kelompok bisnis bakal tergoda menguasai langsung institusi negara guna melindungi kepentingan bisnis mereka, tidak sekadar berpengaruh dalam struktur

politik dan ekonomi. Konspirasi ini sangat kuat terjadi ketika pemilu sedang berlangsung.

Namun, kita semakin membuka lebar peluang pembisnis untuk menguasai negara dengan menerima politik uang yang dilancarkannya. Imbasnya, pembisnis yang akan mengendalikan jalannya pemerintahan. Sedangkan pemerintah hanya *manut* dan patuh atas apa yang diperintahkan oleh pembisnis tersebut. Inilah kekeliruan nalar pikiran kita dengan menerima politik uang tersebut. Kepentingan jangka pendek diperioritaskan dengan tidak memperhatikan kelangsungan dan efek jangka panjangnya.

Kita tentu mengenal teori `pemburu rente` yang sering kali bersinggungan dengan politik dan ekonomi. Teori ini menjelaskan hubungan antara pengusaha dan birokrasi atau pemerintah. Pengusaha selalu mencari *privilese* dari pemerintah dalam bentuk lisensi, kemudahan, proteksi, dan sebagainya, untuk kepentingannya. Praktik ini menimbulkan biaya sosial dan ekonomi publik yang besar karena masyarakat luas diabaikan kepentingannya.

Teori pemburu rente inilah yang sering kali mencampuri proses demokratisasi. Banyak sekali pengusaha yang andil dalam pesta demokrasi untuk melindungi usahanya. Bahkan berapapun uang akan dikeluarkan untuk melancarkan misinya tersebut. Imbasnya, politik uang merebak di mana-mana dan semakin terbuka, tanpa ada kendali aturan dan hukum yang kuat untuk mencegahnya.

Publik merasakan denyut politik yang semakin parah dan semakin jauh dari cita-cita pembangunan sistem yang lebih baik. Tujuan mulia politik untuk kesejahteraan rakyat telah dikorbankan sedemikian rupa untuk memuaskan nafsu pragmatisme para elite yang kini sedang berburu harta dan kekuasaan. Jika sudah demikian, korupsi menjadi kewajaran yang akan dilakukan ketika sudah menjadi pejabat publik.

Praktik-praktik semacam inilah yang tidak kita inginkan dalam pesta demokrasi di Jabar ini. Sebagai rakyat yang cinta akan keadilan dan kesejahteraan, kita seharusnya menolak praktik politik uang yang bisa

menciderai demokratisasi. Suara rakyat adalah suara tuhan *(vox pupuli, vox dei)* yang tidak bisa dibeli dengan apapun dan berapapun. Biarlah nurani yang berbicara untuk menentukan siapa yang berhak menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar.

Merayakan demokrasi, bukan berarti memberikan politik uang atau menerima uang dari para calon dengan tangan terbuka. Akan tetapi merayakan demokrasi adalah bagaimana kita sebagai bangsa mampu memaknai demokrasi dengan nurani dan akal sehat. Politik uang sangatlah menciderai demokrasi. Dengan kita menerima politik uang dari para calon, maka sama halnya kita telah melukai saudara-sauara kita yang rindu akan keadilan dan kesejahteraan.

Tradisi Jebakan Politik Offside[2]

Oleh: M. Romandhon MK

Untuk kesekian kalinya hasil lembaga survei di negeri ini menjadi buah bibir yang menarik untuk diperbicangkan. Bagimana tidak, dari polling yang dilakukan oleh tim Lembaga Survei Indonesia (LSI) menurunkan berita yang cukup mengejutkan, di mana lagi-lagi nama gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Aburizal Bakrie menempati urutan nomor wahid dalam bursa calon Presiden RI pemilu 2014 mendatang. Suara riuh rendah mengiringi semarak era lembaga survei. Berbagai media massa ramai menggunjingkan calon presiden pemilu 2014. Bahkan, mendadak lembaga survei seakan memiliki tuah dan daya magis dalam setiap laporannya. Tanpa disadari masyarakat dipaksa percaya dengan sendirinya. Wacana demokrasi menggelinding ke ruang publik bersamaan dengan membeludaknya isu pemimpin alternatif di negeri ini.

2 Dipublikasikan Jurnal Nasional, 23 Maret 2013

Berdasarkan sudut pandang antropologi kebudayaan, tentu hal ini erat kaitannya dengan perilaku manusia yang didasarkan pada maenstreem berfikir yang massal. Artinya, manusia berbondong-bondong memasuki era baru, yang sebenarnya masih asing bagi dirinya sendiri. Hal ini senada dengan yang diilustrasikan dalam sebuah film komedi lawas berjudul The God Must Be Crazy (1980) garapan sutradara Jamie Uys, yang merupakan salah satu film referensi kajian antropologi. Di mana diceritakan mengenai keterkejutan budaya (*shock culture*) sebuah suku pedalaman di Afrika yang menemukan botol kaca bekas minuman.

Lantaran belum pernah berjumpa dengan benda aneh seperti itu, para suku pedalaman ini mengait-ngaitkannya dengan hal-hal gaib, mitos, dan apalah sejenisnya. Singkat kata, kehadiran botol kaca itu telah mengubah pola hidup masyarakat suku pedalaman Afrika. Kaitannya dengan ini, perilaku masyarakat Indonesia terhadap lembaga survei yang mewabah kali inipun bisa diibaratkan demikian. Lembaga survei dalam konteks ini ikut memiliki pengaruh besar terhadap penguatan elektabiltas publik.

Keteguhan hati orang pun bisa berubah dan goyah sewaktu-waktu lantaran daya magis dari data lembaga survei. Tidak berlebihan, jika kemudian menjamur sederet lembaga survei di negeri ini. Seakan semua berlomba-lomba merayakan musim kejayaan lembaga survei. Mulai dari tingkat kelurahan, kemacatan sampai kabupaten memiliki lembaga survei masing-masing. Tidak ada yang salah, jika setiap daerah memiliki lembaga survei sendiri-sendiri, hal itu semata-mata untuk penguatan uji kelayakan data. Terlepas dari hal itu, perilaku manusia modern Indonesia akhir-akhir ini terkait latah lembaga survei merupakan representasi bahwa gejolak *shock culture* sesungguhnya kian mewabah. Meski demikian, maraknya laporan dari lembaga survei jelang pemilu 2014 tidak lebih seperti pisau bermata dua, satu sisi bisa memberi keuntungan besar, namun pada sudut yang berbeda justru bisa menjadi ancaman.

Jebakan *Offside*

Sederhana saja, kasus Joko Widodo (Jokowi) yang disebut-sebut oleh lingkaran survei sebagai calon terkuat presiden pemilu 2014, bisa membuat komitmen Jokowi terhadap Jakarta goyah bahkan memudar. Lantaran iming-iming besar dari lembaga survei yang menempatkan namanya sebagai kandidat calon presiden nomer wahid di negeri ini. Dapat diistilahkan, jika keberadaan lembaga survei tidak lebih sebagai bumbu penyedap jelang ditabuhnya genderang perang pemilu. Dalam teori sepakbola, ada istilah defensif, di mana pelatih dan pemain menerapkan pola bertahan, tetapi terkadang pula juga membumbuinya dengan peragaan jebakan *offside*. Jebakan *offside* seringkali kita temui dalam momentum permainan sepakbola.

Begitu halnya di dunia politik juga demikian, teori jebakan *offside* nampaknya juga sedang gencar diperagakan oleh beberapa lembaga survei di negeri ini. Sekilas kelihatan gagah berdiri di depan dan tak mungkin terkejar oleh lawan, namun siapa sangka justru ia masuk dalam perangkap yang bernama *offside*. Lembaga survei di negeri ini, menurut kacamata penulis sendiri tak ubahnya sebagai perangkap *offside*, di mana ramai digembar-gemborkan tentang nama-nama kuat dalam bursa calon presiden. Setelah si target dirasa cukup confident, barulah kemudian 'wasit' meniup peluitnya yang bertanda ia telah terjebak *offside*. Dengan demikian, jelas bahwa fenomena prediksi dari hasil lembaga survei sangatlah semu. Artinya, secara general orang sekilas akan menjadi percaya diri. Selain itu juga, munculnya lembaga survei juga bisa berfungsi mendongkrak nilai jual si tokoh dihadapan publik.

Dalam konteks ini Jokowi misalnya, setelah ia merasa *madhep manthep* (bertekat bulat) mengurus Jakarta, bersamaan itu pula justru namanya dikait-kaitkan dengan wacana capres, tentu hal ini akan berpengaruh pada psikologis Jokowi dalam menangani Jakarta. Pasalnya, dengan melihat *threat and opportunity*, Jokowi tahu ada peluang yang bisa dimasuki untuk hal yang lebih besar. Konsentrasi terpecah, hasilnya tidak untuk dua-duanya yang tercapai. Secara umum tentu orang akan

memilih peluang besar itu. Namun pada timingnya, justru peluang itu tidak semulus dengan apa yang ramai dibicarakan media.

Teori *offside* sendiri sebenarnya merupakan cara dalam mengelabuhi lawan dalam sepakbola. Sebuah strategi yang seakan-akan menempatkan lawan berada dalam situasi di atas angin dan diuntungkan, namun sebenarnya hanya sebatas perangkap guna menipu musuhnya. Dalam cakupan yang lebih luas, hasil polling lembaga survei di negeri ini yang menempatkan sosok Jokowi di urutan pertama sebagai calon presiden 2014, rupanya juga memiliki unsur kesamaan seperti halnya dalam jebakan *offside*. Ada ungkapan menarik dalam kajian orang-orang sejarah, *good reason for clouding real reason*. Yakni adakalanya sebuah momen atau situasi itu bagus, namun sebenarnya hanya untuk menutupi realitas yang ada. Praksis semuanya akan berjalan secara samar.

Kemiskinan Dan Demokrasi[3]

Oleh: Nur Kholis Anwar

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2012 lalu menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia turun menjadi 28,59 juta orang atau 11,66 persen dari 29,13 juta orang atau 11,96 persen pada Maret 2012. Dari penurunan angka tersebut, selayaknya kita patut mensyukuri bahwa sedikit-demi sedikit kemiskinan bisa terkurangi.

MH Ainun Najib berpendapat bahwa Indoensia adalah tenggalan tanah surga. Kekayaan alamnya melipah dan tanahnya subur. Jenis tanaman apapun akan tumbuh di Indonesia. Logikanya, hidup di negeri surga (baca: Indonesia) seharusnya tidak ada orang yang mati karena kelaparan. Namun realitasnya terbalik, banyak orang yang mati kelaparan. Siapa yang salah?

Amartya K Sen (1981,199) dalam studinya tentang kelaparan dan kemiskinan mengatakan bahwa demokrasi yang dijalankan melalui proses

3 Dipublikasikan Sinar Harapan, 17 desember 2012

pemilihan (*electoral process*) akan memungkinkan kaum miskin untuk menghukum pemerintah yang membiarkan kemiskinan terjadi. Secara teoritis, demokrasi seharusnya bisa memberikan kemakmuran pada rakyat. Sebab, keinginan rakyat dalam pemilihan langsung adalah agar pemerintah terpilih bisa memperjuangkan hak-hak rakyat.

Namun, di Indonesia kita melihat realitas yang berbeda. Masih banyak busung lapar, pengemis jalanan, mati kelaparan dan penderitaan lainnya. Harapan besar rakyat terhadap demokrasi menjadi semu. Pemerintah yang semula menyuarakan hak-hak rakyat, kini ibarat kacang lupa dengan kulitnya. Pemerintah lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada rakyatnya.

Negara seharunya cepat tanggap apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Alan H Peters dan Peter S Fisher dalam State Enterprise Zone Programs (2002) bahwa negara harus memberi penegasan sekaligus perlindungan akses yang adil bagi semua warga dalam program pembangunan. Negara harus memiliki pandangan yang menyeluruh, lengkap dan integral terhadap persoalan dan kebutuhan warganya.

Membiarkan rakyat kelaparan dan terkungkung dalam kemiskinan, sama halnya membunuh rakyat secara perlahan. Tumbuh suburnya kemiskinan di Indonesia akan menghambat kemajuan negara. Bahwa Indonesia adalah nengara kaya raya, tetapi realitasnya masih banyak masyarakat miskin yang tidak diperhatikan. Kaum miskin banyak diperhatikan ketika kampanye politik mulai dilancarkan.

Dalam teori kelaparan dan kemiskinan, Amartya K Sen (1999) juga menegaskan, kelaparan akan membunuh jutaan orang di berbagai negara, tetapi kelaparan tersebut tidak membunuh para penguasa. Jika tidak ada pemilihan umum, tidak ada partai oposisi, dan tidak ada ruang bagi publik untuk mengkritisi kebijakan yang dijalankan pemerintah, maka mereka yang memegang kekuasaan tidak akan mengalami derita konsekuensi politik akibat kegagalan mereka untuk mencegah kepalaran (kemiskinan). Demokrasi, disisi lain akan memberikan ruang penghukuman bagi para

penguasa yang membiarkan kemiskinan dan kelaparan terjadi (Teddy Lesmana, 2009).

Demokratisasi

Pertanyaan yang patut kita jawab bersama adalah mengenai apa yang bisa diharapkan dari demokrasi kepada kaum miskin? Sebab, yang diperlukan orang miskin adalah kelayakan hidup dan kesejahteraan. Ini fakta umum yang dihadapkan sendiri oleh masyarakat miskin. Sayangnya, kesadaraan pemerintah belum sampai menyentuh nuraninya. Pengentasan kemiskinan menjadi pepesan kosong semata.

Selama Era Reformasi, sudah tiga kali masyarakat Indonesia melaksanakan pemilihan umum secara langsung (1999, 2004 dan 2009). Selama itu pula demokrasi mulai menetas kembali. Meskipun demikian, kemiskinan tidak pernah bisa diselesaikan. Meleset dari analisis Amartya Sen (1999) bahwa demokrasi lebih baik dari pada nondemokrasi dalam hal transmisi informasi yang berasal dari kaum miskin dan daerah-daerah terpencil kepada pemerintah pusat.

Lebih lanjut, Sen juga megatakan bahwa negara yang menjalankan sistem demokrasi cenderung membantu kaum miskin dengan menyediakan banyak barang publik dan distribusi pendapatan yang lebih merata jika dibandingkan dengan sistem nondemokrasi. Teori tersebut mentah jika diterapkan di Indonesia sebab demokrasi yang dijalankan justru memperlebar jurang pemisah antara penguasa dengan kaum miskin. Penguasa sibuk dengan dirinya sendiri sedangkan kaum miskin sibuk untuk mencari makan hari ini.

Terlepas dari hal itu, pengaruh politik kolonial nampaknya masih menyetir otak pemerintahan kita di Era Reformasi saat ini. Sepanjang sejarah kemiskinan di Indonesia, yaitu pada masa pemerintahan kolonial, kita masih mengenal yang namanya "politik etis" alias balas budi. Nalarnya, Indonesia adalah negeri kaya raya, tetapi rakyatnya miskin dan bodoh. Karena kaum kolonialis merasa telah "merampok" kekayaan itu

sehingga diluncurkan politik balas budi itu melalui pendidikan, irigasi, dan kependudukan.

Gaya politik yang demikian itu juga dilanjutkan ketika masa Orde Baru dengan menggunakan program pembangunan. Soeharto menjadi pandega yang mengatur jalannya pembangunan. Jelas yang diuntungkan adalah penguasa, sedangkan rakyat miskin menjadi tumbalnya. Politik semacam ini dinamakan "tetesan" alias *trickle down effect*.

Mencermati demokratisasi di Indoneisa, satu sisi kita memang patut bangga karena Indonesia merupakan negara terbesar di dunia yang mampu menjalankan sistem demokrasi dengan baik. Di sisi lain, kita juga patut memperhatikan bahwa demokrasi yang sedang berjalan saat ini apakah juga memberikan ruang pada kaum miskin untuk mendapatkan hak-hak hidup layak dan kesejahteraan.

Selama ini, demokrasi masih menjadi milik para penguasa yang memberikan ruang selebar-lebarnya bagi pengusaha dan golongan kaya. Sebab, merekalah yang menikmati demokrasi.

Menyoal Independensi Pers[4]

Oleh: Imam Musthafa

Pemanggilan dua pimpinan media massa Kompas dan Seputar Indonesia oleh Polri kian menperkeruh suasana. Berbagai aksi demonstrasi kian menguat sebagai wujud protes terhadap polri, yang dinilai terdapat unsur intimidasi dan kriminalisasi. Akibatnya, perhatian publik terhadap aneka problematika yang kompleks dan belum terselesaikan semakin memanas.

Pemanggilan tersebut menuai kontroversi karena menyalahi UU No. 40/1999 tentang Pers. Seakan-akan tidak ada ruang berekspresi dan kebebasan bagi kerja Pers untuk memberitakan secara terbuka. Mau tidak mau, bila terdapat kebijakan yang sifatnya membatasi terhadap Pers berakibat terhadap mandulnya kinerja Pers.

Pemanggilan kali ini, lambat laut akan mempengaruhi terhadap psikologis insan Pers. Keberanian mereka untuk mengungkapkan fakta yang terjadi kian terkedilkan akibat intervensi dari pihak pemerintah

4 Dipublikasikan Bernas Yogyakarta, 24 November 2009

terlalu menguat. Sehingga independensi terhadap Pers kian berkurang dan melemah.

Perlu digaris bawahi, Kedudukan pers dalam negara, amat penting untuk mencerdaskan masayarakat, serta meluruskan kesalahpahaman masyarakat. Kiprahnya amat mampu memberikan kesadaran terhadap masyarakat untuk lebih bersikap kritis dan politis menghadapi persoalan yang terjadi.

Untuk mencapai itu, kebebasan dan kemerdekaan dalam pers harus ada. Bila tidak terjadi, jangan harap gerak pers akan tercapai. Sepertinya negara kita kurang memberikan jaminan terhadap pers. Terlihat dari pemanggilan terhadap dua media massa tersebut dan polri tidak menilai berita yang mencemarkan nama baiknya. Akibatnya, sikapnya memberikan kesan buruk dengan melibas rambu-rambu hukum. Artinya kepatuhan dilabrak demi mematuhi keinginan pengusaha dari Surabaya, Anggodo Widjojo.

Kejadian ini sangat memprihatinkan terhadap keberadaan pers. Mengibaratkan era sekarang, yang disebut era SBY-Boediyono dengan era Orde Baru nyaris tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanyalah pada praktiknya. Kalau Orde Baru menurut Kordinator Indonesia Corruption Wach, Danang Widoymko, penguasa secara spontan menelpon pemimpin redaksi tanpa ada proses hukum. Dan apabila masih melakukan bantahan. Sikap penguasa membredel media massa tersebut. Seperti, Sinar Harapan, Tabloid Monitor, Detik, Majalah Tempo dan Editor. Kalau sekarang, polisi secara mudah memanggil pemimpin media massa. Mengambarkan sikapnya mengikuti penguasa Orde Baru yang menpunyai kekuasaan terhadap negara.

Tidak salah bila status polri saat ini dihujani aneka macam kecaman dari berbagai pihak yang dinilai tidak mematuhi hukum. Citranya di mata masyarakat kian menburuk setelah sebelumnya terjadi perseteruan antara dengan KPK. Harapan rakyat terhadap pers amat besar, ketergantungannya terhadap informasi cukup tinggi untuk mengetahui situasi negara.

Persoalan yang dihadapi pers dari dahulu hingga sekarang adalah jaminannya belum teruji. Padahal di awal tahun 2009, Mahkamah Agung (MA) memberikan harapan untuk melindunginya. Nyatanya hingga sekarang, janji itu belum terealisaikan. Sementara peran Dewan Pers, menurut Sabam Leo Batubara, Wakil Ketua Dewan Pers, untuk melindunginya masih memasuki tahap menjanjikan.

Mengingat pentingnya pers dalam sebuah negara. Tidak ada alasan untuk tidak melindungi dan memberikan kebebasan guna melancarkan kinerja Pers. Kecuali terdapat data jelas, bahwa terdapat tindakan penyelewengan dan penghinaan nama baik dari pihak pers itu sendiri. Secara hukum, pers mendapatkan sanksi. Ini tertera dalam pada pasal 18 ayat 1 UU Pers. Media itu dapat dipidana denda paling banyak Rp 500 Juta.

Kesalahan Fatal

Mengingat pemanggilan terhadap kedua media tersebut, terdapat kesalahan fatal yang mengakibatkan penilaiannya menuai kontroversi dan tidak jelas. Semestinya, sebelum pemanggilan dilaksanakan oleh pihak polri, terlebih dahulu pihak polisi menilai secara detail hasil laporan dari Anggodo Widjojo sehingga kesan dari pemanggilan tersebut tidak terkesan mengikuti kehendak pihak pelapor.

Berdasarkan pertemuan antara Dewan Pers dengan SBY di Jakarta (25/12005) menghasilkan, penyelesaikan masalah berita pers dapat ditempuh, *pertama*, dengan hak jawab, *kedua*, bila masih dispute, diselesaikan ke dewan pers, *ketiga*, bila masih dispute, penyelesaian lewat jalur hukum tidak ditabukan sepanjang *fair*, terbuka dan akuntabel.

Oleh karena itu, kesalahan utama pada kasus ini tidak ada pengaduan terlebih dahulu terhadap Dewan Pers untuk menberikan pertimbangan. Karena Dewan Pers memiliki wewenang untuk menpertimbangkan dan menyelesaikan kasus-kasus yang terkait, berdasarkan pasal 15 Ayat 2 d tentang Pers.

Matinya Pers

Kurangnya kebijakan yang memberikan ruang ekspresi seluas-luasnya terhadap pers, menunjukkan independensi bagi pers tergadaikan. Akibatnya, adanya sebuah media massa atau surat kabar ibarat tidak ada, bahkan keberadaannya kian menperparah dan menbodohinya. Disebabkan kiprah pers tersebut tidak lagi kritis terhadap fenomena yang terjadi. Keberadaanya senantiasa dipasung oleh penguasa, seperti pemerintahan orde baru. Tidak ada media massa atau surat kabar yang berani mengkritisi kebijakan pemerintah, karena konsekwensinya akan diberedel. Sehingga media saat itu kebanyakan mengayomi kebijakan pemerintah.

Secara lambat atau cepat, ketegangan dan hilangnya spirit pers akan muncul manakala pemerintah kembali melakukan pemanggilan media cetak. Sementara bukti dan alasannya tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik sebagai bukti dari media tersebut melakukan kesalahan. Akibatnya pihak pers merasa keberatan untuk mengekspos berita-berita penting yang menjadi rahasia negara.

Bila terjadi demikian menunjukkan kiprah pers sudah mati atau tidak ada. Soren Kerkegard mengatakan, adanya sesuatu manakala menunjukkan eksistensinya. Jadi manakala pers menbuntuti sikap pemerintah. Keberadaannya diibaratkan tidak ada karena tidak berfungsi sebagai sarana pengetahuan yang benar terhadap rakyat.

Pemasungan terhadap pers harus ditinggalkan guna tidak menakut-nakuti terhadap insan pers. Disini menunjukkan dukungan dari pemerintah merupakan prioritas utama dalam meluruskan peran pers ke depan yang sesuai dengan kode etiknya. Saat ini, pemerintah membutuhkan bukti konkrit dalam memberikan ruang kebebasan dan kemerdekaan, tidak hanya memaparkan janji-janji yang utopis.

Sisi Lain Penegakan Hukum Indonesia[5]

Oleh : Muhammad Arif

Ketemaraman yang melingkupi langit penegakan hukum di negri ini kembali terungkap. Terjadinya kerancuan antara benar ada atau tidak adanya rekaman pembicaraan yang melibatkan Ary Muladi dan Ade Rahardja dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu alat bukti dalam sidang Anggodo Widjojo. Ironisnya perdebatan benar ada atau tidak adanya rekaman tersebut kembali terjadi antara dua institusi penegak hukum, yaitu antara KPK dan Kapolri, dua institusi yang belum lama ini saling bersiteru (populer dengan sebutan perseteruan antara cicak dan buaya).

Awalnya Kapolri Bambang Hendarso Danuri dalam rapat kerja dengan komisi III DPR, menyatakan bahwa pihak kepolisian memiliki rekman tersebut. Namun, belakangan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Ito Sumardi menegaskan bahwa rekaman itu tidak ada, yang ada hanya *Call*

5 Dipublikasikan Kompas, Jumat, 20 Agustus 2010

Data Record (CDR) hubungan pembicaraan antara Ade Rahardja dan Ary Muladi yang tidak dapat dijelaskan kapan berlangsungnya. Selang lima hari, Komjen Ito menganolir pernyataannya tersebut. Dia mengatakan bahwa CDR itu bukan antara Ary Muladi dan Ade Rahardja, melainkan antara Ary Muladi dengan seseorang. Sebenarnya ada apa di balik semua itu?

Setidaknya ada dua kemungkinan jika hal tersebut dikaitkan dengan kondisi carut-marut penegaakan hukum di negeri ini. *Pertama,* rekaman tersebut sebenarnya tidak ada. Spekulasi ini memperkuat dugaan adanya rekayasa hukum. Ketika dipublikasikan bahwa kepolisian memilki rekaman tersebut, tentu ini akan memperkuat opini publik tentang tudingan adanya praktik suap kepada pimpinan KPK, yang ujungnya akan membuat eksistensi KPK melemah dan terpojok. *Kedua,* rekaman tersebut memang benar-benar ada. Akan tetapi, jika rekaman tersebut didengar publik akan menyebutkan beberapa nama yang sensitive, akhirnya dilakukan tarik-ulur dan menyimpulkan rekaman tersebut sebenarnya tidak ada.

Kerancuan ada tidaknya rekaman tersebut dan spekulasi yang berkembang tersebut perlu mendapatkan perhatian dari DPR. DPR harus melakukan klarifikasi terhadap Kapolri, karena pernyataan yang dilakukan Kapolri di depan forum DPR yang formal tersebut harus dipertanggung jawabkan. Jika hal ini diendapkan begitu saja—karena memiliki keterkaitan dengan pihak-pihak tertentu—maka wajah penegakan hukum di negeri ini akan nampak semakin buram.

Melihat fakta tersebut, tentu tidak berlebihan apabila Suteki, guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyatakan, bahwa kecenderungan hukum bersifat represif terhadap rakyat kecil dan protektif terhadap orang-orang besar. Begitu mudahnya fakta diputar balikkan dan hukum direkayasa ketika yang bermasalah adalah orang-orang besar. Dengan tenangnya para penegak hukum bermain-main dengan hukum. Membuat rakyat semakin skeptis pada butir kelima dari pancasila dapat direalisasikan.

Langkah antisipasi yang bisa dilakukan untuk mencegah hal serupa terulang kembali di antaranya adalah dengan memperketat proses rekruitmen aparat penegak hukum. Prioritas yang harus didahulukan adalah faktor moralitas, religiusitas, kredibelitas, dan integritas. Hal yang juga perlu dilakukan adalah kontroling terhadap pejabat terpilih. Tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat.

Terlepas dari kasus di atas, sebenarnya sistem hukum di Indonesia ini memang sebagaimana yang telah dikatakan Suteki, hukum di negeri ini lebih dekat kepada filsafat hukum barat dari pada pancasila, yaitu kepastian hukum melalui keunggulan proses litigasi untuk mencapai keadilan. Model hukum seperti ini tentu menyulitkan orang miskin untuk berkontes di muka peradilan, walaupun sudah ada bantuan hukum untuk mereka. Sangat ironis jika dibandingkan dengan orang kaya yang dapat dengan mudah mengunakan jasa advokat. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk meninjau ulang sistem hukum di negeri ini, agar keadilan dapat terwujud.

Mencontreng Juga Amalan Agama[6]

Oleh: Fathor Rahman MD

Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpinnya.

(HR Abu Dawud dari Abu Hurairah).

Dalam arti yang lebih luas, hadis Nabi di atas merupakan seruan kepada umat manusia bahwa dalam kehidupan ini, betapa pentingnya memilih seorang pemimpin. Pandangan serupa juga ditegaskan Ibnu Taimiyah: "Seburuk-buruk pemimpin yang zalim lebih baik daripada masyarakat yang tidak tertib dan kacau tanpa pemimpin." Jadi, aktivitas memilih presiden pada pemilu tahun ini tetap merupakan tindakan yang mulia.

Secara fungsional, membaca hadis Nabi di atas, mengapa sampai men-sabda-kan keharusan memilih pemimpin? Sebab, ada tujuan sama yang secara leterlek diibaratkan dalam sebuah perjalanan. Kehidupan

6 Dipublikasikan Jawa Pos, Jum'at, 03 Juli 2009

berbangsa dan bernegara kita ini, misalnya, memiliki tujuan dan keinginan yang sama, yakni tergapainya kesejahteraan bersama. Sedangkan pemilu merupakan upaya untuk mencari pemimpin yang mampu melahirkan itu semua.

Apabila dilihat dari kerangka semacam itu, kegiatan memilih seorang pemimpin sejatinya termasuk bagian dari ibadah sosial. Bukan hanya sebatas aktivitas politik. Bahkan, Imam al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam As-Sultaniyah* menegaskan bahwa menegakkan kepemimpinan merupakan kewajiban bagi seseorang (*nasbul imama fardu kifayah*).

Namun, belakangan ini gejala lumpuhnya kepedulian masyarakat untuk ikut menegakkan ibadah sosial sangat mencemaskan. Buktinya, semakin menurun jumlah partisipasi masyarakat dalam aktivitas pemilu legislatif lalu. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan, aktivitas pilpres nanti juga semakin sepi dari partisipasi masyarakat. Apalagi seruan-seruan golput terkadang muncul liar dari figur-figur publik yang disegani banyak masyarakat.

Memaknai Pemilu

Hilangnya semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas pemilu sejatinya merupakan wujud ketidakmengertian mereka bahwa memilih pemimpin atau wakil rakyat juga termasuk bagian dari aktivitas agama dalam bentuk ibadah sosial. Selama ini, kita selalu berada dalam kubangan pemahaman yang sempit bahwa aktivitas politik hanya murni sebagai ritual duniawi, yang tidak ada interelasinya dengan agama. Akibatnya, masyarakat mudah mengabaikan aktivitas pemilu. Mereka tidak memandangnya sebagai kewajiban yang penting untuk ditunaikan.

Masyarakat tidak pernah berpikir substansial bahwa bentuk-bentuk interaksi sosial juga bagian dari aktivitas agama. Contoh interelasi sederhana, dengan perut yang kenyang dan terpenuhinya segala kebutuhan, seseorang bisa tenang untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan, konflik sosial dimungkinkan menurun apabila kehidupan masyarakat

sudah sejahtera. Maka, memilih pemimpin dengan tujuan kesejahteraan bersama termasuk bagian dari aktivitas merawat agama.

Seperti halnya aktivitas keseharian kita, ke sawah, ke kantor, ke pasar, dan sebagainya, untuk apa dilakukan? Semua itu dilakukan untuk mempertahankan kehidupan agar tidak mati kelaparan dan terpenuhi segala kebutuhan lainnya. Selain itu, pada dasarnya, aktivitas itu dilaksanakan karena ada kesadaran primordial kemanusiaan yang terbentuk seiring dengan pengetahuan akan dirinya, sebagai makhluk ciptaan yang ditugasi untuk memimpin dan mengelola kekayaan alam (*khalifa fil ard*). Kalau kesadaran itu absen, manusia akan mudah putus asa dan bunuh diri di saat mengalami kesulitan.

Demikian pula kegiatan memilih presiden nanti, secara substansial termasuk bagian aktivitas manusia untuk mempertahankan hidup dan menemukan kesejahteraan melalui kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, keliru apabila kita memandang kegiatan pilpres hanya secara formal, sebatas aktivitas politik duniawi.

Kuatnya semangat sekularisasi formal, agama, dan politik ternyata turut mendistorsi pemahaman substansial akan hubungan nilai agama dan aktivitas sosial. Maka, di tengah kenyataan semacam itu, penting bagi masyarakat belajar memaknai aktivitas keseharian, mencerdasi segala tindakan, menggali nilai agar aktivitas keseharian bermakna sebagai ibadah, tidak hanya gugur sebagai tindakan duniawi. Dalam konteks mencontreng, kita harus memaknainya sebagai aktivitas agama, supaya tumbuh nilai ibadah. Juga, memiliki semangat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kenyataan semacam itu dulu pernah dicemaskan almarhum Nurcholish Madjid ketika beliau mencetuskan ide sekularisasi. Masyarakat di negara yang belajar mengimpor sistem demokrasi dari Barat akan rawan terjebak pada pemahaman sekularisme, pemisahan total aktivitas politik dengan agama. Karena itu, kemudian Cak Nur -sapaan Nurcholish Madjid- menawarkan gagasan sekularisasi sebagai solusi antisipatif.

Bagi Cak Nur, sekularisasi adalah pemisahan agama dan politik dalam level sosiologis, bukan dalam basis nilai. Cak Nur merujuk gagasan itu kepada Robert N. Bellah dan Tallcot Parcons, sosiolog. Bagi Cak Nur, pemahaman sosiologis sekularisasi antara agama dan politik akan mencegah munculnya pandangan parsial, yang akan menghapus orientasi keagamaan dalam norma-norma dan nilai kemasyarakatan dalam aktivitas politik, khususnya ketika semangat demokrasi Barat sudah benar-benar diamini oleh bangsa kita. Kalau terlebih dahulu tertanam pemahaman demikian, agama dan politik akan tetap dipandang memiliki interelasi nilai.

Maka, di saat momentum pilpres nanti, kita semua mesti berusaha memaknai dan mencerdasi pemilu tidak hanya sebatas aktivitas duniawi, melainkan sebagai aktivitas agama. Dengan tumbuhnya kesadaran semacam itu, kandidat yang terpilih tidak akan mudah berkhianat dan rakyat akan merasa penting untuk menyumbangkan aspirasi politiknya.

Gelombang Politik Transaksional[7]

Oleh: Fathorrahman Hasbul

Pasca penyerahan daftar anggota calon legislatif (Caleg) oleh seluruh partai politik ke KPU beberapa pekan lalu, riak gelombang pemilihan umum mulai tercium ke permukaan. Beberapa calon legislatif mulai bersaing untuk memperebutkan kursi legislatif. Paling tidak, seluruh calon akan berlomba-lomba menyiapkan logistik untuk 'berperang' dalam memperebutkan kekuasaan. Potret perebutan kursi akan menjadi etalase bagi kultur politik di republik ini. Sebab perebutan kekuasaan selalu memiliki proyeksi kuantitas materi dalam berpolitik, bukan kualitas politik yang digagas, dibangun, dan diterapkan secara santun dan bermartabat.

Kontestasi politik pada titik tertentu menjadi spektrum perebutan 'madu' yang senantiasa selalu menciptakan disilusi bagi keberlangsungan bangsa ini. Perhelatan pemilu sejak orde lama hingga reformasi belum mampu menjadi bagian integral dalam proses mendorong demokratisasi

7 Dipublikasikan Harian Kontan 13 April 2013

berbasis kesejahteraan. Pemilu tak lebih sebagai proses peremajaan jabatan yang miskin nilai. Beberapa politisi di DPR tidak sepenuhnya hadir dalam lingkaran nurani kebangsaan, melainkan didasarkan pada kepentingan individu dan kroni. Sehingga pentas politik memperlihatkan sebuah parade pertunjukan di mana struktur politik akan memodifikasi kepentingan rakyat ke dalam lubang hitam kepentingan kekuasaan.

Perilaku politik semacam ini seyogyannya melambangkan tradisi politik yang rapuh. Mereka turun, melihat, dan meratapi rakyat hanya untuk kepentingan suara konstituen. Sementara agenda strategis untuk menciptakan kesejahteraan umum hanya menjadi opini kosong yang setiap saat mengalun dengan 'merdu', padahal menyimpan penghianatan makna yang menyakitkan. Komudifikasi politik akan mudah terlihat ketika kontestasi pemilu semakin dekat. Para politisi akan turun dan menjadi bagian dari mereka. Menjadi bagian dari diaspora kemelaratan hidup, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Sementara pandangan politik para kandidat mayoritas bersifat palsu dan menipu.

Transaksi politik

Menjelang pemilu, iklim politik nasional selalu mengarah pada proses transaksi politik. Transaksi politik menjadi salah satu simpul sederhana dari proyek pragmatisme politik. la menjelma menjadi satu syarat agung bagi keberlangsungan kontestasi politik. Sebab transaksi politik tidak sebatas bagaimana keterpilihan menjadi titik balik setiap politisi dalam menggait simpati, melainkan merupakan preseden demokrasi yang buruk. Sebab hak suara dibeli dan dijajakan sebagai barang dagangan.

Jean Bodin (1590) menegaskan bahwa transaksi politik merupakan kerangka kerja kekuasaan yang tidak sekedar berimplikasi pada proses kepalsuan politik, tetapi telah masuk pada pembunuhan karakter ideologi politik yang berkembang. Pertumbuhan politik kemudian menemukan batu sandungan berupa keterpaksaan, kebohongan, dan bahkan ambruknya identitas politik yang bermartabat.

Dalam paradigma komunikasi politik, transaksi politik merupakan satu rentetan bagaimana pesan digadaikan dan dijualbelikan dengan cepat. Sehingga pesan-pasan moral, keadaban, dan nilai-nilai luhur politik akhirnya tenggelam oleh proses transaksi politik akibat ambisi kekuasaan yang sesaat. Sehingga demokrasi politik berjalan *terseok-seok* karena di setiap ideologi, selalu ada 'rayap politik' yang membuat bangunan demokrasi politik rapuh. Dalam bahasa Habermas (1990), kegagalan dalam memformulasikan komunikasi politik akan memperlebar ruang disparitas elite dan publik. Sehingga pesan-pesan kekuasaan yang konstruktif terganjal oleh komudifikasi taktik politik yang menjebak dan menjatuhkan.

Gejolak transaksi tersebut pada praksisnya sangat sulit dibendung. Sebab ia serupa amunisi dan taktik 'jalan lain' yang terus diamini. Semua kotestan akan berlomba-lomba menjadi 'kecap' nomor satu. Masyarakat, tokoh, dan beberapa elemen yang berkepentingan, semuanya akan merapatkan barisan untuk mendapatkan tetesan 'madu' dari para calon politisi. Massa dengan mudah akan digiring pada komuflase politik transaksional. Sebab pemilu tak ubahnya pesta politik yang punya orientasi peremajaan jabatan, bukan peremajaan kesejahteraan.

Hadirnya politik transaksional setidaknya akan menjadi ancaman paling nyata bagi proses pembumian demokrasi. Sebab, transaksi adalah bagian dari simpul komunikasi tingkat tinggi yang mengandung makna inferensial. Pertama, transaksi pesan selalu mengandung implikasi *trival*. Implikasi ini merupakan proses pemyampaian pesan yang terjadi secara tidak langsung dalam pengindraan manusia. Implikasi ini biasanya lumrah dilakukan oleh calon yang masih *incumbent*. Mereka terjun dan melakukan pemberdayaan atas nama pemerintah, tetapi merupakan taktik kampanye agar terpilih di pemilu berikutnya baik pada level serupa maupun level yang lebih tinggi. Bahkan konsep ini sering dilakukan oleh para pengurus Ormas dalam rangka sebuah pemberdayaan, padahal tersimpan muatan politik praktis .

Kedua, implikasi analitis. Implikasi ini merupakan satu bentuk penyampaian pesan yang tidak perlu menggunakan taktik sembunyi. Para politisi langsung melakukan aksi transaksi secara terbuka. Konsep ini seringkali terjadi pada proses kampanye langsung, blusukan, dan sejenisnya. Semisal mendekati orang miskin dan berjanji jika terpilih akan membangun jalan, rumah susun, dan lain sebagainya. Semua implikasi tersebut merupakan rangkaian dari transaksi sebagai sebuah proses komunikasi. Sehingga transaksi sebagai bagian dari simpul komunikasi semestinya dimanfaatkan dengan baik. Bukan dijadikan legitimasi untuk menjual 'kehormatan' politik dalam mencapai sebuah kekuasaan dengan segala cara.

Potensi konstituen

Kini menjelang pemilu ekspektasi calon tidak lagi begerak lamban, tetapi melaju cepat untuk memperebutkan momentum kemenangan. Semua Caleg akan turun ke daerah untuk mencari simpati dan dukungan. Semua akan memberikankan gagasan, empati, dan bantuan dengan beberapa strategi politik yang beragam. Sehingga masyarakat dalam hal ini dituntut lihai memahami pendekatan politik sebagai proses politik yang instan, bukan sebagai haluan kemanusiaan yang dengan mudah tertarik dan simpati kepada para calon.

Pemahaman ini menjadi satu kesadaran yang utuh sebab proses politik acapkali bersifat deterministik. Masyarakat sebagai konstituen rasional sejatinya memilki kerangka pengetahuan tentang sepak terjang pada calon yang akan bertarung. Pemahaman yang utuh menjadi signifikan karena selama ini banyak politisi gemar mengumbar janji manis, padahal proyeksi politik yang digagas tidak dilandasi oleh semangat perubahan yang hakiki. Sehingga sadar untuk memilih yang tepat tanpa terjebak pada proses transaksi politik, merupakan salah satu bagian dari jihad kebangsaan.

Meretas Relasi Media dan Politik[8]

Oleh: Fathorrahman Hasbul

Pasca diumumkannya nomor urut peserta pemilu 2014 oleh KPU, sentak membuat konstelasi politik di republik ini semakin memanas. Nomor urut adalah awal paling sederhana untuk membuktikan bahwa genderang kompetisi politik akan segera dimulai. Tidak hanya itu, dinamika politik nasional praksis tengah memasuki babak baru. Tersandungnya beberapa petinggi partai politik ke lingkaran kasus korupsi paling tidak telah memberikan warna tersendiri bagi konstelasi politik ke depan.

Kenyataan ini cukup beralasan mengingat ekspektasi partai politik akan segera memasuki babak kontestasi. Semua partai menginginkan menjadi 'kecap nomor satu'. Sehingga angka pun menjadi alasan sederhana untuk menarik simpati publik. Tentu semuanya sah selama kasadaran politik yang konstruktif dan etis tetap menjadi sumbu penting dalam diaspora politik mereka.

8 Dipublikasikan Jurnal Nasional 27 Februari 2013

Namun dalam hiruk pikuk politik tersebut terdapat sindrom politik yang cukup menggelisahkan. Yakni terkait bagaimana hubungan media khususnya media penyiaran dengan partai politik. Beberapa media hingga saat ini tetap getol mengiklankan beberapa calon presiden dan partai tertentu secara konsisten. Sepintas ini memang biasa dan lumrah terlihat, akan tetapi menjadi tidak biasa ketika KPU secara resmi mengumumkan beberapa partai yang lolos untuk maju ke pentas pemilu 2014.

Bahkan tidak hanya itu, fenomena Anas Urbaningrum dan Lutfi Hasan Ishaq menjadi semacam umpan 'menguntungkan' bagi beberapa media. Mengingat keduanya tidak memiliki kendaraan media yang representatif sehingga pada titik tertentu berita tersebut menjadi berita yang berpretensi pada kepentingan politik tertentu. Sama halnya dengan menaikkan elektabiltas partai sendiri dengan merobek elektabilitas partai lain melalui kuasa media.

Diskriminasi etika publisitas politik menjadi tampak terlihat. Paling tidak, partai yang tidak memiliki relasi kuat dengan media, diterpa keterbatasan logistik, dan kondisi finansial yang minimalis hanya bisa gigit jari dan menjadi penonton iklan politik yang heroik.

Setelah nomor urut selesai, skala politik semakin hari semakin mengklimaks. Janji penyelesaian revisi UU Penyiaran oleh Komisi 1 DPR RI yang bekerja sama dengan KPU dan KPI hingga kini belum menemukan titik kepastian. Sehingga pedoman iklan politik masih berpijak pada aturan lama yang hanya mengatur iklan politik dalam masa kampaye. Dimana selama 21 hari untuk media televisi dibatasi maksimal 10 kali tayang dengan durasi 20 detik dan untuk radio disiarkan 10 kali dengan durasi 60 detik. Sedangkan di luar masa kampanye lagi-lagi belum diatur. Padahal UU tersebut sangat signifikan lebih-lebih untuk saat ini dimana formalitas babak baru kontestasi politik yang diawali dengan verifikasi partai telah dimulai. Entah karena problem politik maupun spekulasi dan intevensi ekonomi, revisi UU Penyiaran belum jelas kapan akan selesai.

Monolitik citra partai

Diaspora iklan politik yang senantiasi diskriminatif tersebut, pada babakan yang lain akan melahirkan diskursus berupa monolitik citra partai. Partai Golkar dan Nasdem acapkali menjadi partai yang sangat diuntungkan dengan proses ini. Sebab kapanpun dan dalam kondisi apapun mereka bisa menayangkan iklan politik dengan mudah. Dalam perspektif Henshall (2000) tata monolitik citra partai dalam negara demokrasi akan melahirkan dominasi politik yang tidak sehat. Sebab pesan-pean politik dalam iklan tersebut akan menjadi otoritas tunggal karena hanya ada segelintir episentrum politik yang berkuasa.

Di sinilah kemudian penting mempertimbangkan gagasan Garnham (1979) yang menyebutkan bahwa di dalam negara yang baru memulai sistem demokrasi selalu ada ketergantungan ideologi media terhadap ekonomi dan politik. Sebab mayoritas di negara yang masih belajar berdemokrasi kepentingan-kepentingan politik mayoritas datang dari pemilik media.

Terlepas dari problem ini, namun yang pasti relasi antara media dan politik di republik ini mengalami distabiltas yang berujung pada lahirnya dominasi kuasa citra partai yang cenderung monolitik. Kuasa media kemudian berhasil mengintervensi kuasa politik. Falsafah media yang seringkali ditempatkan dalam kerangka *quality of information and culture available to public* menjadi jembatan yang tidak lagi adil dalam skala politik nasional. Sebab bisa jadi publik tidak suka dengan iklan dan berita terkait partaipolitik tertentu yang diberitakan secara berulang-ulang. Sehingga memungkinkan lahirnya apatisme politik yang tanpa disadari semakin lama semakin tumbuh dalam imaji kesadaran mereka setiap saat.

Memahami apatisme publik menjadi sangat penting diperhatikan. Menurut Raymond Williams (1975) dalam teorinya *the pervasive presence theory*, mengasumsikan bahwa media khususnya media penyiaran sangat dominan pengaruhnya terhadap publik melalui pesan ofensif yang masuk ke dalam memori mereka sehingga perlu proses pengaturan yang jelas.

Termasuk dalam konteks sajian berita partai politik yang dominatif. Sebab harus diakui bahwa dominasi politik tertentu dalam media merupakan awal dari matinya sebuah keadilan pers. Matinya keadilan pers sesungguhnya merupakan awal dari kematian demokrasi (*the death of democracy*)

Menuju stabilitas hubungan

Jika ini tidak dipahami secara utuh, dominasi dari beberapa partai politik tertentu akan menciptakan distabilitas politik. Janji Komisi 1 DPR RI untuk menyelesaikan revisi UU Penyiaran jangan sampai menjadi janji palsu. Sebab UU tersebut merupakan keniscayaan untuk menciptakan keadilan bagi media dan partai politik. Stabilitas hubungan antara media dan politik sejatinya berjalan seirama, seimbang, dan yang lebih penting adalah berkeadilan tanpa ada jurang dominasi yang lebar.

Stabilitas ini sangat dibutuhkan untuk menghindari apa yang disebut oleh Bramson (1916) sebagai gejala masyarakat massa, dimana ada ketergantungan timbal balik antara orang yang memiliki otoritas dalam media tertentu dengan konten yang disajikan untuk mempengaruhi publik tanpa rasa ampun.

Berita dan iklan tertentu disajikan terus menerus tidak penting apakah yang disajikan buruk dalam persepsi publik atau tidak. Sehingga publik kemudian memperoleh sajian yang tidak lagi menghibur dan mendidik, melainkan lebih pada otoritas kehendak politik yang dipaksakan. Dengan demikian, distabilitas hubungan media dan politik harus benar-benar dihilangkan. Jika tidak, konstelasi politik di republik ini akan sulit untuk menemukan keadilan yang hakiki.

Kegagapan Bangsa Bernama Indonesia[9]

Oleh: M. Romandhon MK

Menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), situasi politik di Indonesia kian hari semakin riuh. Berbagai isu dan fenomena ganjil mengiringi akhir perjalanan masa bakti Presiden SBY. Mulai dari KLB Partai Demokrat di Sanur Bali (30/3), juga isu kudeta pada 25 Maret lalu, sampai pada penyerbuan Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta (23/3). Tepat lewat tengah malam, Lapas Cebongan disatroni segerombolan orang tak dikenal, gerombolan ini membunuh 4 tahanan asal Nusa Tenggara Timur, yang diduga aktor di balik pembunuhan anggota Kopassus TNI AD, Sertu Santoso. Sebelumnya pada bulan yang sama (7/3) masyarakat telah disuguhi narasi baku hantam, antara oknum TNI AD Armed 76/15 Martapura yang menyerbu kompleks Markas Polres Ogan Komering Ulu (OKU). Serbuan ini membumihanguskan Kantor Polisi OKU serta menewaskan satu warga sipil.

9 Dipublikasikan Sinar Harapan, 3 April 2013.

Bersamaan dengan itu, nasib sama juga dialami oleh tentara Indonesia yang berada di bumi Papua, di mana delapan prajurit TNI gugur di Distrik Sinak dan Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua akibat ditembaki kelompok bersenjata (21/2). Kondisi ini tentu semakin memperparah kekacauan di negeri ini. Kekerasan dan premanisme terus menjadi momok. Belum selesai dihadapkan pada masalah ketahanan pangan, berbagai persolan hilir mudik silih berganti. Masih teringat jelas bagaimana kegagalan bangsa ini dalam mengelola impor daging sapi sampai pada paceklik bawang putih. Mimpi berswasembada daging, berswasembada bumbu, berswasembada palawija dan berswasembada beras hanya menjadi ilusi di siang hari. Rentetan peristiwa bersejarah belakangan ini adalah bukti nyata bagaimana situasi yang melanda Indonesia jelang pergantian suksesi pemimpin 2014, membuat negara dihadapkan pada situasi yang gaduh.

Berbagai wacana publik tumpah ruah menyesaki dinding tebal perkampungan warga. Dunia sepakbola berduka usai dipermalukan Arab Saudi di Gelora Bung Karno, elit politik gaduh, bahkan isu kudeta menjelma phobia akut di tataran elit pemerintahan. Ribuan pasukan dikerahkan guna mengantisipasi amukan massa. Seakan segalanya sudah berada di titik nadir. Aparat kemanan negara saling lempar curiga. Nalar su'uzdhon menjelma menjadi harga mati bagi masyarakat. Segalanya serba terkacaukan. Akal sehat tak lagi bisa berfikir rasional. Isu kudeta telah menyebabkan presiden SBY paranoid. Ketakutan SBY nampaknya mengingatkan penulis pada sosok Amangkurat I tatkala Kerajaan Mataram Islam terus dikoyak dengan isu pemberontakan dan pembangkangan.

Kisruh Politik Abad 17

Good reason and real reason, kita harus kembali menongok sejarah pergolakan politik raja-raja Jawa pada abad 17. Di mana kekisruhan politik di tataran elit raja dimanfaatkan oleh tentara Belanda saat mengepung tanah Jawa. Setelah Sultan Agung mangkat, raja Mataram berikutnya diganti oleh Sunan Amangkurat I (1645-1677). Pada masa

pemerintahannya, masa kejayaan Mataram mulai memudar. Raja-raja berikutnya juga tidak mampu membawa Mataram kembali ke masa jayanya. Daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Mataram, satu per satu berusaha memisahkan diri. Akhirnya, setelah dikacaukan dengan berbagai pemberontakan, seperti Pangeran Trunojoyo dari Madura yang mendirikan keratonnya di Kediri (1677-1680) dan Untung Surapati yang kemudian berkeraton di Pasuruan (1686-1703), Mataram pun terjerumus dalam 3 perang suksesi, yang berakhir dengan Perjanjian Giyanti (1755) dan Perjanjian Salatiga (1757) (H.J. De Graaf, 1987: 49).

Akibatnya pasca pemerintah Sultan Agung dan Amangkurat I, pada 1675 kerusahan pecah. Setelah kekisruhan itu, akhirnya raja-raja Mataram gagal memulihkan kekuasaannya atas keseluruhan tanah Jawa. Ketika tahun 1755 perdamaian kembali tercapai, namun ibarat nasi jadi bubur, kerajaan telah pecah. Priangan yang merupakan inti tanah Pasundan, lepas dari pengawasan para sunan. Tahun 1667, Citarum ditetapkan sebagai perbatasan. Selanjutnya tahun 1705 perbatasan dimundurkan sampai ke Cirebon (Denys lombard, 2006: 45). Dengan demikian dapat dipastikan jika Jawa Barat sudah berada di luar sistem kerajaan Jawa dan menjadi semacam "tanah tak bertuan". Saat itulah momentum bagi VOC untuk mengambil alih tanah Pasundan.

Alhasil wilayah inti kesunanan abad ke-17 dibagi menjadi tiga "kerajaan" terpisah-pisah. Sementara itu, keadaan di wilayah Jawa Timur situasinya jauh lebih kacau lagi. Daerah bekas jantung Majapahit itu terus menerus memberontak dan dijadikan basis berbagai pembangkang. Pada akhirnya meletuslah peristiwa yang terkenal dalam sejarah tradisional sebagai "tiga Perang Suksesi". Perang Suksesi pertama, ketika Amangkurat II meninggal dunia, dan menyangkut anaknya, Amangkurat III melawan saudaranya Pangeran Puger, yang bergelar Paku Buwana I. Peristiwa sejarah abad ke-17 menjadi bahan kajian menarik untuk melihat Indonesia dewasa ini.

Diskursus disharmonisasi yang terjadi antar sesama oknum keamanan di negeri ini bisa menjadi bola liar sekaligus menjelma bom waktu

yang setiap saat meledak. Jahdan Ibnu Malik (2013) mengutip Lensky mengatakan bahwa sedikit revolusi di negeri ini yang berhasil tanpa bantuan militer, kecuali militer dalam keadaan disintegrasi dan demoralisasi. Good reason for clouding real reason, di mana telah datang suatu masa atau situasi yang bagus untuk menutupi kondisi yang sebenarnya. Bisa diibaratkan jika fenomena yang melanda negeri ini tak ubahnya wabah anomali.Yakni suatu masa di mana terjadi penjungkirbalikan nilai atau norma, serta ketidakpastian dalam berbagai hal. Kondisi ini disebut-sebut oleh beberapa pakar sebagai gejala failed state (negara gagal). Lantas, akan dibawa kemana alur cerita yang bernama Indonesia? Wallahu a'lam.

Baliho Caleg, Kreatif Tanpa Kreativitas[10]

Oleh: Fathorrahman Hasbul

Meskipun pentas pemilu masih relatif lama, tetapi *tetek bengek* terkait pesta demokrasi lima tahunan ini mulai menyeruak ke permukaan. Di beberapa tempat, iklan politik berupa baliho para calon wakil rakyat hadir bak jamur di musim hujan. Semua berambisi menjadi 'kecap nomor satu'. Gestur dan pesan persuasi pun tercover dalam kewibawaan gambar. Entah apakah simpul-simpul tersebut mencerminkan tawaran politik yang serius, atau sebatas janji palsu dan menipu? Tetapi yang jelas itulah praktik pesta demokrasi politik yang mengesahkan kebebasan dalam mengekspresikan diri.

Dalam diaspora masyarakat modern, kecenderungan masyarakat tentang pemahaman terhadap iklan politik berupa baliho selalu bersifat ofensif. Tellis dan Fornell (1988) menyebutkan iklan politik berupa baliho merupakan iklan yang memiliki tingkat visualisasi pesan yang rendah. Sebab baliho minim *market power* sehingga mengakibatkan daya

10 Dipublikasikan Republika, 15 Juni 2013

promosi iklan menjadi lemah. Imaji masayarakat berpusat pada simpul praktis-pragmatis, mereka sadar bahwa gaya apapun dalam setiap baliho tidak selalu mencerminkan kapabilitas diri. Mengingat daya tawar bukan lagi benda dan barang yang bersifat pasif, melainkan manusia politik yang memiliki tradisi mengumbar janji. Setidaknya jika dalam iklan barang dagangan masih memiliki nilai *price* dam *place* yang diasosiasikan pada nilai tawar dan kondisi psikologis tempat, tetapi baliho caleg nyaris tidak memiliki dua kategori tersebut.

Problem ini pada titik tertentu akan melahirkan problem sampah visual. Di beberapa sudut kota, baliho caleg praksisi menjadi tontonan tanpa tuntunan. Baliho menjelma sebagai etalase tumpukan janji yang mengambang. Sebab setiap calon dan konten baliho tidak lagi memiliki kapasitas berupa nilai *interpersonal communication* berupa kedekatan dengan konstituen. Tetapi momentum yang dijalankan sebagai sebuah pesta demokrasi yang prosedural. Mengaku dekat padahal jarak antara calon dan konstituen, meminjam istilah Kuswaidi Syafi'ie (2012) 'lebih jauh dari pada luasnya samudera dan panjangnya malam'.

Partisipasi politik masyarakat pada babakan yang lain menjadi sulit diwujudkan. Kuantitas baliho tidak selalu berbanding lurus dengan kuantitas pemilih. Di sini *marketing expenditure level* berupa anggaran besar untuk biaya baliho tidak berbuah apapun, kecuali hanya sebatas sesaknya ruang publik yang dalam bahasa Habermas memasuki zona rasionalitas instrumental. Bentuk 'penindasan' berupa kuasa makna politik tertentu untuk kepentingan pragmatis. Sehingga ruang publik yang semestinya menjadi episentrum emansipasi melalui komunikasi tanpa dominasi belum terwujud secara holistik.

Ekokomunikologi

Adalah Bernhard Waldenfels (1985) seorang praktisi ilmu geografi yang juga peduli dengan isu-isu sosial terutama dinamika media dan komunikasi dalam kaitannya dengan kelangsungan ekologis di muka bumi. Bernhard memberikan satu tesis sederhana bahwa kelangsungan alam,

tumbuhan, dan sejenisnya bisa sirna ketika simpul-simpul komunikasi berwajah kapital telah merusak tatanan alam yang berkembang.

Tampaknya tesis ini memiliki relevansi ketika kini banyak baliho yang yang dimaksudkan untuk proses komunikasi diri atas publik nyaris menodai kelangsungan tumbuhan. Para kandidat caleg tidak segan-segan menaruh baliho di pohon dan ditempat asri berwawasan lingkungan. Mereka tidak sadar bahwa pohon juga hidup ia punya tubuh untuk berbicara dan merasakan kehidupannya sendiri. Sehingga praktik tersebut tidak sekedar membuat muak masyarakat, tetapi juga muak bagi tumbuhan karena telah menjadi korban dari proyek politik calon legislator.

Ketika kesadaran calon legislatif krisis ekologis, maka tak ada yang bisa diharapkan dari para caleg yang gemar meletakkan dan memaku balihonya di pohon. Sebab, disamping mengabaikan keasriaan, mereka telah merusak tubuh pohon yang hidup dan dilindungi. Pada titik klimaksnya bisa dipastikan mereka tidak akan peka terhadap jeritan dan kegelisahan konstituennya. Lagi-lagi baliho menjadi malapetaka ekologis yang mengabaikan kesadaran ekokomunikologi.

Miskin kreativitas

Dalam kajian komunikasi politik, kampanye dan iklan politik tidak selalu bisa diterjemahkan dalam kerangka yang instan. Konstelasi politik selalu bersifat praktis sekaligus memuat nilai-nilai etis sebagai manifesto gerakan politik itu sendiri. Di sini baliho tidak memiliki standar kelayakan dalam sebuah strategi iklan politik yang memadai. Dalam pespektif Lazarsfeld (1997) kampanye politik semestinya memasukkan beberapa kerangka urgen seperti faktor fisik, teknologis, sosial kultural dan etika politik. Semuanya merupakan modal paling absah untuk dijadikan sebagai spektrum beriklan khususnya dalam konteks menaikkan elektabilitas personal setiap caleg. Bukan sebatas baliho yang membuat pemandangan tataruang publik menjadi kumuh dan keruh.

Baliho caleg yang menyeruak di beberapa sudut kota, trotoar, depan sekolah, pasar, dan tempat keramaian yang lain semuanya bisa dimasukkan ke dalam taktik kreatif tanpa kraativitas. Mereka Kreatif membuat daya dan gaya iklan dengan model dan warna yang beragam tetapi justru semua iklan tidak memberikan nilai apapun kecuali sebatas estetika wajah, gaya, dan gagasan yang dijajakan tanpa batas. Bahkan pesan-pesan yang dijajakan semuanya seragam seperti perubahan, pemuda, dan sejenisnya. Ada komudifikasi pesan kampanye yang tidak relevan dan cenderung mengambang.

Jika kembali membuka lipatan sejarah, pertumbuhan iklan poltik yang penuh dengan kreativitas di Indonesia dimulai pada zaman pendudukan Belanda, di saat Gubernur Jan Pieterz Coen (1619-1625) berkuasa. Pada saat itu sudah diterbitkan lembaran informasi yang ditulis indah (silografi). Dilihat dari fungsi dan bentuknya, lembaran tersebut bersifat informasi persuasif pemerintah yang komersial. Namun penting juga dicatat bahwa model-model iklan tersebut dilakukan dengan memperhatikan keselarasan ruang publik, kerja nyata, dan memiliki kinerja yang jelas. Sehingga pesan-pesan yang termuat dalam setiap lembaran mengandung nilai *sustainable development* yang komprehensif.

Di sini baliho bukan tidak penting, tetapi ketika baliho merusak kenyamanan ekosistem lingkungan, ruang publik menjadi ruang dominasi, serta tidak diimbangi dengan kreativitas berupa semangat pembangunan, pendampingan terhadap masyarakat secara berkelanjutan, maka baliho tidak memiliki arti dan efek apapun selain sebagai sampah visual yang miskin nilai.

Melihat Wajah Politisi Indonesia[11]

Oleh: Habibullah

Dalam sepuluh tahun terakhir, dunia perpolitikan republik ini bisa dikatakan stagnan dan hanya berkutat pada satu sisi kekuasaan semata. Karena, sejak bendera reformasi dikibarkan oleh mahasiswa dan masyarakat, berbagai persoalan yang melanda birokrasi kita hari ini menunjukkan tanda yang terus menanjak.

Kredibilitas, implementasi, akuntabilitas, professionalitas, dan progresifitas untuk merubah kehidupan rakyat, ternyata dalam perjalanannya para politisi kita seringkali melacurkan tanggung-jawabnya pada kepentingan yang terkooptasi oleh kekuasaan. Akhirnya, secara otomatis eksistensi politik dengan rakyat sebagai pemegang utama otoritas dari legitimasi sebuah kekuasaan. Perlahan, kehendak rakyat untuk sejahtera terus tersingkir akibat dari degresi para politisi dalam birokrasi kita.

Banyak para pengamat perpolitikan Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri, mengatakan bahwa citra politisi di republik ini terus beringsut

11 Dipublikasikan Bali Post 07 Mei 2012

pada titik terendah. Runtuhnya citra politisi ini disebabkan oleh semakin maraknya kasus korupsi yang terjadi dalam birokrasi pemerintahan, baik di eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Jika ditaksir, fenomena korupsi yang masif saat ini telah menyedot setidaknya 30 persen hingga 40 persen dana anggaran negara. Bayangkan saja, di semua institusi negara baik pusat dan daerah telah terjangkiti oleh penyakit kronis yang terus berkembang biak dalam pemerintahan-kekuasaan. Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri bila korupsi di Indonesia dianggap sebagai satu-satunya budaya terburuk politisi sepanjang sejarah kebangsaan Indonesia.

Paling tidak terdapat beberapa faktor yang membuat citra politisi terus terpuruk, yaitu semakin rendahnya etika politik, komitmen, akuntabilitas, profesionalitas, dan progresifitas para politisi atas masa depan rakyat. Sehingga, publik terus memposisikannya sebagai pekulat (baca: pencuri uang negara) yang terus bersembunyi di balik dasi dan kekuasaanya. Kondisi ini tentu saja membuat rakyat semakin muak terhadap para politisi, karena mereka seolah tidak tidak berfikir atas kesejahteraan rakyat.

Politisi dan korupsi

Fenomena politisi sebagai pekulat (pencuri uang negara), terlihat dari semakin maraknya perilaku elite pemerintah yang memanfaatkan jabatan mereka untuk memperkaya diri dan kelompoknya saja. Entah karena kesadaran naif mereka atas hidup di era yang demokratis seperti ini, yang menganggap "duduk sebagai anggota DPR hanya sekali karena setiap lima tahun akan berganti". Sehingga, kesempatan menjadi birokrat dipergunakan hanya untuk memiskinkan negara dan rakyat. Apalagi ditambah dengan biaya politik yang mereka pakai untuk menjadi elite pemerintah atau pejabat publik belum terbayar. Tidak heran, bila mereka kerapkali menjadikan label birokratisnya (politisi) sebagai kambing hitam untuk terus menguras uang negara.

Menurut Marcur Olson, dalam *Power dan Prosperty* (2000) fenomena wakil rakyat yang demikian dengan pertanyaan: kenapa setelah pemerintah yang buruk, kemakmuran semakin jauh untuk terwujud?

Olson menerangkan bahwa, fenomena ini terjadi karena pemerintahan dalam tatanegara sudah dilingkari oleh para pekulat yang terus berkeliaran (*roving bandits*) dan bandit menetap (*stationary bandits*). Keduanya sama-sama jahat, tapi kejahatan mereka memiliki pola kerja yang berbeda. Orde Baru, merupakan salah satu contoh pereodik politisi pekulat menetap, karena mereka berkuasa dengan penuh pengaruh yang begitu kuat. Mampu membuat semua orang bergantung padanya, membuat semua orang tenang, nyaman, dan merasa makmur. Namun di balik kemurahan itu, ia menggunakan legitimasi kekuasaanya untuk memperkaya diri, keluarga, dan para kroninya.

Mereka kuras uang negara sebanyak mungkin tanpa peduli pada kepentingan rakyat, mengelolanya, dan mengembangkannya untuk kepentingan pemilu ke depan. Dengan orientasinya, hanya untuk membangun komunitas yang berpotensi besar untuk perolehan suara pada pemilu selanjutnya. Selagi mereka berkuasa, kesempatan tersebut akan mereka pergunakan semaksimal mungkin untuk menjarah uang negara. Dari sini, kita tahu bahwa gagasan para politisi tentang negara dan rakyat ke depan seperti dikampanyekan semasa pemilu, hanya sebatas imajinasi tanpa realisasi, karena kerap ditunggangi oleh hasrat untuk berkuasa tanpa kepentingan rakyat. Kondisi ini juga yang terus membuat sistem dan tata kelola pemerintahan di Indonesia berjalan pincang. Di mana, kemiskinan, kesehatan, infrastruktur, dan yang bersinggungan dengan kepentingan umum lainnya tidak diprioritaskan.

Politisi Kerakyatan

Indonesia membutuhkan politisi atau pemimpin yang asketis, yaitu ingkar terhadap kepentingan diri sendiri (*self denial*), dengan menolak segala bentuk penghianatan terhadap kepentingan negara dan rakyat. Serta, menunda segala bentuk kesenangan jangka pendek yang hanya akan membunuh kredibilitas kepribadiannya.

Seorang politisi harus belajar dari filosofi lilin, bukan lentera. Sebab, lilin menyinari gelap dengan membakar diri demi sebuah cahaya terang

tanpa membuat penikmat cahaya harus mengimbuhinya (subsidi). Sementara lentera, hanya akan memberi cahaya bila sang penikmat terang dalam kegelapan mengimbuhinya minyak tanah tiap kali apinya mati. Dengan kata lain, politisi yang mau berjuang mengabdikan dirinya untuk kepentingan rakyat daripada kepentingan diri sendiri dan golongan. Kelak, merekalah yang akan tampil menjadi negarawan-negarawan yang selalu siap untuk rakyatnya. Sebab, modal kepemimpinan mereka adalah pengabdian kepada rakyat bukan mengabdi untuk disubsidi hanya demi mempertambun perut pribadi.

Tipikal politisi demikian yang dibutuhkan rakyat hari ini, untuk menjaga esensi dari politik itu sendiri dengan sikap etis dalam politik, akuntabel, profesional, dan progresif. Dengan menjadikan politik hanya sebagai alat untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran rakyat, sekaligus kekuasaan digunakan hanya untuk menciptakan stabilitas nasional.

Keteladanan, keteguhan, pemikiran, watak, dan sikap, adalah hal utama yang harus dimiliki oleh para politisi saat ini agar politisi asketis seperti di atas dapat terwujud di negeri ini sebagai pemimpin yang ideal. Dengan demikian, semoga permasalahan yang sedang menimpa beberapa para politisi yang duduk di birokrasi, serta persoalan kebangsaaan hari ini dapat segera diselesaikan. Supaya bangsa kita mampu menunjukan perubahan dan prestasinya di mata dunia.

Ironi Budaya Politik Kita[12]

Oleh: Habibullah

Benarkah budaya politik nasional kita, telah terperosok dalam dekapan kapitalis birokrat yang lahir dari rahim-rahim pragmatisme tanpa idealisme asketis?. Pertanyaan demikian sungguh sangat menakutkan yang tak perlu dijawab lagi melihat dari wajah perpolitikan dewasa ini. Yang di akui atau tidak, telah membuat publik miris dalam berfikir atas masa depan republik ini dan mengelus dada atas keberlangsungannya yang terbukti kian mengkhawatirkan di tangan para politisi di pemerintahan dalam beberapa dekade terakhir.

Negara dan demokrasi di Indonesia, bagi para politisi seakan tak ubahnya sebuah gunung yang menyimpan berkantong-kantong harta *karun*. Jadi, tidak heran bila mereka berbondong-bondong dan berebutan untuk masuk kedalam gubangan-gubangan yang tak pernah tertutup sejak dari para pendahulu (politisi/birokrat) sebelumnya. Di mana program kerja, janji, dan gagasan yang diucapkan oleh para politisi ketika hendak menjadi wakil rakyat selalu saja ingkar setelah duduk di birokrasi pemerintahan. Semua yang digembar-gemborkan dalam kampanye menjadi kata tanpa

12 Dipublikasikan Media Indonesia 05 Juni 2012

laku (tindakan), bahkan orientasi kebijakannya pun selalu saja berbeda jauh dengan apa yang telah di idealkan. Sehingga kebenaran sejarah yang mengatakan bahwa, pemerintah Indonesia sejak dari merdeka sampai sekarang, tidak pernah mempunyai solidaritas tunggal terhadap sosial politik atas apa yang dituntut oleh definisi tugas dan fungsinya. Tak terbantah lagi.

Dengan demikian, tidak bisa dipungkiri bila keberadaan politisi dalam struktur pemerintahan dewasa ini, cenderung selalu menempatkan diri berada lebih di atas dari masyarakat. Serta sering merasa lebih penting menjadi abdi negara dan kekuasaan dari pada menjadi pelayan atau abdi rakyat. Akhirnya posisi birokrasi acap kali tidak membumi, alias jauh dan menjauh dari realitas keseharian masyarakat. Hal inilah, yang diakui atau tidak, bagian paling nampak yang telah membuat praktik birokrasi hanya melahirkan kesewenangan, elitisme, apatisme, dan anti kerakyatan.

Politisi Kabir

Pengasingan nilai moral, etika, dan asketisisme dalam ranah perpolitikikan dan kekuasaan dewasa ini, telah melahirkan banyak politisi kapitalis birokrat (kabir) di republik ini. Etika yang seharusnya menjadi batasan dari oprasionalisasi moral untuk menumbuhkan jiwa asketik bagi politisi dalam ranah birokrat dan kekuasaan, atas kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Malah sebaliknya, para politisi di struktur pemerintahan justru menjadikan ranah perpolitikan dalam birokrasi dan kekuasaan dikooptasi dengan budaya kapitalisasi yang membabi buta terhadap kekayaan negara dan kepentingan rakyat.

Maraknya sikap demikian dari para politisi di struktur birokrasi pemerintahan hari ini, kebanyakan di karenakan oleh prinsip yang mereka jalankan. Yang mana, mereka lebih mendahulukan kepentingan syahwat politik untuk memenuhi urusan perut, dari pada menuntaskan terlebih dulu urusan perut untuk selanjutnya berpolitik. Oleh karenanya, tidak bisa dipungkiri bila dalam struktur birokrasi pemerintahan selalu tidak

lepas dari skandal korupsi, pelacuran politik, jilat menjilat. Serta, sengketa penyelamatan atas keterlibatan diri dalam jerat hukum melalui kekuatan politik dan kekuasaan. Padahal, politik dan kekuasaan pada tarap tertentu, idealnya adalah merupakan peralatan paling berharga untuk mewujudkan suatu cita-cita yang didambakan dari kehidupan sebuah bangsa dan negara.

Namun ironisnya, hal tersebut oleh para politisi ketika sudah menjabat di struktur birokrasi pemerintahan, politik dan kekuasaan justru hanya dijadikan lahan untuk mewujudkan kepentingan pribadi, kelompok, dan ideologi (partai) semata. Akhirnya, kesempatan untuk mewujudkan kepentingan rakyat selaku pemberi kekuasaan yang telah mengantarkannya pada struktur birokrasi pemerintahan. Justru, malah dijadikan sebagai bomerang oleh para penerima kekuasaan (politisi/birokrat) untuk menyengsarakan rakyat.

Hal demikian, diperparah lagi dengan paradigma politisi dan birokrat pemerintahan yang cenderung feodal dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai penerima kekuasaan dari sang pemberi kekuasaan. Di mana, jabatan publik masih saja dianggap sebagai sarana kapitalisasi birokrasi untuk menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk proses selanjutnya. Serta, belum mampu menjadikan politik, birokrasi, negara, dan kekuasaan sebagai tempat mengabdikan diri kepada rakyat, dengan mengenyampingkan kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan demi seluruh kepentingan rakyat.

Politisi Platonik

Tercerabutnya keniscayaan politik dari esensinya, bukan semata karena kurangnya strategi kebudayaan politik kerakyatan, serta konsep sosial politik kemasyarakatan yang efektif dan berpuncak pada kepentingan umum. Akan tetapi, kurangnya memiliki tokoh-tokoh yang mampu melakukan kerja politik yang sekaligus menguasai medan politiknya masing-masing. Serta, tidak adanya politisi Platonik

yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah, kejiwaan yang bebas dari nafsu.

Kita harus mengamini, bahwa selama ini yang bergerak menggeluti bidang birokrasi dan kekuasaan yang mengatasnamakan dirinya sebagai politisi. Kebanyakan, mereka adalah politikus-politikus polesan atau musiman yang bisa dikatakan belum mampu masuk dan menjiwai dalam fungsi dari kepolitisannya untuk ditransformasikan. Akhirnya, tidak heran bila birokrasi tak ubahnya dengan sarang dari jiwa-jiwa yang diperbudak oleh nafsu pribadi yang belum tuntas. Seperti nafsu memperkaya diri, nafsu politik oportunis, serta nafsu serakah yang melahap habis kepentingan umum demi kepentingan pribadi.

Seharusnya para politisi menyadari, bahwa mereka dengan diangkat menjadi pemimpin dan wakil rakyat berarti mereka sudah menerima suatu tanggungjawab. Maka dari itu, sudah selayaknya para politisi dalam struktur birokrasi pemerintahan mempertanggungjawabkan kepada rakyat, bukan kepada kekuasaan dan kepentingan indevidu, kelompok, apalagi golongan semata. Karena, politisi yang sudah berafiliasi sebagai pemimpin dalam birokrasi pemerintahan dan kekuasaan adalah tulang punggung dari seluruh harapan rakyat untuk mewujudkan cita-cita dasar dari keberadaannya dalam sebuah negara.

Maka dari itu, apa yang selama ini telah terjadi di ranah perpolitikan kita dalam birokrasi pemerintahan, seperti kuatnya komitmen politisi dalam pernyataan tapi nihil dalam tindakan. Mulai sekarang, para politisi harus berfikir jernih untuk mengembalikan kewibawaan politik nasional untuk selanjutnya melahirkan budaya politik yang lebih menjunjung tinggi etika, moralitas, dan kerakyatan. Sebelum rakyat bosan dan berhenti untuk berfikir jernih dan terlibat dalam urusan negara seperti dalam pelaksaan pemilu untuk masa depan Indonesia. Karena jika tidak, maka keberadaan budaya politik nasional kita, selamanya ibarat orang yang berdiri terendam dalam air sampai keleher, sehingga ombak yang kecil sekalipun sudah cukup menenggelamkannya (Scott, 1985).

Dusta Penggembala Demokrasi[13]

Oleh: Habibullah

Yang selalu membuat negara jadi neraka di bumi ini,
adalah manusia yang justru ingin mengubahnya jadi surga baginya
(F. Hoelderlin).

Jika para politisi di Indonesia menghayati pernyataan di atas, yang menurut hemat penulis sungguh sangatlah sufis. Sekaligus, sangatlah tajam sebagai pisau peringatan bagi seluruh para politisi di negara ini. *Wabilkhusus*, bagi para politisi yang tak henti-hentinya menganggap birokrasi negara sebagai tanah yang menyimpan berkantong-kantong harta karun. Baik, bagi politisi yang sedang menjabat ataupun yang sedang berjuang untuk menjabat sebagai wakil rakyat. Maka dari itu, saya kira tindakan itu sangatlah bijak dari seorang politisi untuk tidak menjadikan negara sebagai neraka bagi rakyatnya dan tidak menjadikan surga bagi dirinya sendiri.

13 Dipublikasikan Bali Post 20 November 2012

Kita sama-sama mengamini, bahwa wajah perpolitikan kita saat ini semakin sesak dengan banyaknya para politisi yang menjadi pekulat (koruptor), hanya untuk mencapai tujuan dirinya sendiri dengan mengabaikan tujuan rakyat. Lihat saja, setelah beberapa waktu lalu sempat digemparkan dengan mencuatnya data yang mengindikasikan adanya 2000 rekening gendut mencurigakan.

Kini, beberapa politisi kita kembali menjadi sorotan publik dengan pengakuan yang entah benar atau tidak dari Menteri BUMN, Dahlan Iskan, kepada Badan Kehormatan DPR. Dan, pelaporan dugaan praktik korupsi yang melibatkan tiga Kementerian Negara dengan Ketua Fraksi, serta anggota DPR dan Staf Ahli Fraksi yang dilaporkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Terlepas dari benar dan tidaknya. Yang jelas, pengakuan dan pelaporan tersebut menggambarkan betapa birokrasi kita memang sudah bobrok dan dan penuh dengan para penggembala demokrasi (politisi-birokrat) yang mengedepankan dusta.

Awal Dusta

Ketidakmampuan lembaga negara demokratis untuk melaksanakan apa yang tampak sebagai suatu mandat yang jelas dari rakyat, niscaya akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap pranata-pranata demokratis. Parlemen pun mulai dipandang sebagai "tempat berbicara saja" yang tak efektif, yang tak kompeten dalam melaksakan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka ketika mereka dipilih (Friedrich A. Hayek "Ancaman Kolektivisme" hal. 76-77)

Banyak penyebab awal dari lahirnya dusta para penggembal demokrasi kita, antara lain karena rekrutmen kader parpol yang cenderung mencari orang yang sudah kaya. Dengan harapan naifnya, yaitu agar bisa menopang pendanaan buat parpol. Serta, ditambah lagi dengan adanya ketidaktegasan dalam diri kepemimpinan elit parpol. *Wabilkhusus*, tidak adanya pula jiwa asketis dalam mengelola, membina, dan mendidik anggotanya. Sehingga, tidak mengherankan bila para kader parpolnya

yang menjadi wakil rakyat justru semakin menumbuh-suburkan korupsi di negara ini. Keterlibatan para politisi dan wakil rakyat, yang diakibatkan oleh ketidakefektifan kaderisasi dalam partai tersebut, yang membuat banyak wakil rakyat di pemerintahan terlibat dalam kasus korupsi.

Selain dari itu, yakni adalah maraknya politik uang dalam penentuan caleg merupakan pintu masuk bagi perilaku koruptif para wakil rakyat. Pungutan uang oleh elite partai terhadap para caleg akan melanggengkan praktek korupsi di parlemen. Karena caleg yang membeli nomor jadi, sudah hampir pasti berpikir bahwa biaya politik yang dikeluarkan itu harus kembali. Untuk itu, secara otomatis para penggembala demokrasi tersebut pasti akan melakukan segala cara dan upaya untuk mengembalikan uang yang telah mereka keluarkan terhadap partai politik. Pada saat inilah, menggali 'harta karun' dari kekayaan yang di miliki negara menjadi jalan pintas untuk mengembalikan uang mereka.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa perilaku korup sederet penggembala demokrasi memang sangat menodai citra lembaga-lembaga negara di mata rakyat. Apalagi, potret wajah wakil rakyat merupakan cerminan dari kualitas parpol sebagai lembaga yang menjalankan fungsi rekrutmen para calon dan pemimpin bangsa. Maka dari itu, tidak salah sekiranya bila kebanyakan orang mengaggap parpol sebagai institusi yang paling bertanggung jawab atas perilaku koruptif dan citra buruk yang menimpa lembaga negara.

Amputasi Korupsi

Jika praktik korupsi tidak segera dihentikan, maka lambat laun ia akan jadi budaya buruk birokrasi kita dalam penyelenggaraan kebijakan negara dan pemerintah. Yang mana, hal itu akan menyebabkan negara mengalami kebocoran anggaran yang akan terus membesar sekaligus akan menyebabkan negara ini terperosok pada kehancuran.

Menghentikannya tidak bisa hanya melalui surat edaran, tetapi harus secara nyata dengan tindakan. Juga tidak hanya oleh satu pihak, melainkan harus dilakukan oleh semua pihak yang memiliki tali-temali dengan

lahirnya praktik korupsi tersebut. Ada beberapa cara yang mungkin bisa menghentikan atau setidaknya mengurangi praktik korupsi.

Pertama, struktur-struktur negara, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus diisi dengan pejabat yang setidaknya mempunyai kepemimpinan yang asketis dan platonik. Dengan demikian, sedikit banyak tindakan korupsi di negara ini akan terkurangi. Karena bagi orang yang demikian, kekuasaan hanyalah alat untuk memberikan, bukan mendapatkan apapun dari hasil dan capaian-capaian yang mereka dapatkan.

Kedua, masyarakat harus mulai menyadari bahwa praktik politik pragmatisme telah terbukti merugikan mereka sendiri. Jika mereka memilih wakil atau pemimpin karena uang, yang akan tampil menjabat adalah mereka yang korup. Orang-orang yang mau menyuap bisa dikatakan pastilah juga orang-orang yang mau disuap.

Selain itu, juga dibutuhkan upaya-upaya lain seperti lewat pendidikan, agama, seni, dan budaya yang mengarah pada kejujuran dan anti terhadap korupsi. Pun juga, gerakan untuk memberantas korupsi dan para pekulat yang kebanyakan lahir dari parpol harus dengan strategi yang benar-benar kuat. Dengan demikian, budaya korupsi dan watak pekulat bisa dirubah dan dihilangkan hingga ke akar-akarnya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tingkat Harapan untuk DPR[14]

Oleh: Ahmad Maltup

Satu pekan sudah anggota DPR periode 2009-2014 dilantik. Tapi hingga kini, kita belum melihat tanda-tanda DPR baru membicarakan agenda negara yang sangat mendesak dan bersifat segera (Media Indonesia, 6/10/09). Mereka seakan bersikap ewuh pakewuh terhadap program kerja yang harus disegerakan tersebut. Padahal, gaji untuk bulan pertama sudah dicairkan dimuka. Secara terperinci, DPR baru mendapatkan Rp65,4 juta per bulannya di luar gaji ke-13, uang legislasi, uang rapat, uang transport, uang perjalanan dinas di dalam dan luar negeri, fasilitas kredit kendaraan, honor asisten dan tenaga ahli, serta fasilitas penunjang lainnya seperti laptop, internet, hotel bintang lima, dan kupon bebas tol. Sementara, untuk pelantikan pada 1 Oktober kemarin saja menelan biaya Rp 46 miliar.

14 Dipublikasikan Suara Merdeka, 09 Oktober 2009

Agenda yang sangat mendesak itu adalah menyangkut peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Alasannya, KPK dalam keadaan kegentingan yang memaksa karena tiga dari lima pimpinan KPK dinonaktifkan setelah diberi status tersangka oleh polisi. Maka melalui wakil rakyatlah akan ditentukan apakah situasi KPK sudah gawat dan karena itu perppu itu disetujui, atau sebaliknya, yakni kondisi masih bisa dikendalikan sehingga perppu tidak perlu dikeluarkan dan harus dicabut.

Kinerja wakil rakyat adalah tumpuan dari kehidupan politik. Apabila lembaga ini tidak memberdayakan dirinya, maka proses kesadaran politik rakyat akan terkikis dengan sendirinya. Sebab bagaimana pun, secara konstitusional, hanya lembaga legislatif yang dapat menjadi saluran aspirasi itu. Status sebagai wakil rakyat hanya akan menjadi simbol legitimasi bukan simbol aspirasi, apabila senyatanya lembaga legislatif tidak mampu mengakomodasikan kekuasaan rakyat dalam hubungannya dengan perlakuan kekuasaan lembaga eksekutif.

Sebuah kata pepatah politik kuno yang terkenal, suara rakyat adalah suara Tuhan. Pepatah ini menunjukkan betapa tingginya rakyat dalam konteks negara, terutama negara yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia. Karena kepemimpinan yang berakar pada rakyat itu bukan sekedar simbolisasi politik, tapi merupakan pemberdayaan. Kita tidak menginginkan partisipasi politik rakyat dalam hubungannya dengan kebijaksanaan pemerintah disalurkan dengan cara-cara yang tidak konstitusional, hanya karena rakyat menganggap para wakil mereka tidak mampu memperjuangkan aspirasinya. Lembaga legislatif bukanlah lembaga stempel, tapi merupakan lembaga kontrol atas kinerja eksekutif. Hak-hak serta wewenang anggota legislatif memungkinkan itu. Namun, apabila visi politik para wakil rakyat itu tidak berorientasi kepada rakyat, kita tidak dapat berharap banyak para wakil rakyat itu bisa menjadi tumpuan dari perjuangan aspirasi itu.

Budaya lama

Pada hari pertama DPR baru menjejaki kaki di gedung parlemen, yaitu pada rapat geladi bersih pelantikan, sudah tidak menunjukkan keseriusannya. Rapat yang disesaki oleh 560 anggota Dewan tersebut masih mengulang kembali budaya jelek DPR terdahulu, yaitu sibuk sendiri di dalam ruangan, bahkan ada yang tertidur saat rapat masih berlangsung. Ironisnya, semangat anggota DPR baru sepertinya setali tiga uang dengan semangat DPR lama, karena belum selesai rapat sudah banyak dari mereka yang meninggalkan ruangan.

Walapun dengan segala kesamaan tersebut, diharapkan DPR baru lebih inovatif dalam hal kinerja. DPR periode ini tidak boleh mengulang kesalahan DPR periode sebelumnya, terutama dalam masalah lambatnya memutus perppu Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Ada jarak waktu satu bulan sehingga keputusan DPR menolak perppu JPSK menjadi tidak berguna karena faktanya perppu itu sudah dipakai untuk menyelamatkan Bank Century. Akibatnya sangat fatal, yakni penyelamatan Bank Century mengandung cacat bawaan yang berpotensi besar merugikan negara.

DPR yang baru dilantik jangan sampai membuat negara celaka karena merestui kriminalisasi pimpinan KPK dengan bersikap pura-pura tidak tahu. Ujian pertama mereka adalah mampukah DPR memutuskan secara cepat dan cermat perppu penunjukan pimpinan sementara KPK. Karena rakyat sudah terlalu lelah menanti keputusan yang hampir selalu terlambat.

Kualitas DPR baru lebih bersinergi dari pada DPR lama. Fakta menunjukkan, sosok baru anggota DPR yang dihasilkan dari pemilu kali ini memiliki potensi kualitas yang relatif lebih baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Kesimpulan demikian merupakan salah satu hasil kajian terhadap berbagai aspek identitas dari 560 calon anggota legislatif yang dinyatakan memenuhi syarat manjadi anggota DPR priode 2009-2014.

Terdapat tiga aspek yang membedakan sosok anggota DPR saat ini apabila dibandingkan dengan anggota legislatif priode sebelumnya.

Pertama, dari segi pendidikan, sosok yang muncul kali ini menampilkan potensi kualitas pendidikan yang lebih tinggi. Tidak kurang dari 90 persen anggota DPR kali ini merupakan lulusan perguruan tinggi. Jika dirinci, dari keseluruhan anggota DPR, separuh bagian merupakan tamatan program strata satu. Bahkan, tercatat sebesar 41 persen tamatan pascasarjana, baik jenjang magister maupun doktoral.

Kedua, dari sisi usia, sosok anggota DPR kali ini relatif lebih muda. Tidak hanya itu, bagian terbesar bertumpu pada usia yang tergolong sangat produktif. Hal ini, juga bisa menggeser sedikit wacana politik komoditas yang dilakukan generasi tua terhadap generasi muda politik kita. Pemuda akan menjadi terwakilkan di parlemen, yang selama ini hanya diperlakukan sebagai objek, bukan subjek yang menentukan arah kebijakan.

Ketiga, dari sisi pekerjaan yang mereka geluti sebelumnya pun menunjukkan beberapa keistimewaan. Bagian terbesar dari kalangan anggota DPR kali ini merupakan wajah baru berlatar belakang pekerjaan di sektor swasta, seperti kalangan profesi, wiraswasta, hingga karyawan swasta, yang beberapa hal kerap diidentikkan dengan kalangan independen dari penguasaan pemerintah. Dan sepertiga terpilih merupakan kalangan yang sudah berpengalaman menjadi anggota legislatif di tingkat DPR, DPRD, maupun sebagai anggota DPD. Maka tidak pantas, bila kinerja DPR baru lebih jelek dibandingkan DPR terdahulu, yang SDM-nya dibawahnya.

Wibawa DPR dan Gedung Baru[15]

Oleh: Ahmad Maltup

Kepercayaan masyarakat terhadap DPR saat ini rendah. Lembaga ini pun kehilangan wibawa. Berbagai gagasan yang muncul dari wakil rakyat dinilai negatif, bahkan ditolak. (Kompas, 5/4/2011)

Pada tahun 2005, rencana perbaikan pagar DPR senilai 2,1 miliar dikritik banyak pihak, apalagi pada saat yang sama terjadi musibah kelaparan di Kabupaten Yahukimo, Papua. Tahun 2010, DPR tidak mendapatkan dukungan masyarakat ketika memberikan rekomendasi dalam penyelesaian kasus Bank Century; masyarakat menolak usulan pemberian dana aspirasi Rp 15 miliar per tahun untuk setiap anggota DPR; dan ditentang banyak pihak dalam rencana pembentukan rumah aspirasi DPR di daerah senilai 209 miliar.

Reputasi DPR semakin menurun ketika memunculkan gagasan lagi dengan rencana pembangunan gedung baru. Gedung DPR sekarang dianggap sempit karena ruang kerjanya hanya berukuran 20 meter

15 Dipublikasikan Bali Post, Senin 09 April 2011

persegi, dan yang dianggap ideal ruang kerja seluas 111,1 meter persegi. Rencananya, gedung baru yang dianggarkan 1,1 triliun ini akan ditambahkan pusat legislasi, pusat kajian anggaran, hingga penambahan tenaga ahli untuk setiap anggota DPR lima orang. Namun, gagasan ini ditolak karena dianggap menghambur-hamburkan uang rakyat dan dicurigai akan dijadikan ladang korupsi baru bagi DPR.

Sikap Ketua DPR

Wibawa DPR semakin rendah di mata masyarakat karena ulah Ketua DPR Marzuki Alie. Marzuki menodai aspirasi rakyat dengan melontarkan pernyataan kontroversialnya; "Rakyat biasa jangan diajak membahas pembangunan gedung baru, hanya orang-orang elite, orang-orang pintar yang bisa diajak membicarakan masalah itu". (Kompas, 1/4/2011)

Sungguh ironis pernyataan itu keluar dari mulut seorang Marzuki yang "elite" ketika menanggapi penolakan rakyat, terkait pembangunan gedung DPR baru. Karena paradoks sekali dengan pasal 71 huruf s Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menegaskan bahwa, tugas DPR adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Ketika aspirasi rakyat mengatakan tidak perlu, sepatutnya kebijakan tersebut dipertimbangkan.

Penulis mensinyalir Marzuki bicara seperti itu lantaran penolakan bertubi-tubi rakyat terhadap berbagai kebijakan dan gagasan yang dikeluarkan oleh DPR, seperti yang telah dipaparkan di atas. Maka seyogyanya, rakyat menolak semua kebijakan itu yang dianggap menghambur-hamburkan uang rakyat, sedangkan kinerja belum apa-apa. Rakyat merasa berada pada posisi tertindas seperti yang digambarkan oleh Aloys Budi Purnomo; "...di mana pemegang kekuasaan, rakyat tak lebih dari sebatang tebu yang habis manis sepah dibuang. Janji tinggal janji, tanpa realisasi." (Epilog buku Rakyat Bukan Tumbal Kekerasan dan Kekuasaan;2007)

Jati Diri Wakil Rakyat

Kinerja wakil rakyat adalah tumpuan dari kehidupan politik. Apabila lembaga ini tidak memberdayakan jati dirinya, maka proses kesadaran politik rakyat akan terkikis dengan sendirinya. Sebab bagaimanapun, secara konstitusional, hanya lembaga legislatif yang dapat menjadi saluran aspirasi itu. Status sebagai wakil rakyat hanya akan menjadi simbol legitimasi bukan simbol aspirasi, apabila senyatanya lembaga legislatif tidak mampu mengakomodasikan kekuasaan rakyat dalam hubungannya dengan perlakuan kekuasaan lembaga eksekutif.

Kepemimpinan yang berakar pada rakyat itu bukan sekedar simbolisasi politik, tapi merupakan pemberdayaan. Rakyat tidak menginginkan partisipasi politik rakyat dalam hubungannya dengan kebijaksanaan pemerintah disalurkan dengan cara-cara yang tidak konstitusional, hanya karena rakyat menganggap para wakil mereka tidak mampu memperjuangkan aspirasinya. Lembaga legislatif bukanlah lembaga stempel, tapi merupakan lembaga kontrol atas kinerja eksekutif. Hak-hak serta wewenang anggota legislatif memungkinkan itu. Namun, apabila visi politik para wakil rakyat itu tidak berorientasi kepada rakyat, rakyat tidak dapat berharap banyak para wakilnya itu bisa menjadi tumpuan dari perjuangan aspirasi.

Di dalam perkembangan kedewasaan politik rakyat sekarang ini, apabila tidak diimbangi oleh kualitas kinerja wakil rakyat, maka ritualisme politik yang selama ini mendapat sorotan itu akan tetap ada. Kecenderungan 5D –datang , duduk, dengar, diam dan duit- masih mengakar dalam kejiwaan anggota DPR. Kualitas, visi serta kemampuan memperjuangkan kepentingan rakyat itu, adalah beban yang tidak ringan. Tapi untuk itulah sebenarnya para wakil rakyat memperebutkan kursi, dan untuk itu pula rakyat memberikan suaranya.

Terkait dengan pembangunan gedung baru, tahun 2010 ada pernyataan rencana pembangunan gedung itu ditunda setelah ada kritik dari rakyat. Namun, kenapa rencana tersebut kembali diteruskan pada tahun 2011 setelah kritik mereda? Apakah ini tidak menampakkan ambisi

DPR untuk menikmati fasilitas mewah tersebut sebelum masa jabatannya usai pada 2014 nanti? Tidak menutup kemungkinan, karena yang kita lihat kinerja DPR saat ini amat memprihatinkan. Dari 70 rancangan undang-undang yang masuk Program Legislasi Nasional 2010, hanya delapan buah yang dapat disahkan menjadi undang-undang.

Anggaran 1,1 triliun untuk gedung baru tidak mencerminkan ekonomis di negara berkembang seperti Indonesia. Prinsip keadilan dan kepatutan anggaran sebesar itu tidak relevan ketika dihadapkan dengan mayoritas rakyat yang masih dilanda kemiskinan akut, pengangguran, dan kekurangan pangan. Hal itu perlu diprioritaskan dari pada gedung baru, karena tidak ada jaminan "adanya gedung baru kinerja DPR semakin membaik". Seharusnya, kinerja ditingkatkan terlebih dahulu, kemudian gedung baru untuk mendukung kinerja.

BAB II

EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

CAFTA vs Industri dalam Negeri[1]

Oleh: Romel Masykuri

Hiruk-pikuk konflik politik dalam pemerintahan Indonesia terus berlanjut menyusul mencuatnya kasus Bank Century, kisruh soal keberadaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan ihwal masalah penegakan hukum yang dinilai masih memprihatinkan. Kini tantangan terhadap perekonomean masyarakat industri Indonesia menghadang di depan mata dan kembali menjadi bahan perdebatan di media. Dimulainya penerapan perdagangan bebas China-ASEAN (CAFTA) mulai awal Januari 2010 boleh jadi merupakan babak baru bagi ancaman laju perekonomean industri dalam negeri.

CAFTA merupakan kebijakan nasional dalam rangka hubungan bilateral dengan negara lain. Semangat yang dituangkan sebagai bagian dari konsekuensi kebijakan pasar bebas adalah untuk memacu persaingan dan pengembangan industri dalam negeri dengan negara lain.

1 Dipublikasikan Suara Karya, Edisi 27 Januari 2010

Membaca pesan tersebut cukup bijak. Tetapi, relevankah dengan konteks perekonomian ke-Indonesiaan?

Dalam perjalanannya, perjanjian CEPT AFTA sebenarnya sudah dimulai pada 1992 dengan ASEAN FTA, serta berlangsung dengan pembentukan ASEAN Economic Community pada 2003 untuk direalisasikan pada 2015. Pada 2002 disepakati perjanjian komprehensif kerja sama ekonomi ASEAN-China yang menjadi basis negosiasi ASEAN-China AFTA yang dilaksanakan pada 2004. Namun, akhirnya perjanjian CAFTA terealisasi pada tahun 2010. Dalam perdagangan bebas ini pemerintah membentuk tim khusus beranggotakan lintas departemen dan wakil dari dunia usaha untuk mengantisipasi *injury industry* dalam negri. Hal ini cukup berbeda dengan realitas yang terjadi saat ini.

Setelah diterapkan pasar bebas, maka biaya masuk adalah 0,0 persen. Sebelumnya produk China masuk ke Indonesia hanya lima persen, tapi harga jual produk China relatif jauh lebih murah ketimbang produk dalam negeri. Apalagi setelah perdagangan bebas ini berlangsung, besar kemungkinan harga penjualan barang-barang made in China yang murah meriah lambat laun akan menggeser produk dalam negeri. Tentu hal ini memerlukan sikap serius dari pemerintah untuk menanganinya. Sebab, bagaimanapun, hal itu berpotensi mengancam keberlangsungan perekonomian masyarakat industri dalam negri.

Sejak akhir 2009, para perajin sepatu Mojokerto sudah merasakan penurunan pemesanan dari grosir langganan. Menginjak tahun 2010, pesanan pun dilaporkan sepi karena tersaingi oleh produk asal China (Liputan 6 SCTV, 11 Januari 2010). Inilah cermin dari kehawatiran masyarakat. Tentu saja hal ini merupakan pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah karena keputusan yang diambil semula didasarkan pada demi kemajuan perekonomian bangsa. Permasalahannya, bagaimana kalau dampaknya belakangan justru berpotensi merugikan perekonomian nasional?.

Melihat kondisi pendapatan masyarakat, tentu merupakan kegembiraan tersendiri dengan adanya produk murah asal China. Masyarakat dengan mudah bisa membeli barang-barang murah sesuai

kemampuan kantong masyarakat ketimbang produk buatan dalam negeri yang relatif lebih mahal. Yang jelas, hal ini merupakan konsekuensi alami mengingat kondisi sulit yang dialami warga masyarakat. Barang-barang murah akan laku di pasaran meski mungkin kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Apalagi, jika menilik kondisi laju pertumbuhan perekonomian nasional. Dilihat dari indeks produksi industri sedang dan besar pada tiga triwulan pertama tahun 2008, misalnya, hampir semua sektor dalam industri manufaktur di Indonesia menurun. Hanya empat sektor yang menguat, yakni industri makanan dan minuman, industri pengolahan tembakau, industri barang dari kulit dan alas kaki, serta industri furnitur dan pengolahan lainnya (BPS, 2009).

Dari situ kita dapat membaca bahwa perekonomian nasional, khususnya dalam sektor industri, masih labil dan memerlukan sikap keseriusan pemerintah untuk memacunya secara lebih serius lagi. Di tengah persaingan pasar bebas industri dunia, tanpa tindakan konkret pemerintah untuk menanganinya dalam bentuk proteksi, maka lambat laun industri dalam negeri akan bangkrut. Sebenarnya kekhawatiran akan dampak negatif perdagangan bebas sudah diperdebatkan oleh para pakar ekonomi. Perguruan-perguruan tinggi sendiri beberapa kali sudah mengadakan seminar mengenai efek dari pasar bebas. Sayang, hal itu dilakukan hanya sebatas sebagai wacana diskusi semata, tanpa adanya realisasi tindak lanjut semestinya dari pemerintah.

Mengingat kebijakan CAFTA merupakan bagian dari kebijakan perekonomian nasional, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah. Salah satunya, peraturan mengenai standar barang dan perlindungan konsumen harus dijalankan secara benar. Ini penting sebagai bagian dari kebijakan perlindungan terhadap perindustrian dalam negeri. Tim dari Departemen Perindustrian, yang merupakan tim multidisiplin dan terdiri dari pakar dan wakil Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia), harus berupaya maksimal untuk lebih mempertajam arah dan prioritas industri yang perlu dikembangkan. Ini karena pengembangan industri

yang dilakukan pemerintah belakangan terkesan tidak jelas arah dan gambarannya.

Dari catatan statistik, tahun 2008 industri yang berkembang di dalam negeri sudah menyerap tenaga kerja hingga 70%. Ini membuktikan bahwa sektor industri mampu memberikan terobosan dalam upaya lebih memberdayakan masyarakat serta mengatasi masalah kemiskinan.

Akhirnya, perlu disadari bahwa dampak perdagangan bebas, kalau tidak ditangani secara serius oleh instansi terkait, akan berpotensi mematikan industri dalam negeri. Dampak lebih jauh, sangat mungkin hal itu akan memicu terjadinya PHK (pemutusan hubungan kerja) dan menambah jumlah penganggur akibat industri dalam negeri banyak yang mengalami kolaps. Bagaimanapun, produk dalam negeri tak akan mampu menyaingi membanjirnya produk massal buatan China yang murah meriah.

Oleh sebab itu, kebijakan CAFTA rasanya memang perlu dikaji ulang oleh pemerintah supaya dampaknya tidak mengancam keselamatan industri dalam negeri. Harapan besar tergantung pada pemerintah demi eksistensi produk dalam negeri pada masa depan. Dalam upaya meningkatkan perekonomian bangsa, kebijakan-kebijakan perlu diarahkan pada perbaikan ekonomi rakyat. Ini penting agar terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sentosa benar-benar bisa direalisasikan.

Menjawab Tantangan Ekonomi Global[2]

Oleh: Muhammad Arif

Dewasa ini kegiatan ekonomi global semakin meningkat seiring dengan cepatnya laju perkembangan teknologi. Persaingan di lingkungan usaha pun berlangsung dengan ketat dan cepat. Cepatnya laju perkembangan teknologi telah membuat fasilitas produksi cepat usang, masa edar produk menjadi semakin singkat, dan margin keuntungan pun semakin rendah.

Realitas itulah yang saat ini harus dihadapi oleh para pelaku usaha atau industri domestik kita. Mau tidak mau mereka harus mampu bersaing di tengah derasnya arus ekonomi global dan mampu segera menyesuaikan diri dengan dinamika teknologi (masyarakat) yang begitu cepat. Padahal dunia industri domestik kita masih sarat dengan cacat di sana-sini, mulai dari ketidakmerataan kemampuan ekonomi antar daerah, biaya produksi sangat tinggi, terbatasnya sumber daya manusia yang mempuni, sedikitnya industri yang berteknologi mutakhir, penyelundupan, serta

2 Dipublikasikan Seputar Indonesia, Rabu, 20 Juli 2011

lemahnya pelayanan birokrasi kita. Lantas bagaimana harus bersaing dengan para pelaku industri global?

Mengingat Indonesia adalah negeri yang menganut ideologi ekonomi Pancasila, maka tentunya peran atau uluran tangan pemerintah adalah hal utama yang dibutuhkan untuk menumbuh-kembangkan industri dalam negeri. Jika pemerintah kemudian berubah sekedar menjadi "centeng" aktor-aktor ekonomi internasional dengan mengikuti arus neo-liberalisme tanpa filter, bagaimana negara dapat mempertanggungjawabkan sila kelima dari pancasila?

Perpres No 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang baru-baru ini dicanangkan oleh pemerintah kita rasanya sudah cukup bagus, tentunya jika Perpres tersebut tidak hanya berhenti di taraf wacana. Dan akan lebih bagus lagi, jika Perpres tersebut juga disertai dengan pembangunan infrastruktur daerah secara merata. Karena tidak dipungkiri, ketimpangan ekonomi antara daerah Jawa dan luar Jawa adalah akibat dari pembangunan yang kurang merata.

Selain ketimpangan antardaerah, indutri kita juga masih lamban bersanding dengan dinamika teknologi dunia, sehingga kita cenderung menjual bahan-bahan mentah dari pada barang jadi atau setengah jadi. Ini tentu tidak boleh didiamkan, karena kebanyakan bahan mentah kita tidak dapat diperbaharui. Jika kemudian bahan-bahan mentah kita habis, lantas apa yang dapat kita perbuat? Untuk itu, perlu ditumbuh-kembangkan industri-industri kreatif dan inovatif.

Dan lagi-lagi pemerintah di sini juga harus ikut andil. Pemerintah harus mendukung penuh industri kreatif dan inovatif tersebut dengan memberi insentif. Pemerintah juga harus meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan (R&D), teknologi dan desain di industri, dalam rangka membangun kemampuan bersaing jangka panjang. Dengan ini, industri domestik kita dapat berdiri tegak ditengah kencangnya arus ekonomi global.

Food Estate, Liberalisasi Kebijakan Pertanian[3]

Oleh: Fathor Rahmad MD

Tinggal menunggu waktu saja, para petani gurem kita akan meninggalkan sawah-sawahnya. Mereka akan "dipensiun" oleh kebijakan *food estate*. *Food estate* merupakan kebijakan pengembangan produksi tanaman pangan berskala luas. Yang implikasi sangat nyata, memberikan kesempatan bagi pihak perusahaan pangan untuk leluasa menguasai sektor pertanian.

Kalau selama ini produksi pertanian banyak berbasis rumah tangga *(family based agriculture)*, dengan adanya kebijakan *food estate* akan berubah menjadi berbasis perusahaan *(corporate based agriculture)*. Produksi pangan tidak lagi akan ditentukan oleh kerja produksi petani gurem. Tapi bergantung kepada hasil kerja produksi perusahaan pangan.

Kebijakan tersebut akan memberikan daya tarik tersendiri bagi kalangan investor, baik asing maupun domestik. Karena menurut analisis beberapa kalangan mensinyalir, kelesuan iklim investasi dunia dan

3 Dipublikasikan Kontan, 22 Januari 2010

pertimbangan kebutuhan pangan dunia yang semakin melambung dari waktu ke waktu, harga pangan akan terus meroket. Investasi produksi dan penguasaan pangan akan menjadi pilihan yang tepat bagi korporasi asing.

Jadi tidak mengherankan kalau kebijakan pemerintah tersebut kian mendapat simpati dari kalangan investor. Untuk saat ini, setidaknya telah ada enam perusahaan swasta nasional yang sudah siap menanamkan modalnya mengembangkan agribisnis di Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFE). Investor tersebut adalah Bangun Tjipta, Medco Grup, Comexindo Internasional, Digul Agro Lestari, Buana Agro Tama, dan Wolo Agro Makmur. Bahkan, investor asal Arab Saudi, dari kelompok usaha Binladen sempat menengok tanah Merauke.

Ketidakpercayaan

Bisa dipahami mengapa pemerintah tetap ngotot mengesahkan kebijakan *food estate* akhir bulan ini? Adalah untuk merealisasikan target swasembada pangan. Tapi mengapa harus *food estate*? Karena pemerintah menaruh ketidakpercayaan, bahwa masyarakat tidak akan mampu menghasilkan produksi pangan yang lebih baik dimasa depan. Sehingga harus mengambil kebijakan liberalisasi pertanian.

Sepertinya peristiwa krisis pangan yang berulang kali terjadi telah membuahkan refleksi kebijakan liberalisasi di sektor pertanian. Pemerintah mendorong perusahaan pangan untuk turun langsung mengelola produksi pertanian. Petani gurem dianggap tidak memiliki kompetisi untuk mengatasi lumpuhnya ketahanan pangan nasional.

Kalau memang demikian motivasi pemerintah, berarti analisis pemerintah perlu dipertanyakan. Karena selama ini peristiwa kegagalan panen tidak selalu berakar dari persoalan kompetisi petani. Melainkan dipengaruhi oleh ketidakmampuan pemerintah sendiri dalam menyediakan infrastruktur di sektor pertanian. Semisal peristiwa kekeringan yang selalu saja membayangi petani tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah.

Dari hasil riset Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air serta Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum terungkap, dari sebanyak 47 bendungan air yang ada di pulau Jawa, 13 diantaranya mengalami kerusakan berat. Sebagian besar kerusakan disebabkan oleh perawatan operasional bangunan yang kurang memadai dan tuanya usia bendungan.

Persoalan itu juga dikemukakan oleh Bustanul Arifin (2007), bahwa kualitas infrastruktur pertanian kita pasca otonomi daerah sangat mengalami penurunan. Padahal desain saluran irigasi dan minimnya dana operasional dan pemeliharaan (O & M = *Operation And Maintenance*) turut berkonstribusi terhadap buruknya hasil pertanian masyarakat. Akibatnya ketahanan pangan kita menjadi lumpuh.

Diakui atau tidak, kebijakan berbau liberalisme itu merupakan reaksi ketidakpercayaan pemerintah terhadap para petani. Seringkali berawal dari ketidakpercayaan, modus liberalisme bermula. Sikap semacam itu sudah kerap kali terjadi di sektor-sektor pengeloan sumber daya alam yang lain. Pemerintah lebih mempercayai pihak perusahaan swasta untuk mengelolahnya. Alasanya selalu karena profesionalitas mereka lebih bisa dipertaruhkan dan diharapkan.

Pola pikir kebijakan semacam itu sudah semestinya tidak lagi digunakan. Karena masyarakat akan cendrung menjadi korbannya. Bisa dibayangkan bagaimana nasib petani gurem ketika liberalisme di sektor pertanian ini berlangsung. Mereka akan tersudut dalam ketidakpastian kerja. Pengangguran akan terus bertambah, sedangkan meningkatnya jumlah masyarakat miskin adalah konsekwensi yang harus diterima.

Padahal kalau mau diakui, sektor pertanian merupakan lapangan pekerjaan alternatif yang banyak penampung korban pemutusan kerja. Ketika lapangan pekerjaan industri tidak mampu menampung pekerjanya, banyak para buruhnya yang memilih kembali turun ke sawah. Tapi kalau lahan pertanian sudah banyak dikuasai perusahaan pangan, masyarakat tidak akan lagi memiliki lapangan pekerjaan alternatif.

Sangat tidak bijak, kalau pemerintah tetap melegalkan *food estate* melalui peraturan pemerintah yang akan terbit akhir bulan ini. Karena di sisi lain kebijakan semacam itu justru tidak mendukung kemandirian ekonomi rakyat. Masyarakat akan banyak bergantung kepada daya serap lapangan pekerjaan pihak perusahaan. Mereka akan menjadi kaum buruh yang nasibnya ditentukan oleh perusahaan.

Menziarahi Kedaulatan Pangan Nusantara[4]

Oleh: M. Romandhon MK

Adakah tanah subur sesubur tanah Indonesia, khususnya Jawa? Adakah bangsa yang rakyatnya riang saat menyambut upacara perayaan panen tiba selain di Jawa? Adakah negara lain yang bisa mudah memetik dan mengambil sayur-mayur di ladang serta ikan-ikan di sungai yang begitu melimpah selain di negeri Indonesia? Adakah pepohonan di belahan dunia ini yang jumlahnya melebihi hutan kayu di negeri ini? Pohon jati di sulap menjadi penyangga rumah. Bambu diubah menjadi dinding rumah yang megah. Semua cerita kehidupan itu hanya ada di tanah Nusantara. Tanah yang begitu mashur di seantero jagad dengan sejuta kekayaan alam dan berjuta kearifan lokal. Namun masihkah cerita yang mampu melambungkan imajinasi anak cucu bangsa ini tentang kejayaan pangan membekas di bangsa ini?

Pasca kemelut politik di tingkatan raja-raja Islam Jawa dengan ditandai perjanjian Gianti tahun 1755 dan 1757, secara *gamblang* telah

4 Dipublikasikan Suara Merdeka, 31 Maret 2013

memupus cita-cita agung kerajaan Mataram Islam. Kondisi tersebut telah merenggut impian untuk membentuk satu kesatuan Jawa yang yang telah diusahakan oleh raja-raja Mataram Islam pertama. Seluruh wilayah Jawa Barat, seperti juga pesisir utara dan "ujung timur" Pulau Jawa telah dikuasai pasukan VOC. Namun siapa sangka, kegagalan bidang politik raja-raja Islam Jawa justru dibarengi dengan kesuksesan bidang ekonomi di daerah pedesaan. Tentu kabar tersebut membawa angin segar bagi kerajaan yang sedang dirundung duka.

Tercatat pada tahun 1755 Jawa mengalami suatu masa perdamaian yang akan merentang sampai 1825. Produksi pertanian bertambah banyak, dan kesejahteraan umum membaik. Selain itu dominasi Islam tampak pada tingkat sosial mengalami kemajuan pesat diberbagai kesultanan, dan itulah gejala terpenting pada abad ke-16, ke-17, dan ke-18. Inilah yang menurut hemat penulis, merupakan kesuksesan ekonomi pedesaan di tengah-tengah ketegangan dan kegagalan para raja-raja Jawa Islam di kancah politik. Namun bertepatan dengan berakhirnya era itu, berakhir pula cerita tentang kedaulatan pangan bangsa ini. Memasuki imperium kemerdekaan, Indonesia semakin gagap dalam mengahadapi kehidupan berbangsa. Kegagapan itu akhirnya membekas sampai sekarang. Era kemerdekaan 1945, yang memberikan harapan besar terkait cita-cita heroik menuju negara yang *gemah ripah loh jinawi* nyatanya tak kunjung datang.

Bahkan, neo-imperialisme dan neo-kolonialisme yang dikhawatirkan Bung Karno nampaknya sudah benar-benar menjadi kenyataan. Lahan-lahan sumber daya alam diambil alih orang non pribumi. Ekonomi tak mampu bersaing lantaran ketertinggalan kita dalam memutar otak, sehingga tak tahu kapan harus berjalan dan kapan musti berhenti. Aspek pangan tidak kalah memiriskan. Persedian pangan berada dititik nadir. Beras, buah-buahan, minyak, garam sampai bawang putih pun yang sekarang langka diperoleh dari hasil luar negeri. Ketergantungan terhadap satu jenis pangan dari negara asing menyebabkan segalanya menjadi buruk. Bahkan sulit dimengerti, mengapa urusan kecil seperti bawang,

Indonesia mesti mengimpor dari luar negeri? Bukankah Indonesia negeri agraris yang terkenal dengan hasil palawija dan sederet jenis tanaman bumbu lainnya?

Bangsa ini mesti menengok ke belakang, tahun 1755-1825 Nusantara khususnya Jawa mengalami masa-masa kesejahteraan dan peningkatan hasil produksi pertanian yang tidak tertandingi. Denys Lombard mengutip Rafles dalam buku *History of Java*, menjelaskan bahwa *"sedikit negeri yang rakyatnya bisa makan sebaik di Jawa. Jarang orang pribumi yang tidak dapat memperoleh satu kati beras yang dibutuhkan perhari. Nasi itu dimakan dengan ikan, sayur-sayuran, garam dan bumbu-bumbu lain."* Kondisi itu, seolah memberikan sinyal kepada dunia bahwa sangat mustahil jika bangsa Indonesia mengalami krisis pangan. Van Goens seorang penulis Sejarah Jawa merasa terkesan dan kagum melihat bentangan-bentangan sawah yang menghijau sepanjang perjalanannya di Plered, Bantul, Yogyakarta. Namun, nuansa *gemar ripah loh jinawi* yang dituturkan Vans Goens maupun Rafles rasanya hanya sebatas dongeng tempo dulu, tidak lebih.

Realitas Indonesia hari ini terjungkir balik, rakyat justru sulit untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Bersamaan itu pula, bagi seorang buruh misalnya, gaji 1 bulan kerja habis hanya untuk belanja dua kilogram bawang putih. Tentu hal ini tidak masuk akal, mengingat Indonesia disebut-sebut sebagai surganya dunia oleh banyak negara, tapi mengapa kini justru sedang mengalami krisis akan bumbu dapur? Lantas bagaimana dengan nasib slogan *gemah ripah loh jinawi* yang digembar-gembor sedari dulu? Tak lebih hanya menjadi obat penenang bagi jiwa-jiwa yang dilanda sekarat.

Itulah sebabnya, bangsa ini harus segera bangkit. Nusantara bukanlah bangsa yang disusun dari serpihan-serpihan sejarah kerdil. *The first we create our beliefs, consciusly or unconsciously, the our beliefs create us.* Modal awal adalah menciptkan kepercayaan dan optimisme yang kuat. Nusantara pernah memiliki catatan sejarah hebat, pernah menghasilkan maha karya luar biasa seperti Candi Prambanan dan Borobudur, serta

menjadi kawasan central perdagangan dunia. Rasanya kita perlu kembali untuk menziarahi peradaban Nusantara yang pernah di rintis para *ahlul bait* negeri ini.

BAB III

KEBUDAYAAN DAN SEJARAH

Merenungkan Ramalan Ronggowarsito[1]

Oleh: Juma Darmapoetra

Dalam khazanah intelektual Jawa, nama pujangga Raden Mas Ngabehi Ronggowarsito atau Bagus Burham merupakan nama yang sudah populer. Dia dikenal sebagai futurolog Jawa dengan "Serat Kalatida" dan "Jakalodhang" yang menggambarkan akan datangnya zaman edan (*amenangi zaman edan*). Ronggowarsito lahir dari kalangan bangsawan pada 14 Maret 1802 M- 24 Desember 1873 M, ayahnya seorang Carik Kadipaten bernama Raden Mas Pajangswara, ibunya Raden Ayu Pajangswara. Dia merupakan keturunan ke-9 Sultan Trenggono, Demak.

Sejak kecil dia sudah dikenal sebagai sosok yang cerdas dan pandai dalam bidang kesusastraan. Namun, kreatifitas dan bakatnya sebagai seorang pujangga atau sastrawan semakin terarah dan terasah dibawah bimbingan kakeknya, Raden Tumenggung Sastronegoro, seorang Pujangga Keraton Surakarta, keahlian itu semakin melambung ketika dia

1 Dipublikasikan Kompas, 14 Maret 2009

diangkat sebagai abdi dalem Keraton Surakarta oleh Pakubuwono IV, Carik Kadipaten Anom dan Panewu Carik dengan tugas utamanya membaca, menulis dan memperdalam ilmu kepujanggaan. Sehingga lahirlah karya "Jayengbaya". Karena kecerdasan dan keahliannya itu, Ronggowarsito disebut sebagai "ensiklopedis" dan pujangga multi talenta, orang yang luas pengetahuannya.

Tugasnya sebagai Carik keraton telah melahirkan karya yang bermutu tinggi sekaligus sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan (*humanisme*), sosial (*social*), keadilan (*justice*) baik yang menyangkut filsafat, ilmu kebatinan, primbon, kisah raja, sejarah, lakon wayang, dongeng, syair atau prosa, adat kesusilaan dan lain sebagainya. Namun, masyarakat Jawa dan Indonesia secara umum telah mengidentifikasikan dirinya sebagai sosok yang mampu memadukan ramalan yang penuh harapan, perenungan dan perjuangan dengan kesusastraan, sebagaimana yang terdiskripsikan dalam karyanya "Serat Kalatida" dan "Jakalodhang".

Zaman Edan

Karya Pujangga Ranggawarsita yang cukup monumental adalah "Serat Kalatida" dan "Jakalodhang" yang menggambarkan akan datangnya zaman edan. Sebuah keadaan yang penuh dengan kemunafikan dan kebohongan, kekacauan dan kebobrokan moral dan zaman yang penuh dengan anomali dan paradoks. Hal ini digambarkan dalam salah satu syair dalam "Serat Kalatida" yang artinya berbunyi; "*Mengalami zaman serba gila, sulit rumit dalam bertindak, ikut gila tak sampai hati, jika tak ikut larut tak bakal dapat rejeki, kelaparanlah akhirnya, namun sudah takdir Allah, semujur-mujurnya yang lupa, lebih bahagia bagi yang ingat (pada Tuhan) dan tetap waspada*".

Zaman edan ditandai dengan keadaan yang serba kacau dan paradoks. Orang banyak mendengungkan perdamaian, tetapi kerusuhan dan kerusakan yang dibuat, mengatakan harus melawan korupsi, tetapi menjadi koruptor handal, alih-alih memberantas kemiskinan, tetapi melakukan penggusuran dan menyengsarakan rakyat dan lain sebagainya.

Dalam zaman edan, ikatan kekeluargaan dan solidaritas tidak lagi menjadi bagian hidup dalam menciptakan kebersamaan. Spirit kolektivitas hidup meluntur seiring dengan menguatnya hasrat orang untuk berjuang demi dirinya sendiri. Egoisme manusia mengalahkan semua perasaan senasib dan seperjuangan.

Masalah kemiskinan semakin menggurita, pengangguran, kriminalitas, korupsi, kolusi dan nepotisme semakin banyak dan merajalela. Kekuatan politik telah meninabobokan masyarakat dengan obral janjinya. Peperang dan konflik semakin marak terjadi, baik suku, etnis, budaya dan agama. Pertarungan ideologi besar dunia semakin memanas dan lain sebagainya.

Realitas sosial dan politik yang sekarang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa kekacauan dan paradoksi keadaan makin marak terjadi. Angka kemiskinan tak kunjung menurun, angka korupsi semakin menanjak ditambah dengan panasnya iklim politik menjelang pemilihan umum 2009 pada Juli nanti. Manuver politik dari para politisi telah digunakan demi menarik masa. Mulai dari iklan politik sampai *money politics*. Berbagai macam cara telah digunakan tak peduli halal atau pun haram, yang penting hasrat berkuasa tersalurkan.

Bahkan panasnya iklim politik telah terasa sebelum gendrang demokrasi ditabuh. Banyak politisi telah melakukan manuver politik untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Mulai dari klaim keberhasilan sampai saling kritik sesama politisi dan mencela. Moral politik para politisi telah semakin rapuh. Politik sebagai sarana menyalurkan aspirasi rakyat menjadi sarana mengeruk keuntungan pribadi dengan menumpuk kekayaan. Negara berada diambang kehancuran, karena para politisinya telah menggerogoti – bagai rayap— dari segala sudut dan penjuru.

"Sekarang martabat negara, tampak telah sunyi-sepi, sebab rusak pelaksanaan peraturannya, karena tanpa tauladan orang meninggalkan kesopanan, para cendikiawan dan para ahli terbawa, hanyut ikut arus dalam jaman bimbang, bagaikan kehilangan tanda-tanda kehidupannya,

kesengsaraan dunia karena tergenang bagai halangan". salah satu bunyi syair Ronggowarsito dalam Serat Kalatida. (Kuntowijoyo; 2006)

Dalam konteks ini, ramalan Roggowarsito mengenai jaman edan akan menjadi cukup representatif untuk dijadikan sebagai bahan renungan dalam bersikap dan bertindak. Ronggowarsito meramalkan bahwa negara (Indonesia) baru memasuki jaman edan dan jaman kalatidha. Indonesia akan "*amenangi jaman edan*", "mengalami jaman edan". Dua jaman ini menandakan suasana yang penuh keraguan, was-was, dan chaos. Namun, jaman edan tidak akan berlangsung lama. Karena tidak lama akan muncul satria pinilih (new leader) akan membawa Indonesia memasuki jaman kerat (jaman kejayaan dan keemasan).

Dalam konteks perpolitikan Indonesia, munculnya jaman keemasan yang ditandai dengan datangnya satria pinilih akan sangat ditentukan oleh rakyat sendiri ketika pemilihan umum 2009 nanti. Karena kalau rakyat salah memilih pemimpin, maka ramalan datangnya satria pinilih hanya akan menjadi harapan yang tidak akan pernah tersampaikan dan ramalan akan datangnya jaman kerat (jaman keemasan) hanya merupakan igauan an sich. Bahkan kemungkinan terburuknya, jaman edan itu akan semakin melebar dan kekacauan atau *chaos* akan semakin subur berkembang di Indonesia.

Kebebasan dan perdamaian hanya akan menjadi wacana dan retorika yang menjadi obat tidur dan obat penenang masyarakat. Lalu dengan melihat visi-misi, *track record* para politisi saat ini, akankah satria pinilih yang akan datang pasca jaman edan akan teraplikasikan? Biarkanlah waktu dan keadaan yang akan membuktikan kebenaran ramalan itu. Tetapi kekacauan, kebobrokan moral, dan paradoks realitas menunjukkan bahwa jaman keemasan yang ditandai dengan munculnya satria pinilih memang sangat dinantikan bangsa yang semakin kacau dan rapuh.

Jihad 10 November 1945[2]

Oleh: Juma Darmapoetra

Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya merupakan peperangan terbesar setelah perang dunia II. Kedahsyatan pertempuran 10 November 1945 telah menjadikan Surabaya sebagai kota pahlawan yang dikenang sampai kini. Heroisme masyarakat Surabaya dalam menentang kolonialisme penjajah telah mampu mengimbangi kekuatan Inggris yang ditopang dengan persenjataan lengkap. Tidak salah, kalau David Wehl mengibaratkan Surabaya sebagai neraka bagi Inggris.

Kenapa pertempuran tersebut menjadi begitu dahsyat, mengakibatkan banyak korban jiwa dan diibaratkan seperti neraka? Kedahsyatan sebuah pertempuran atau perang tidak pernah lepas dari semangat dan jiwa dari pertempuran tersebut. Ada semangat, gairah dan motivasi yang menjadi inspirasi heroisme masyarakat Surabaya.

2 Dipublikasikan Radar Jogja, 9 November 2011

Heroisme masyarakat yang menjadi inspirasi adalah jihad dan nasionalisme. Keduanya menjadi elemen yang sangat vital dalam menggerakkan pertempuran tersebut. Semangat jihad, akan berkaitan dengan Resolusi Jihad NU tertanggal 22 Oktober 1945 yang menekankan adanya kewajiban mempertahankan kemerdekaan, dan kewajiban berperang terhadap tentara sekutu yang akan menduduki kembali Indonesia, Inggris.

Gairah nasionalisme berkaitan erat dengan kemerdekaan RI yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Kedatangan Inggris, membuka luka lama yang telah tertoreh sejak penjajahan Belanda. Rasa cinta terhadap bangsa dan negara yang baru merdeka menjadi inspirasi semangat masyarakat untuk berjuang sampai titik darah penghabisan demi eksistensi sebuah kemerdekaan.

Antara semangat jihad dan nasionalisme menyatu dalam diri pejuang Surabaya dalam menggetarkan gempuran pasukan Inggris. Semangat jihad yang digelorakan sejak 22 Oktober, mendapat siraman ketika Bung Tomo memekikkan kalimat takbir untuk memompa semangat perjuangan dan pertempuran *arek-arek* surabaya. Inilah cuplikan takbir Bung Tomo;

"Bismillahirrahmanirrahim... Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab, Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu akbar..! Allahu akbar..! Allahu akbar...! Merdeka !". (W. Frederick)

Pengeboman Inggris berjalan secara frontal. dengan cepat Inggris bisa menguasai sebagian besar Surabaya. Benedict Anderson menggambarkan pertempuran 10 November telah meluluhlantahkan kota Surabaya. Kota-kota di Surabaya dipenuhi dengan mayat-mayat manusia dan hewan, kawat bergelantungan suara pertempuran bergema di tengah-tengah gedung kantor yang kosong.

Pejuang Surabaya bertempur dengan penuh keberanian dan heroisme yang tinggi. Semangat berperang yang dikobarkan Bung Tomo dalam pidatonya cukup memberikan efek motivasi kepada pejuang untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Takbir Bung Tomo digunakan

untuk menarik perhatian umat Islam di Surabaya yang belum ke dalam jaringan militer. Bung Tomo mengetahui bahwa banyak pejuang dari kalangan santri-kiai. Dalam tradisi Islam, panggilan takbir berarti menandai akan panggilan perang. Disanalah dimulainya pertempuran yang semakin dahsyat antara pejuang gerilya dan tentara berperalatan perang lengkap.

Dalam sebuah kesaksiannya, Abdul Wachid mengatakan dalam pertempuran tersebut, pemuda dan Badan Perjuangan arek-arek Surabaya menyerbut pasukan sekutu dengan pekik takbir dan pekik merdeka yang bergemuruh di penjuru kota Surabaya yang disambut dengan tembakan serdadu Belanda. Pejuang *arek-arek* Surabaya banyak yang menjadi korban, karena hanya menggunakan bambu runcing, golok, pentungan dan senjata seadanya, sementara pihak sekutu berpeluru lengkap.

Semangat nasionalisme dan jihad umat Islam di medan pertempuran telah menjadi api semangat pejuang berada di medan pertempuran melawan tank, pesawat tempur, dan peluru yang mematikan. Pertempuran terus berkecamuk, semangat jihad dan gairah nasionalisme terus bergelora, korban perang dari kedua belah pihak terus berjatuhan.

Kedahsyatan perlawan pejuang Islam dan pejuang Surabaya dalam melawan sekutu mengakibatkan Inggris mengekskalasi serangannya. Bom-bom dijatuhkan dari udara, peluru meriam dimuntahkan dari darat dan laut yang dibarengi dengan serangan tank.

David Wehl mengatakan, pertempuran Surabaya merupakan pertempuran terdahsyat yang dihadapi Inggris setelah perang dunia. Seandainya heroisme pertempuran Surabaya menyebar di seluruh penjuru Indonesia, jutaan orang Indonesia atau Hindia Timur akan tewas dan dipenuhi banjir darah.

Perjuangan dan perlawanan masyarakat Surabaya baru berakhir setelah dibombardir oleh meriam artileri dan meriam angkatan laut dan setelah berjalan selama 21 hari. Pertempuran Surabaya berlangsung selama lebih dari tiga minggu. Indonesia banyak mengalami kerugian dan korban jiwa.

Pertempuran Surabaya merupakan jihad membela keutuhan Indonesia dari ancaman penjajah. Resolusi jihad yang diproklamirkan KH Hasyim Asy'ari telah menggerakkan rakyat yang dipimpin pemuda dan santri-kiai untuk terus berjuang di jalan Allah, mati syahid. Peran Bung Tomo, Kiai Abbas, dan beberapa tokoh dari Hizbullah serta Sabilillah merupakan bukti sejarah, betapa besarnya semangat rakyat menentang penjajah demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Jihad membela tanah air dengan dilandasi semangat kebangsaan telah menjadi nilai dalam pertempuran di Surabaya. Semangat jihad dan nasionalisme diinspirasi oleh hadis "*hubbul wathan minal iman*" artinya; *cinta tanah air sebagian dari iman*. Kecintaan, rasa memiliki terhadap negara dan semangat jihad telah membakar semangat berjuang arek-arek Surabaya untuk terus bertempur melawan sekutu. Prinsipnya hanya satu; merdeka atau mati demi indonesia!

Pertempuran 10 November 1945 memang sebuah cerminan akan semangat nasionalisme yang berbalut agama (jihad). Narasi sejarah 10 November 1945 merupakan kisah kepahlawanan bangsa yang akan terus hidup seiring nasionalisme bangsa yang hari mulai mengalami kemerosotan. Cerita pertempuran Surabaya adalah cerminan bahwa dalam keterbatasan sekalipun, nasionalisme akan tetap dijunjung tinggi.

Raibnya Kearifan Sungai[3]

Oleh: Juma Darmapoetra

Konstruk kesadaran manusia saat ini telah dijangkiti "ketakutan" musim penghujan. *Phobia* berkelindan dalam otak kesadaran manusia karena musim penghujan selalu membawa bencana bernama banjir, tanah lonsor dan semacamnya. Banjir telah menjadi ritual tahunan bagi masyarakat Indonesia. Maraknya banjir yang melanda Indonesia, ternyata tidak sampai menyentuh kesadaran kosmosentrisme masyarakat untuk lebih bersikap arif dan bijaksana terhadap alam sekitarnya. *Illegal loging*, penebangan hutan secara liar dan pendangkalan sungai masih menjadi aktifitas rutin manusia modern.

Terkikisnya kesadaran kosmosentrisme masyarakat menjadikan alam gersang, sungai dangkal dan hutan gundul. Terjadilah banjir. Banjir merupakan kausalitas dari rusaknya ekosistem alam (sungai). Bumi tidak bisa lagi menyerap endapan air sementara sungai terus menerus mengalami pendangkalan.

Pendangkalan sungai akibat ulah manusia secara tidak langsung merupakan paradoks dengan kondisi Indonesia. Indonesia memiliki

3 Dipublikasikan Kompas, 19 Januari 2010

beberapa sungai besar, seperti Bengawan Solo, Kapuas dan lainnya, pernah menjadi lokomotif gerak aktifitas manusia zaman dulu. Namun seiring masuknya budaya kontinental dan arah rasionalitas ilmu pengetahuan ke nusantara, perlahan tapi pasti, lapisan kesadaran masyarakat untuk memelihara sungai pun semakin terkikis. Hingga, tiap tahun wilayah Jakarta, Pasuruan, Riau, Jawa Tengah dan berbagai wilayah di Indonesia menjadi langganan genangan air dan banjir.

Dalam catatan sejarah dan peradaban manusia, sungai merupakan lokomotif munculnya sebuah peradaban besar dunia. Kemunculan peradaban besar dunia selalu diidentifikasikan dengan sungai. Ini bisa ditandai dengan munculnya istilah seperti lembah peradaban sungai Hwang Ho di Cina; lembah peradaban sungai Nil, di Mesir; lembah peradaban sungai Gangga, di India; lembah peradaban sungai Tigris dan Eufrat di Persia dan lain semacamnya.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa sungai adalah sumber mata air kehidupan manusia zaman dulu, sekaligus yang menandai munculnya peradaban manusia. Tingkat tinggi-rendahnya peradaban sebuah bangsa sangat ditentukan oleh air (sungai). Segala aktivitas manusia (*human activities*), mulai dari politik, adat istiadat, budaya, ekonomi dan lain sebagainya ditentukan sejauhmana pola relasi dan interaksinya dengan sungai.

Namun, sungai sebagai warisan peradaban sudah tidak memiliki nilai historis dan nuansa sakralnya. Manusia dengan semena-mena memperlakukan sungai dengan nafsu keserakahan dan menghancurkan. Paradigma manusia semacam ini merupakan warisan "luhur" budaya *renaissance* dan revolusi di Eropa yang memuja rasionalitas. Manusia modern yang dibekali dengan budaya rasionalitas telah melahirkan tata kehidupan yang tidak seimbang. Manusia mengeksploitasi makhluk lain, menjarah hutan, sungai dan manusia hingga merusak ekosistem dan ekologis bumi. Predikat manusia sebagai pengganti tuhan di bumi telah menjelma menjadi "pengrusak bumi".

Banjir yang diakibatkan sungai, merupakan salah satu bukti kongkret bahwa watak manusia modern sudah tidak lagi memperhatikan keseimbangan tata ekosistem dan kosmosentrisme. Sehingga, sungai-sungai hanya menjadi saksi bisu perlakuan manusia terhadap sumber kehidupan dan lokomotif peradaban manusia zaman dahulu.

Menurut catatan sejarah yang dikumpulkan arkeolog, Dwi Cahyono bahwa sungai Indonesia (Bengawan Solo) telah ikut membentuk peradaban dan kebudayaan dari pedalaman Jawa Tengah hingga Jawa Timur sejak zaman prasejarah, Hindhu-Budha, masa awal perkembangan Islam, masa kolonial, masa kemerdekaan, hingga kini. Bengawan Solo merajut dinamika ragam kehidupan budaya manusia Jawa dalam lintas masa.

Sejarah juga telah membuktikan bahwa banyak peradaban dan peninggalan sejarah ditemukan di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo. Penemuan fosil seperti Pithecantoropus Erectus, dan berbagai fosil fauna dan fosil yang banyak ditemukan di sepangjang aliran sungan seperti di Trinil, Wajak, Ngandong, Sragen, Karanganyar dan lain sebagainya merupakan bukti bahwa sejak zaman pra sejarah manusia Jawa telah memperlakukan sungai dengan baik.

Sumber tekstual yang bisa kita jadikan rujukan untuk melihat aktifitas manusia di Bengawan Solo adalah prasasti Telang tertanggal 11 Januari 904 yang dikeluarkan Rakai Watukura Dhyah Balitung dari Mataram. Isinya mengenai penetapan Desa Telang, Mahe dan Papaahuan sebagai desa Perdikan berkenaan dengan pembuatan penyeberangan Sungai di Paparahuan. (*M Dwi Cahyono*; 2007)

Dalam hal ini, sungai Bengawan Solo pun telah ikut mewarnai gerak laju peradaban manusia nusantara dan Jawa secara khusus. Lalu, kenapa manusia Indonesia saat ini acuh tak acuh terhadap sungai, kenapa sungai justru didangkalkan terus menerus?

Hal ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia saat ini adalah bangsa yang melupakan sejarah bangsanya. Lupa pada sejarah panjang Bengawan Solo yang merupakan manifestasi dari benang yang telah merajut dinamika sejarah dan budaya manusia Jawa secara khusus dan

manusia Indonesia secara umum dalam waktu yang lama dan dinamika budaya.

Mengaca pada kemunculan peradaban dunia seperti Cina, India, Mesir dan peradaban dunia lainnya, maka tidaklah berlebihan kiranya kalau sungai di indonesia ditempatkan sebagai salah satu pembentuk peradaban manusia Indonesia.

Namun anasir pembentuk peradaban itu telah sirna musnah seiring lesatnya peradaban teknologi modern. Kearifan sungai telah raib dari ranah kebudayaan dan peradaban manusia. Nafsu keangkuhan dan keserakahan manusia yang tidak berkompromi dengan alam, menjadikan manusia kering dari nilai historis. Nilai-nilai sejarah yang seharusnya dijadikan sebagai bahan renungan untuk menatap masa depan telah runtuh seiring dengan raibnya "kearifan sungai" di Indonesia.

Manusia sudah tidak lagi menggunakan sungai atau alam sebagai bagian dari kehidupannya. Sungai telah dijadikan media mengeruk keuntungan ekonomis, yang ujungnya adalah banjir yang mengakibatkan kemiskinan masyarakat. Padahal, zaman dahulu banjir akibat sungai dapat menyuburkan tanah.

Sungai dalam falsafah Cina merupakan salah satu dari lima sumber kehidupan. Mereka beranggapan kalau manusia mencintai sungai, maka sungai akan mencintai manusia juga. Fenomena banjir yang terjadi di belahan wilayah Indonesia adalah bahan renungan buat kita semua dan pemerintah, apakah budaya tidak bersahabat dengan alam dan raibnya kearifan sungai akan tetap kita rawat dan dilestarikan? Bukankah di masa lalu sungai telah menunjukkan kearifannya kepada bangsa-bangsa di dunia bahwa kalau manusia bersahabat dengan sungai maka mereka juga akan memberikan pelayanan terbaiknya pada kita.

Lebaran di Bawah Hegemoni Kapitalis[4]

Oleh Adang Saputra

Sikap masyarakat dalam menyambut dan memaknai lebaran sudah bergeser. Lebaran yang seharusnya menjadi puncak kemenangan ibadah puasa, kini melebur dalam perayaan yang disetir oleh kaum kapitalis.

Kini masyarakat memaknai lebaran sebagai hari kebebasan dan balas dendam. Setelah sebulan penuh menjalani ujian menahan diri, menahan nafsu makan, amarah dan sebagainya. Hal inipun berakibat pada tidak berpikirnya masyarakat akan sebuah proses. Artinya, masyarakat tidak berpikir bagaimana menjalani ibadah puasa selama sebulan sebagai proses pembentukan karakter ideal di hari kemenangan nanti, melainkan buru-buru ingin lebaran.

Lebaran lebih dimaknai dengan baju baru ketimbang keimanan yang baru. Hal ini bukan berarti saya melarang untuk membeli pakaian baru untuk lebaran. Akan tetapi, saya lebih mengarah pada kritik atas

4 Dipublikasikan Jogja Raya, 23 Agustus 2011

sikap konsumtif yang berlebihan sebagian masyarakat dalam memaknai lebaran sehingga berakibat pada kelalaian. Sebab, terkadang ada sebagian masyarakat kita yang beranggapan bahwa lebaran adalah momen untuk pamer barang-barang baru. Padahal jelas dikatakan, "*laisa al-ied li man labisuhu jadied, wa lakinna al-ied liman tha'atuhu tazied*" (Idul Fitri bukan berarti pakaian baru, akan tetapi tambahnya ketaatan dan ketaqwaan pada Allah).

Kapitalisasi

Terlepas setuju atau tidak, pola pikir di atas adalah imbas dan bentukan kaum kapitalis yang memanfaatkan momen keagamaan menjadi ladang emasnya. Ini semua berjalan beriringan dengan arus global di mana dalam hal ini media pun ikut andil. Sebagai contoh adalah iklan-iklan di TV. Tidak sedikit iklan yang mendoktrin masyarakat untuk menjadi konsumtif. Maka, kaum kapital berlomba untuk memainkan peran di dalamnya.

Momen keagamaan dikapitalkan menjadi industri lewat iklan. Proses ini muncul sejak awal puasa bahkan beberapa hari sebelum puasa. Iklan menjadi alat ampuh kaum kapital dalam mencuci otak masyarakat. Puasa tidak lagi digemborkan atau diiklankan bagaimana masyarakat dapat melakukan *tadarrus* di malam hari, melainkan "jangan lupa minum suplemen, obat maag, obat ini, obat itu", "jangan lupa pakai kartu ini, kartu itu", "telah dibuka paket murah lebaran, kunjungi mal-mal terdekat" dan lain sebagainya.

Perang Diskon

Komersialisasi momen Ramadhan dan lebaran sangat luar biasa. Bahkan bersaing kuat dengan ketaatan beribadah. Dalam hal ini saya menyebutnya dengan perang diskon antara *departement store* dan sunah Rasul.

Menjelang lebaran banyak mal atau swalayan yang menawarkan diskon hal duniawi. Paket murah lebaran, misalnya. Imbasnya, masyarakat berambisi untuk mendapatkan diskon tersebut. Segala cara dilakukannya.

Tidak sedikit pula yang merelakan *ukhrawi*-nya demi tawaran diskon dari *departement store*.

Hal itu bisa kita cermati pada pertengahan hingga menjelang akhir Ramadhan. *Shaf* di masjid-masjid mulai maju, pudarnya lantunan al-Quran yang biasa menggema setelah tarawih. Ke manakah umat muslim pada saat itu?

Sebaliknya, mal, swalayan ataupun toko-toko besar ramai dijejali pengunjung. Jeniusnya, untuk memperkuat daya tarik, pihak mal mencanangkan program "*night sale*". Terlebih ada tawaran belanja di malam hari akan mendapat diskon lebih besar. Maka tidak heran apabila mal dan swalayan kini menjadi tempat *tawwaf* dan *i'tikaf* menjelang lebaran. Akibatnya, orang berangsur-angsur meninggalkan masjid untuk melaksanakan shalat fardhu, tarawih dan *tadarrus* secara berjamaah.

Kendati ada pernyataan bahwa pada bulan Ramadhan setan dan iblis dibelenggu, namun jangan diartikan bebas dari godaan. Gambaran di atas adalah bukti bahwa godaan di bulan Ramadhan masih tetap ada bahkan lebih besar. Jika demikian, maka siapa yang berhak disalahkan?

Kita harus ingat bahwa manusia memiliki nafsu. Dikatakan bahwa nafsu adalah perangkat rawan dalam pribadi manusia. Jika orang lebih memilih ber-*i'tikaf* di mal daripada di masjid, maka itu adalah kesalahan manusia sendiri. Ia belum mampu mengontrol nafsunya. Sebab, pada dasarnya Ramadhan dikatakan sebagai ajang untuk melihat karakter asli manusia. Apakah termasuk kategori hedonis atau bukan? Apakah termasuk kategori orang taat kepada perintah Allah atau bukan? Maka di tengah peperangan antara tawaran kaum kapitalis dan sunah Rasul, kita dihadapkan pada sebuah pilihan apakah kita memilih tawaran kaum kapital atau Rasul?

BAB IV

KONFLIK, MULTIKULTURALISME, DAN KEAGAMAAN

Refleksi Tragedi WTC 11 September 2001

Tragedi WTC dan Terorisme di Indonesia[1]

Oleh: Nur Kholis Anwar

Runtuhnya menara kembar *World Trade Center* (WTC) New York dan diserangnya markas pertahanan Pentagon, Washington, 11 September 2001, secara langsung telah membawa gelombang baru terorisme. Mulai saat itu, Amerika Serikat (AS) mengobarkan *"perang membasmi terorisme internasional."* Bahkan umat manusia seluruh dunia bersepakat bahwa peristiwa 11 September 2001 adalah tragedi kemanusiaan yang bertentangan dengan semua nilai luhur.

Kasus pemboman di Amerika Serikat tersebut tidak bisa hanya kita pandang sebagai peristiwa lokal di negara Amerika, dengan menghadapkan kekuatan negara super power dengan gerakan Islam radikal, karena gerakan teror tersebut juga berdampak bagi Indonesia. pasca tragedi 11 September, disusul kemudian dengan peristiwa bom Bali pada

1 Dipublikasikan Sinar Harapan, 13 Spetember 2012

tahun 2002. hal inilah kemudian yang membawa arus internasionalisasi isu terorisme di Indonesia.

Di Indonesia, isu terorisme yang belakangan ini terjadi, hendaknya kita sikapi dengan arif agar tidak merusak bagnunan pluralisme dan kerukunan antar umat beragama. Dan yang lebih penting, dalam merespon isu terorisme hendaknya bangsa Indonesia tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, hak asasi manusia, dan tidak mengorbankan rakyat sipil.

Pada kampanye anti teroris yang dilakukan oleh beberapa negara-negara ASEAN, secara langsung pihak negara ASEAN menerapkan keamanan internal sebagai bentuk tanggungjawab dalam penangkapan teroris. Namun, seiring dengan terbentuknya keamanan internal itu, para teroris juga berafiliasi dan membendung kekuatan baru yang lebih besar untuk melancarkan misinya. Sampai saat ini, kekuatan teroris semakin menggelembung besar di Indoneisa.

Pada mulanya, terorisme nampak digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana masyarakat panik terhadap masyarakat setempat. Terorisme juga menciptakan ketidak percayaan terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror. Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja.

Namun seiring dnegan pergeseran waktu, terorisme semakin bertindak represif dalam melancarkan misinya. Tidak heran jika banyak teroris yang mengorbankan dirinya dengan melakukan bom bunuh diri. Dalih jihad dan memberantas tindak kemunafikan selalau menjadi legitimasi ideologis mereka. Ideologi ini kemudian disebarluaskan kepada orang-orang yang sejalan dengan misinya. Hal inilah yang bisa menumbuh kembangkan benih-benih terorisme, terutama di Indonesia.

Mulyana W. Kusumah dalam bukunya Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum (2002), mengatakan bahwa terorisme kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Sifat tindakan, pelaku, tujuan

strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode Terorisme kini semakin luas dan bervariasi. Sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia *(crimes against peace and security of mankind)*.

Semangat Anti Teror

Dengan sadar kita harus mengakui bahwa terorisme sudah mengakar kuat di Negara kita. Satu teroris mati, maka akan tumbuh teroris-teroris baru yang lebih represif dan ekstrim. Fakta yang mengatakan bahwa matinya Amrozi CS secara langsung telah menyulut semangat terorisme yang lain untuk "membalas dendam" atas kematian Amrozi. Demikian karena terorisme sudah menjadi ideologi kuat yang bisa meruntuhkan negara. Terorisme bukan hanya gerakan jihad atau gerakan untuk mengungkap kebenaran, tapi terorisme juga gerakan yang mencoba merusak eksistensi negara.

Semangat Al-Khindi tentang kebenaran menjadi salah satu *frame* gerakan teroris untuk menjalankan misi jidahnya. Al-khindi mengatakan bahwa *kebenaran tidak bisa memihak*. Kebenaran dimiliki oleh setiap manusia sesuai dengan kapasitas keilmuannya masing-masing. Namun, lanjut Al-Kindi, kebenaran yang paling benar adalah kebenaran yang pertama, yaitu *Tuhan*.

Kenyatan bahwa para teroris hanya mengambil serpihan kebenaran dari Al-kindi yang mereka mengambil langkah afirmasi. Pertanyaannya, mengapa dalam jihad di jalan Tuhan mereka harus menggunakan pengeboman? Hal ini tidak masuk akal dan tidak bisa diterima dalam negara. Bahkan Kekerasan simbolik seperti pengeboman gedung-gedung merupakan musuh Negara. Dengan semangat, semua masyarakat Indonesia akan mengatakan bahwa terorisme adalah musuh Negara yang harus dibasmi.

Saat ini negara Indonesia sedang berada dalam zona bahaya atau zona merah. Massifitas para teroris terus mengebiri kebenaradan

Negara, bahkan presiden pun diancam akan dimusnahkan. Mau tidak mau, pemerintah harus bertindak tegas untuk memusnahkan ideologi terorisme yang mengakar kuat di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No.15 Tahun 2003, LN. No.45 tahun 2003, TLN. No.4284, Konsiderans, jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk terorisme terjadi di dunia, masyarakat Internasional maupun regional, serta pelbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal *(criminal policy)* disertai kriminalisasi secara sistematik dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai Terorisme.

Menurut Mulyadi, Tindak Pidana Terorisme dapat dikategorikan sebagai *mala per se* atau *mala in se* yang merupakan tergolong kejahatan terhadap hati nurani (*Crimes against conscience*), menjadi sesuatu yang jahat bukan karena diatur atau dilarang oleh Undang-Undang, melainkan karena pada dasarnya tergolong sebagai *natural wrong* atau *acts wrong in themselves* bukan *mala prohibita* yang tergolong kejahatan karena diatur demikian oleh Undang-Undang (Mompang L. Panggabean, 2003).

Semangat anti terorisme bangsa Indonesia menjadi senjata kita bersama untuk memusnahkan benih-benih terorisme. Dan disinilah pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk menjaga keamanan dan stabilitas umum.

Poso dan Stigma Terorisme[2]

Oleh: Imam S Arizal

Lagi-lagi, bom bunuh diri meledak di Poso. Kekerasan demi kekerasan terus terjadi dalam kurun waktu lebih satu dekade terakhir. Seakan humanisme dan cinta kasih telah mati di bumi ini. Upaya deradikalisasi yang dilakukan belum memberikan hasil yang signifikan. Terbukti nyaris setiap tahun selalu ada peristiwa kekerasan di Sulawesi Tengah tersebut.

Bom yang meledak pada hari Senin (3/6) di Mapolres Poso tidak bisa dilihat sebelah mata atau dalam perspektif keamanan semata. Butuh analisis mendalam dan upaya deradikalisasi secara lunak agar pemahaman kita utuh. Sebab jika pembacaan akan persoalan bom bunuh diri tersebut dangkal, maka langkah solusi yang dibangun tidak akan berdampak pada perdamaian yang jangka panjang.

Selama ini, kacamata yang dipakai oleh pemerintah dalam setiap melihat kasus kekerasan Poso selalu menggunakan paradigma terorisme

2 Dipublikasikan Republika, 10 Juni 2013

berbasis agama. Bom yang meledak hanya dipahami sebagai kriminal murni atau gerakan makar yang dipelopori kelompok radikal. Hal itu dapat kita simak dari pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyaad Mbai, yang mengeluarkan kesimpulan tergesa-gesa bahwa bom bunuh diri yang terjadi Senin lalu dilakukan oleh kelompok radikal Poso.

Tentu saja, kesimpulan tersebut tidaklah keliru. Sebab, jika kita melihat definisi teror, setiap yang mengancam dan menimbulkan rasa takut dapat disebut sebagai teror. Akan tetapi yang hendak penulis tekankan disini adalah bagaimana agar setiap peristiwa tidak dipahami dengan motif tunggal. Stigma terorisme yang dialamatkan pada kelompok radikal tidak lantas menyelesaikan persoalan. Tetapi terkadang menghilangkan substansi dari teror tersebut.

Menurut hemat penulis, ledakan yang dialamatkan ke aparat negara perlu dimaknai sebagai protes sosial terhadap kelompok tertentu yang gagal memberikan keadilan sosial dan pembangunan yang merata. Dr. Abd. A'la (2002) menegaskan bahwa kehadiran aksi-aksi semacam terorisme salah satunya diakibatkan oleh semacam keangkuhan sesuatu atau kelompok tertentu dalam menyikapi persoalan kebangsaan. Dalam kondisi seperti itu, kelompok yang memiliki power sering dan mudah menindas kelompok yang lebih lemah dengan menggunakan alasan yang terkadang terlalu dicari-cari. Sementara kelompok yang lemah, dengan melakukan berbagai justifikasi, mencoba melakukan kekuasaan dan tekanan yang membelenggu mereka dengan cara mereka sendiri.

Teror tidak hanya muncul dari pemahaman kitab suci yang sempit. Melainkan juga sebagai bentuk respon terhadap realitas sosial yang melingkupinya. Franz Magnis-Suseno (2005) mengemukakan bahwa kondisi sosial, politik dan ekonomi memainkan peran besar terhadap sejarah terorisme. Irwan Abdullah (2006) juga menegaskan bahwa lahirnya suatu bencana (baca: teror) tergantung pada kerentanan (*vulnerability*) individu, kelompok, lingkungan, dan institusi. Artinya, segala aspek bisa menjadi mendorong tindakan nekat masyarakat, termasuk

ketidakberdayaan institusi pemerintah dalam menyelesaikan problem masyarakat.

Selain itu, perlu dipahami bahwa teror tidak terjadi secara tiba-tiba. Sejarah dehumanisasi dan matinya hak asasi manusia yang terjadi puluhan tahun merupakan fakta yang tak bisa kita lupakan begitu saja. Rekonsiliasi dan pembangunan infrastruktur pasca konflik sejak tahun 1998 bisa jadi memicu tindakan nekat kelompok masyarakat yang merasa kecewa terhadap kinerja pemerintah. Itulah sebabnya, perlu kiranya kita memahami secara komprehensif dan simultan dari segala aspek karena teror adalah fenomena multidimensional.

Hasil riset Hasrullah, Pengamat Terorisme Universitas Hasanuddin, menunjukkan bahwa bahwa teror bom yang terjadi secara terus-menerus di Poso merupakan bentuk "perlawanan" terhadap aparat keamanan dan penguasa. Mereka ingin menunjukkan jati dirinya dan ingin mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Pengamatan Hasrullah ini cukup beralasan, terutama bila bertolak dari perspektif Perjanjian Malino. Perjanjian yang ditandatangani 20 Desember 2001 itu merupakan wujud keinginan kelompok yang bertikai—Muslim dan Nasrani—untuk mengakhiri konflik dengan konsensus.

Maka dari itu, menurut Hasrullah, pemerintah selayaknya introspeksi diri apakah kesepakatan damai yang telah dicapai sudah terimplementasi baik di lapangan atau belum. Sebab, jika pemerintah kurang memberikan perhatian, protes sosial ini harus dimaknai bahwa pemerintah perlu lebih intens dan optimal dalam membangun daerah konflik, baik berupa pelayanan publik maupun infrastruktur, termasuk pemberdayaan masyarakat pribumi dan pendatang. Sederhananya, Poso sebagai daerah bekas konflik yang terabaikan membutuhkan perhatian khusus. Ketidakadilan yang mereka rasakan telah menimbulkan kekecewaan.

Dalam melihat kasus bom Poso, tidak cukup kiranya hanya dengan pendekatan keamanan dan pencegahan. Akan tetapi perlu dicarikan solusi yang bersifat jangka panjang. Di sinilah kemudian gerakan sosial-

kebudayan menjadi penting dilakukan untuk mengubah pandangan masyarakat yang cenderung radikal.

Pertama, menghapus stigma teroris. Untuk menghapus stigma teroris di Poso memang tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu dilakukan kerja-kerja persuasif oleh pemerintah, baik melalui forum dialog atau menghidupkan ruang-ruang publik. Stigma teroris yang selama ini dibangun tidak hanya merugikan masyarakat Poso secara keseluruhan, akan tetapi juga memunculkan luka lama dan dendam yang berkepanjangan.

Kedua, kampanye perdamaian. Kampanye ini bisa berbentuk pendidikan multikultural dan pendidikan toleransi. Pendidikan multikultural menempati posisi yang signifikan demi kehidupan yang harmonis di masa depan. Kampanye perdamaian juga bisa dilakukan melalui kegiatan kebudayaan dan ajaran-ajaran tradisional. Kampanye ini perlu dilakukan kepada seluruh elemen masyarakat, mulai dari elit pemerintah hingga masyarakat bawah.

Ketiga, mempercepat pembangunan demi kesejahteraan sosial. Pembangunan harus betul-betul diarahkan untuk mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan. Pemerintah harus peka terhadap berbagai peristiwa radikalisme dan terorisme yang terjadi di belahan bumi nusantara. Sebab teror bukan sebatas persoalan keamanan apalagi sebatas kekerasan keagamaan, melainkan juga sebagai bentuk protes sosial atas kegagalan rezim pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi.

Negara Darurat Konflik[3]

Oleh: Mohamad Fathollah

Konflik horizontal disertai kekerasan dan pembunuhan beberapa bulan terakhir semakin meningkat di daerah-daerah. Mulai dari perebutan lahan, pembakaran rumah, perampokan, pembunuhan terang-terangan di depan publik, dan lainnya. Adanya konflik semacam itu dapat dipastikan bahwa Indonesia darurat konflik.

Darurat konflik barangkali bukanlah isu baru. Adanya sistem masyarakat terbuka yang ada di Indonesia menjadikan masyarakatnya mudah tersulut konflik, baik yang dilakukan oleh per kelompok dalam suatu masyarakat maupun bahkan masyarakat versus aparat. Di Bima, yang terjadi belum lama ini mengindikasikan bahwa masyarakat kita (baca: aparat) belum mampu membahasakan konsep Protap Kapolri Nomor 1/I/2010 tentang Penanggulangan Anarki pada Ranah Kesadaran Kemanusiaan.

Tindakan represif aparat yang dinilai ngawur dan membabi buta terhadap para demonstran lagi-lagi menjadi persoalan baru sebuah tindakan anarkis. Atau sebaliknya, adanya kegetiran dan kewaspadaan

3 Dipublikasikan Republika, Senin, 9 Januari 2012

terhadap aparat menjadikan masyarakat secara sadar mempersiapkan segala kemungkinan bentrok dengan pegangan senjata tajam di tangan masing-masing. Tidak jarang, adanya ego dari kedua belah pihak (warga versus aparat) bentrok tidak dapat dihindarkan. Hal ini barangkali bisa becermin pada konflik yang terjadi di Sape, Bima, dan Mesuji, Lampung.

Kita dapat becermin pada konflik masyarakat di Sampang, Madura. Warga yang beraliran Sunni membakar sejumlah rumah warga dan pesantren yang beraliran Syiah. Dalam pemberitaan media, hal tersebut akibat ketidakterimaan warga yang beraliran Sunni yang menganggap Syiah sebagai aliran sesat dalam Islam. Walaupun faktanya tidak demikian, bahwa pimpinan dua kelompok bertikai tersebut masih saudara dan konflik mengemuka ditengarai adanya latar belakang kecemburuan sosial dari masing-masing pimpinan. Kalaupun isu tersebut menjadi isu agama, tidak lain sebagai narasi konflik lain yang telah sedemikian akut.

Yang paling terbaru, misalnya, penembakan misterius terjadi menjelang detik-detik pergantian tahun 2012 lalu di tiga tempat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Sejumlah orang tanpa salah diberondong tembakan dari beberapa orang tidak dikenal. Penembakan tanpa motif tersebut mengakibatkan lima orang tewas dan lainnya luka-luka kritis.

Grand Design

Tidak dapat dimungkiri bahwa konflik horizontal dan vertikal mudah terjadi di Bumi Pertiwi ini. Fakta sejarah menunjukkan konflik yang terjadi di Indonesia berawal dari kecemburuan sosial antara satu warga dan warga lainnya.

Adanya ketertindasan struktural dari pemerintah atas penguasaan lahan atau perebutan tanah, melambungnya kebutuhan pokok, represifisme aparat, dan sejumlah kasus pelanggaran HAM lainnya seolah-olah terjadi pembiaran. Tengok misalnya, pemerintah tidak akan melakukan tindakan pengusutan dengan membentuk tim khusus atau tindakan penanggulangan lainnya apabila konflik dalam masyarakat

belum mengarah pada masifisme atau adanya korban mati. Pemerintah (pusat) akan turun langsung meninjau ke lapangan ketika ada korban dari sebuah pertikaian warga dan nyata-nyata mengancam kedudukan pemerintah.

Pembiaran lain, misalnya, pada aksi Sondang Hutagalung yang melakukan pembakaran diri di depan istana. Adakah tindakan positif dalam melakukan revitalisasi dan strukturalisasi kebijakan khusus prorakyat atas protes Sondang? Kalaupun ada, barangkali sebatas pada penyelidikan kasus dan mengungkap motifnya.

Terjadinya konflik beberapa bulan terakhir di daerah-daerah dapat dikategorikan sebagai ketidakterimaan sosial *(social disagreement)*. Konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat berlangsung secara berkelompok. Kekerasan dipilih sebagai sebuah gerakan untuk lebih mengemuka dan didengar oleh pihak terkait atau pemerintah. Protes Sondang sebagai aktivis mahasiswa gemanya berlangsung hanya beberapa hari dan belum mampu membungkam segala ketidakadilan. Di samping itu, aksi tragis tersebut belum mampu menjadi akar gerakan lebih masif dari gerakan mahasiswa idealis.

Alih-alih menjadi Tunisia kedua pasca-Mouhamed Bouazizi membakar dirinya, pembakaran diri Sondang oleh beberapa kalangan bahkan disebut sebagai aksi konyol. Tidakkah kita dapat berpikir lebih jernih untuk menafsirkan aksi tersebut pada pembelaan keadilan dan kemanusiaan yang acap tergadai?

Tidak heran, misalnya, sejumlah aksi protes yang terjadi di daerah dikatakan sebagai bentuk grand design atau rekayasa besar-besaran dari sejumlah pihak atau momentum konflik tersebut dimanfaatkan kelompok tertentu untuk menyerang kelompok lainnya (pemerintah).

Peta Konflik

Konflik di mana para pesertanya merasa bahwa mereka semata-mata merupakan wakil dari kolektivitas-kolektivitas atau kelompok-kelompok, berjuang bukan untuk dirinya, melainkan hanya untuk cita-cita

kelompok yang diwakilinya itu, sangat mungkin lebih radikal serta tidak kenal ampun ketimbang mereka yang berjuang hanya untuk alasan-alasan pribadi (Louis A Coser, 1956:118).

Konflik yang ada di permukaan tidak dapat terselesaikan selama ego dari masing-masing kelompok masyarakat mengemuka. Dalam pandangan Coser, konflik dapat menjadi pementik bagi terbentuknya keadilan sosial dan keterseimbangan sosial *(social equilibrium)*. Hal demikian dapat tercapai ketika konflik dapat dipetakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat bersangkutan serta nirkepentingan politik parsial.

Aparat, misalnya, dapat membuat peta konflik dari berbagai daerah untuk tidak hanya sebagai langkah prefentif, namun juga memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat dan petugas pelaksana untuk melakukan tindakan nonrepresif. Belum lagi pada tahun 2012 ini, Polri memprediksi konflik dalam masyarakat, terutama aksi terorisme, masih menjadi rangkaian realitas sosial.

Dari masyarakat sendiri, katup penyelemat (safety-belt) adanya konflik horizontal sebagaimana menjadi landasan konflik Coser ialah membangun kesadaran komunal akan terbentuknya masyarakat baik. Masyarakat di mana ketidakadilan sosial dapat menjadi pecut untuk lebih kreatif dan produktif bekerja serta menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Kecemburuan sosial memang pasti ada. Akan tetapi, kecemburuan tersebut dapat dimaknai sebagai external support untuk lebih kompetitif. Tidak usah menunggu pemerintah turun lapangan, langkah kompetisi-positif masyarakat secara tidak langsung akan membangun kesejahteraan bangsa (welfare state) yang berkeadilan dan menyeluruh. [f]

Spirit Perdamaian Maulid Nabi[4]

Oleh : Iksan Basoeky

Tanggal 12 Rabiul Awal merupakan hari bersejarah bagi umat Islam di seluruh dunia karena pada saat itulah Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia ini. Hari kelahiran beliau sangat istimewa bagi umat Islam, sehingga setiap tanggal kelahirannya diperingati sebagai hari Maulid Nabi.

Maulid sejatinya sebagai upaya mengingat kembali pesan historis dari misi perjuangan Rasulullah yang dikenal dengan ramah, santun, dan selalu menjunjung tinggi arti sebuah perdamaian dalam setiap syiar agama-Nya.

Dalam konteks kekinian, maulid setidaknya sangat tepat untuk dijadikan media reaktualisasi penyadaran bagi seluruh umat Islam khususnya di Indonesia dengan membedah kembali literatur perjuangan dakwah Rasulullah. Di mana dakwah Rasulullah dalam menyebarkan

4 Dipublikasikan Sinar Harapan, 16 Februari 2011

ajaran Islam tidak pernah melakukan pemaksaan apalagi menggunakan sistem kekerasan.

Rasulullah berdakwah lebih mengutamakan sisi humanisme dan juah dari bentuk radikalime. Islam disampaikan oleh Rasulullah lewat perdamaian dan pendekatan secara individu lewat hati ke hati. Sehingga perlahan namun pasti ajaran Islam dapat diterima oleh masyarakat setempat dan terus bertambah pula pengikutnya.

Strategi dakwah tersebut merupakan kunci nyata keberhasilan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam di bumi ini. Islam dengan mudah mendapatkan tempat serta diterima oleh banyak kalangan karena mampu ditransformasikan lewat kedamaian dan kasih sayang. Sehingga pelbagai elemen masyarakat secara cepat nan pesat bisa menerima keberadaannya.

Kesuksesan tesebut juga tergambar pada awal masuknya Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Islam yang dibawa oleh Wali Songo dengan corak kedamaian dan disesuaikan dengan tradisi masyarakat setempat dapat berjalan dengan mudah dan lancar.

Wali Songo menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa dengan ramah dan santun. Sehingga dengan langkah tersebut menjadikan ajaran Islam mendapat posisi strategis di mata masyarakat dan pada akhirnya menyebar secara luas di bumi nusantara ini.

Belakangan ini mucul dakwah Islam yang tidak sejalan dengan ajaran Islam itu sendiri. Di mana instrumen dakwah yang digunakan sangat berbeda jauh dengan dakwah yang telah diajarkan oleh Rasulullah maupun Wali Songo. Fenomena dakwah yang muncul di masyarakat sekarang lebih berbentuk pemaksaan dan intimedasi.

Gerakan-gerakan yang mengatasnamakan dirinya sebagai pembela agama islam justru tampil memberi penodaan terhadap agama itu sendiri. Lebih tepatnya mereka itu mendustai agama dengan tindakan radikal dan bentuk kekerasan yang mereka sajikan kepada publik.

Kita tentu masih ingat pada peristiwa kekerasan yang menimpa saudara kita di Cikeusik yang menyebabkan hilangnya tiga nyawa. Dan pembakaran tiga gereja di Temanggung, Jawa Tengah, beberapa hari yang lalu. Sangat miris sekali, hanya untuk menegakakan ajaran agama, mereka tega menghilangkan tiga nyawa saudaranya dan merusak tempat ibadah-ibadah orang lain.

Mestinya mereka sadar bahwa hal itu sudah diluar ajaran agama. Sebab tindakan tersebut sudah tidak berbanding lurus dengan ajaran Rasulullah yang selalu mengajak kepada jalan kebaikan. Malah prilaku yang demikian justru telah menodai citra agama itu sendiri, khususnya agama Islam sabagai *rahmatan lil 'alamin*, yakni agama yang selalu menjungjung tinggi persaudaraan dan kedamaian.

Islam tidak pernah mengajarkan aksi-aksi kekerasan dan upaya penindasan terhadap sesamanya, yang ada hanyalan ajaran yang menuntun umatnya untuk bersikap santun dan rukun terhadap sesamanya. Jadi sangat ironis sekali jika ada sebuah gerakan yang mangatasnamakan dirinya sebagai pembela agama justru mereka menindas saudaranya.

Tindakan demikian kiranya wajib hukumnya untuk segera diakhiri. Karena disamping telah belawanan dengan ajaran Islam, juga telah mencoreng kemurnian esensi ajaran Islam itu sendiri yang mengajak pada jalan kebenaran. Intinya, apapun yang namanya praktek kekerasan maupun radikalisme tidak tidak bisa dibenarkan dan harus dicegah.

Sebab, jika tidak, kekerasan atas nama agama akan terus belanjut dan berkembang menjadi terdisi di masyarakat yang gampang digerakkan oleh kelompok-kelompok tertentu sebagai pelampiasan egoisme bermotif sintemen atas ibadah umat yang lain. Faktor inilah yang sering membuat manusia tak kenal saudara sehingga cenderung berbuat aniaya terhadap sesamanya.

Kecendurung pola pikir sempit itulah yang sering membuat manusia buta. Di sisi lain egoisme bermotif kepentingan mengejar pemuasan hidup di dunia juga menjadi pendorong tehadap timbulnya karakter

ambigu manusia, sehingga orientasi mengejar kehidupan dunia selalu dikedepankan ketimbang memperoleh kehidupan yang abadi (*akhirat*).

Orientasi kehidupan itulah yang membuat manusia menjadi serakah dan kejam terahadap linkungan dan sesamannya. Yang pada puncaknya akan melahirkan perpecahan saudara dan hilangnya rasa kerukunan antar umat muslim. Hal ini yang setidaknya harus kita cegah bersama mulai detik ini.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi persaudaraan dan perdamaian dituntut mampu untuk menegakkan siprit pedamaian, kerukunan, dan tolerannsi yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad.

Maka dari itu, momentum peringatan Maulid Nabi kali ini perlu dijadikan sebagai sarana menegakakan kembali spirit perdamian yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Maulid setidaknya dapat menggugah hati kita untuk lebih berbuat positif lagi guna menjadikan bangsa ini penuh dengan kedamain dan ketentraman.

Ramadan, Ajang Bermuhasabah[5]

Oleh : Iksan Basoeky

Ramadan kini telah tiba. Maka di bulan yang penuh berkah ini, umat muslim di seluruh penjuru dunia melaksanakan ritual puasa. Puasa Ramadan merupakan momentum yang sangat istimewa bagi kita untuk bermuhasabah atas segala peristiwa dan berbagai cobaan yang menimpa kehidupan kita.

Kita seringkali dihadapkan dengan berbagai tragedi kehidupan dalam kesehariannya. Nanum kita belum menyadari semua itu sepenuhnya sebagai cobaan atau ujian yang memang diberikan Tuhan kepada umat manusia di muka bumi, agar sadar atas perbuatannnya dan mau memperbaiki diri dengan tindakan yang sesuai dengan seruan hati nurani, bukan mengedepankan logika.

Oleh karena itu, pada bulan yang bertabur berkah ini warga muslim dituntut bisa mebersihkan batinnya dari segala aspek kehidupan yang menyimpang, seperti berbohong, dzalim, korupsi, dan berbagai bentuk

5 Dipublikasikan Harian Joglosemar, 1 Agustus 2011

tindakan yang meyimpang lainnya. Ini semua demi menuju makrifat hidup yang lebih bermakna. Yakni kehidupan yang sesuai dengan tuntunan risalah agama.

Maka dari itu, di kesempatan yang istimewa ini umat muslin didorong untuk lebih mengoptimalisakan diri dalam melakukan spiritualitasnya kepada sang khaliq di tengah berbagai kegersangan hidup yang selalu mengedepankan kepentingan ekonomi, politik, dan perebutan kekuasaan. Inilah saat yang tepat bagi kita untuk mengasah spiritualitas kita dalam menjalani ibadah sepanjang satu bulan ke depan.

Ramadan seyogianya di sini dengan agenda-agenda kegiatan penting yang mencerahkan, sebab pada bulan ini pula Allah akan memberikan segala limpahan rahmat-Nya pada manusia yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah. Imam An-Nawawi, dalam kitabnya, *Al-adkar*, menjelaskan, bahwa pada bulan Ramdan ini pahala ibadah manusia akan dilipat gandakan sesuai dengan jerih payah ibadah dan spiritulias yang mereka jalani.

Ramadan sungguh merupakan bulan yang penuh hikmat dan bertabur berkah bagi manusia di seluruh dunia. Tak terkeculi bagi bangsa ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi kita untuk bermuhasabah agar dapat memahami berbagai peristiwadan tragedi hidup yang selalu menimpa diri kita. Bencana alam, tragedi politik, persoalan kemiskinan, naiknya harga sembako, dan meningkatkan kasus-kasu korupsi di negeri ini menjadi contoh nyata kepedihan bagi kita.

Maka, sungguh naif jika sebagai warga muslim Indonesia kita tidak bisa menyadari semua itu. Karena bagaimana pun peristiwa yang terjadi pada diri kita adalah bagian dari efek dari tindakan kita itu sendiri yang sering salah langkah. Bencana alam itu terjadi karena memang ulah manusia yang sudah tidak menghiraukan tuntunan agama demi mengejar kepentingan dirinya sendiri. Persoalan kemiskinan, misalnya, itu dapat terjadi karena tindakan elite yang ingin memperkaya diri dengan terus mengkorupsi uang negara.

Maka, hal itu sudah sepatutnya untuk kita refleksikan dan renungkan kembali dengan tujuan agar kita dapat menyadari dan segera bertindak sesuai dengan isyarat hati nurani. Tetapi perlu diketahui terlebih dahulu, dalam melakukan muhasabah tersebut membutuhkan keseriusan dari diri kita sendiri guna dapat menyelami spiritualtas muhasabah yang kita lakukan. Puasa di bulan Ramadan adalah jalan yang akan membimbing kita menuju kesempurnaan spiritualitas tersebut.

Puasa di bulan Ramadan ini juga menjadi penyejuk spiritualitas kehidupan manusia menuju derajat hidup yang lebih tinggi. Setidaknya, melalui puasa Ramadan ini kita akan lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta dan sekaligus mebuka batin kita yang telah lama berlumuran "lumpur" kehidupan yang serba duniawi. Kehadiran bulan Ramdan menjadi sumber kesejukan. Di mana di dalanya terdapat sebuah kenikamatan dan karunia Tuhan yang dapat kita reguk bersama dalam mengobati rasa dahaga hidup yang telah kita jalani.

Pada momentum bulan Ramadan ini pula, warga muslim diharapkan bisa menata kehidupan yang lebih baik lagi. Kehidupan yang dulunya terkotak-kotak dan terpecah-pecah setidaknya dapat dibangun melaui kebersamaan di bulan Ramadan ini. Toleransi dalam kehidupan umat mansia setidaknya dapat ditegakkan dengan jalan spiritulitas puasa. Imam Ghazali, dalam kitabnya, *Minhajul Abidin*, menjelaskan, bahwa puasa Ramadan merupakan jihat yang sebenarnya untuk melawan hawa nafsu dari tindakan yang dapat merugikan diri kita maupun bagi kehidupan orang lain.

Di sini, puasa Ramadan menjadi media pengendali nafsu jahat manusia (*nafsul ammarah*) dangan menegakkan nafsu baiknya (*nafsul awwamah*). Puasa di sini yang kemudian akan membentuk pola pikir manusia untuk berbuat baik terahadap sesamanya. Puasa ramadan menjadi energi yang luar bisa bagi manusia untuk menjalani kehidupan.

Muhammad Zakariyah Al Kandhalawi, dalam kitabnya *Fadhail Amal*, menegaskan, bahwa selama Ramadan jangan menyia-nyiakan waktu, bahkan harus lebih produktif lagi dalam menjalani ibadah. Ibadah kita di

bulan ini setidaknya lebih ditingkatkan lagi karena dengan jalan inilah kita akan mencapai puncak kebahagian yang telah dijanjikan Tuhan.

Ramadan merupakan bulan yang sungguh agung. Karena orang yang berpuasa di dalanya akan mendapakan suatu kesejukan, limpahan rahmat, dan karunia yang akan diberikan oleh Allah. Maka berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabiqul khairat*) murupakan tindakan yang sungguh mulia. Sungguh merugi orang yang menyia-nyiakan kesempatan puasa di bulan Ramadan ini, yang kerjanya hanya mementingkan politik dan kerja setiap hari di kantor, dengan meninggalkan ibadah di bulan yang penuh berkah ini.

BAB V

SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP

Islam dan Krisis Lingkungan[1]

Oleh: Imam S Arizal

Isu krisis lingkungan hidup adalah masalah yang menyita perhatian masyarakat dunia dalam kurun waktu empat puluh tahun terakhir. Masyarakat global mulai menyadari bahwa industrialisasi dan pembangunan yang diorientasikan pada peningkatan ekonomi dan kemajuan teknologi telah mengancam masa depan planet yang kita singgahi. Kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dengan skala ekstensif menuntut masyarakat global untuk bersatu padu guna menghadapinya dengan berbagai macam cara dan disiplin pengetahuan yang berbeda-beda.

Philip Shabecoff, sebagaimana dikutip Mudhofir Abdullah (2010:2), mengemukakan bahwa sejak abad ke-19 akar-akar gerakan *environmentalism* modern telah muncul, namun gerakan tersebut berkembang secara masif pada abad ke-20. Pada tahun 1960-an, beberapa ahli ekonomi mulai mengkaji dampak pertumbuhan ekonomi atas lingkungan.

1 Dipublikasikan Republika, 27 Januari 2012

Adalah Kenneth Boulding, seorang ahli ekonomi Amerika Serikat yang memprihatinkan bahaya "ekonomi *cowboy* yang serampangan", mengajak National Council of Churches untuk mempromosikan sikap bersahaja, melestarikan dan mendaur ulang. Tahun 1960-an juga ditandai dengan kesadaran sekelompok teolog Kristen, ilmuan, dan pemimpin gereja untuk membentuk kelompok studi Iman-Manusia-Alam di bawah payung National Council of Churches. Menjelang tahun 1970-an, sebuah gerakan eko-keadilan yang berupaya mengintegrasikan ekologi, keadilan, dan iman Kristen mulai mengungkapkan pemikiran mereka dalam beberapa telaah teologis, etis, historis, biblikal, dan kebijakan umum yang berlangsung di Amerika Utara (Charpman, 2007:32).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pertama kali menyelenggarakan satu seri konferensi internasional tentang lingkungan pada 1972 di Stockholm, Swedia. Sejak saat itu keterlibatan agama-agama besar dalam masalah konservasi lingkungan semakin intens dan mendapat perhatian khusus. Agama-agama besar ditempatkan sebagai pilar penting dalam menopang kesadaran konservasi lingkungan melalui eksplorasi ajaran-ajarannya. Menurut Mudhofir Abdullah, ajaran-ajaran agama dan spiritual dianggap mampu memperkuat kesadaran umat manusia untuk mengimplementasikan tugas-tugas konservasi lingkungan yang mengalami degradasi akibat agresi manusia-manusia modern secara terus-menerus melalui watak penaklukannya.

Peran serta pemuka agama sangat penting sebagai upaya penanggulangan krisis lingkungan dalam jangka panjang. Seyyed Mohsen Miri (2007:24-25), membagi dua pendekatan sebagai solusi untuk mengatasi krisis lingkungan baik secara individual maupun sosial. *Pertama,* pemecahan krisis melalui pertimbangan atas segala sesuatu yang terlihat langsung, membuat perubahan jangka pendek dan membuat sesuatu perencanaan ulang. *Kedua,* pemecahan krisis melalui penjabaran sebab dan faktor yang mendorong munculnya krisis (aspek ontologis), melalui dasar keilmuan (aspek epistimologis), kerangka rohani, dan intelektual,

serta paradigma budaya yang menyebabkan krisis tersebut terjadi dengan mengacu kepada pendekatan pertama.

Bagi Seyyed Mohsen Miri, pendekatan kedua dinilai lebih tepat karena mampu memberikan pengaruh lebih nyata. Menurutnya, jika hanya berpegang pada pendekatan pertama, maka masalah akan muncul kembali dan menjadi lebih serius karena krisis sebelumnya masih aktif. Meskipun beberapa percobaan penting telah dilakukan semisal proyek penggantian kelengkapan transportasi, membuat bahan bakar non-fosil, merancang teknologi ramah lingkungan, pendekatan pertama tidaklah dapat menghapus krisis lingkungan dan tidak dapat menjadi solusi yang memadai bagi masalah tersebut.

Krisis lingkungan memang butuh penyelesaian yang bersifat jangka panjang, karena krisis ini tidak semata-mata disebabkan oleh persoalan sosial- ekonomi dan kependudukan semata. Krisis lingkungan adalah persoalan ultimasi, persoalan cara pandang manusia terhadap alam semesta. Tak ada yang tidak sepakat bahwa problem lingkungan yang saat ini terjadi tidak lepas dari perilaku manusia yang secara sadar maupun tidak sadar telah mengubah ekosistem bumi menjadi terancam keseimbangannya.

Solusi

Pada titik inilah peran agama untuk menjawab problem lingkungan yang krusial menjadi sangat dibutuhkan. Menurut Seyyed Hossein Nasr (2005), nilai-nilai agama dan kearifan-kearifan moral sangat diperlukan untuk merawat keseimbangan alam dari situasi *chaos*. Tanpa adanya penguatan terlebih dahulu basis keyakinan dan spiritual manusia, serta memurnikan dirinya dari intervensi sifat dan sikap arogansi, pragmatisme, rakus dan sifat nafsu lainnya, maka semua upaya yang dilakukannya untuk melindungi alam dari kesusakan tak lebih dari sekedar tabir untuk memenuhi kepuasan dan keuntungan besar bagi diri dan kelompoknya semata, dan tidak akan memerhatikan apakah sesuai hasil kerja yang diperolehnya dengan yang seharusnya diperoleh.

Kian berkembangpesatnya sains dan teknologi modern yang berakibat pada sekularisasi kosmos. Menurut Nasr, sekularisasi kosmos telah memisahkan manusia dengan lingkungannya. Desakralisasi dan sekularisasi kosmos sepanjang berabad-abad membuat manusia mengembangkan watak penaklukan atas alam sehingga menimbulkan krisis lingkungan sangat serius. Nasr menjelaskan bahwa bumi kita sedang berdarah-darah oleh luka-luka yang dideritanya akibat ulah manusia yang sudah tidak ramah kepadanya. Pandangan sekular dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang tercerabut dari akar-akar spiritual agama, membuat bumi kian mengalami krisis dan terus menghampiri titik kehancurannya.

Di sinilah kemudian gagasan Nasr tentang sains yang suci (*scientia sacra*) menjadi relevan adanya. Kita mesti mendukung untuk rekonstruksi pemikiran ilmiah Islam atas dasar pengetahuan wahyu (*revealde knowledge),* tidak menaklukkan alam, tetapi memanfaatkannya sesuai dengan Perintah Allah (*function within Divine Commands),* dan kritis terhadap sekularisasi sains dan penguasaan atas alam (*critical of secularization of science and its domination nature).* Masyarakat modern perlu mengondisikan kembali pemahamannya tentang eksistensi diri, alam dan Tuhan, serta bagaimana relasi yang semestinya antara yang satu dengan yang lainnya.

Urgensi Kajian Tafsir Berbasis Ekologi[2]

Oleh: Adang Saputra

Krisis ekologi merupakan salah satu problem aktual selain globalisasi, demokrasi, HAM dan gender. Bahkan menurut Mujiyono, wacana krisis ekologi tersebut diperkirakan akan selalu tetap aktual pada abad 21 (Mujiyono Abdillah, 2001; 23). Krisis tersebut menimpa kehidupan umat manusia mana pun. Sehingga hampir semua masyarakat dunia mengalaminya, khususnya masyarakat modern kini.

Betapa tidak, pelbagai bencana muncul silih berganti sebagai akibat kerusakan ekologi yang—sejatinya—dilakukan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri (Q.S. al-Rum [30]: 41). Eksploitasi alam terus dilakukan tanpa mempertimbangkan keseimbangan dan kelestarian alam. Sehingga muncul apa yang disebut dengan perubahan iklim (*climate change* atau *taghayyur al-thaqs*) tak menentu, tanah longsor, banjir, badai, *global warming* dan berbagai kerusakan ekosistem lainnya.

2 Dipublikasikan Radar Jogja, 16 Mei 2011

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa kerusakan ekologi pada hakikatnya akibat dari ulah buruk tangan manusia sendiri. Namun terkadang orang mengelak dengan dalih, bahwa bencana alam merupakan gejala alam biasa, ia sedang melakukan proses penyeimbangan diri. Padahal sekali lagi bahwa sejatinya manusia turut berkontribusi pada kerusakan alam tersebut dengan beragam bentuknya, seperti penggunaan gedung/ rumah kaca, penebangan liar (*illegal logging*), penambangan liar dan sederet eksploitasi alam lainnya.

Tidaklah heran apabila sosok Gus Dur mengatakan bahwa problem ekologis itu terjadi akibat adanya degradasi, yakni penurunan martabat manusia dari makhluk yang semestinya mampu menangkap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan alam secara apa adanya, malah menjadi makhluk yang mau tidak mau harus menerima sesuatu yang telah direduksikan (Abdurrahman Wahid, 2006; 43-45). Sehingga ketika kerusakan alam terjadi, timbullah pertanyaan kritis dalam sebuah teori etika lingkungan, "Apakah—tujuannya untuk—pembangunan berkelanjutan atau keberlanjutan ekologi?" (Sonny Keraf, 2006; 166).

Maka jika merujuk pada pendapat Sayyed Hossen Nasr dalam bukunya *Man and Nature: Crisis of Modern Man*, krisis lingkungan itu berpangkal dari krisis spiritual. Sementara kekuatan spiritual itu tidaklah lepas dari doktrin ajaran suatu agama. Dalam hal ini adalah al-Quran. Sebagaimana yang diungkapkan sosok Hasan Hanafi bahwa ajaran agama (al-Quran) merupakan penggerak kesadaran, sikap dan persepsi manusia untuk menentukan cara berinteraksi dengan alam (Hasan Hanafi, 2005; 67).

Sebab al-Quran sendiri telah menegaskan bahwa alam atau ekologi diciptakan dalam keadaan seimbang (Q.S. al-Mulk [67]: 3), dan penyebab kerusakan alam—sebagaimana disebutkan di atas—tidak lain adalah ulah buruk manusia itu sendiri (Q.S. al-Ruum [30]: 41).

Lebih lanjut, M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menyatakan bahwa alam raya ini telah diciptakan dalam suatu sistem yang sangat serasi dan sesuai dengan kehidupan manusia. Hanya saja manusia terkadang

melakukan kegiatan buruk yang dapat merusak keseimbangan sistem kerja alam.

Evaluasi, Inspirasi dan Motivasi Kajian al-Quran

Kendatipun demikian, kajian mengenai al-Quran—dan bahkan tafsirnya sekalipun—hanya berkutat pada pembahasaan *'ulum al-Quran* (ilmu-ilmu al-Quran) dan hal-hal yang bersifat normatif-teologis. Sangat jarang sekali bahasan yang menyangkut problematika kehidupan manusia, khususnya persoalan ekologi. Padahal jelas sekali bahwa al-Quran merupakan sumber moral kehidupan baik yang menyangkut persoalan teologis (*hablun min Allah*), sosial (*hablun min al-nas*), dan bahkan lingkungan alam (*hablun min al-'alam/al-bi'ah*).

Hal itu mestinya menjadi bahan evaluasi, inspirasi dan motivasi para pengkaji al-Quran untuk mengembangkan kajiannya dengan mencoba berkontribusi pada penyelesaian problematika kehidupan, khususnya persoalan ekologi. Sehingga besar harapan adanya sebuah produk tafsir yang memiliki perspektif ekologis demi keberlangsungan ekologi. Oleh karena perilaku masyarakat (*mode of conduct*) tak lepas dari sebuah pola pikir (*mode of thought*). Sementara pola pikir dipengaruhi oleh tafsiran atas teks-teks keagamaan, yang kemudian menjadi sebuah sistem teologi yang mereka yakini.

Jika melihat—produk—tafsir klasik dan abad pertengahan seperti tafsir Muqatil bin Sulaiman, tafsir al-Thabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir al-Razi (*Mafatih al-Ghaib*) dan lainnya, agaknya memang tidak menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai tatacara mengelola dan melakukan pola relasi yang baik dengan lingkungan alamnya. Hal itu bisa dimaklumi, oleh karena boleh jadi problem ekologi saat itu memang tak separah saat ini.

Tak hanya—produk—tafsir klasik, beberapa kitab tafsir—yang dianggap masuk dalam kategori—modern seperti tafsir Abdul dan Rasyid Ridha (*al-Manar*), tafsir al-Maraghi, tafsir al-Qasimi, dan tafsir Ibnu 'Asyur

(*al-Tahrir wa al-Tanwir*), masih kurang memadai dalam pembahasannya mengenai persoalan ekologi.

Ini berarti bahwa tafsir sesungguhnya merupakan produk dari anak zamannya, yang terkadang tidak lagi relevan (*compatible*) dengan tuntutan era sekarang. Maka dari itu, sebuah paradigma tafsir ekologi menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk segera dirumuskan.

Sementara menurut laporan Kompas 2 Maret 2010, riset mengenai ekologi masih relatif minim. Padahal riset mengenai ekologi, baik yang berbasis pada riset lapangan (*field research*) maupun riset pustaka (*library research*) sangat penting dilakukan guna menjadi bahan pertimbangan dalam memecahkan problem krisis ekologi. Lebih lanjut, riset ekologi yang berbasis pada penafsiran atas teks-teks keagamaan juga sangat perlu untuk dilakukan guna memberikan basis teologis dalam berinteraksi dengan alam dan sebagai pondasi aksi konkret dalam pencegahan kerusakan alam yang lebih besar lagi.

Sebuah Catatan Penutup

Oleh sebab itu, di era modern saat ini merumuskan sebuah paradigma tafsir ekologis sangat perlu untuk segera dilakukan dan menjadi sebuah keniscayaan sejarah untuk memberikan kontribui etis-teologis dalam menjalin hubungan baik antara manusia dengan alamnya yang menekankan prinsip *al-'Adalah* (keadilan), *al-Tawazun* (keseimbangan), *al-Istikhlaf duna al-Fasad* (non destruktif) dan *al-Intifa' duna al-Israf* (non eksploratif). Sebaliknya, membiarkan pola relasi manusia dan alamnya yang cenderung eksploratif serta destruktif sama halnya dengan 'menandatangani kontrak' bagi kehancuran eksistensi kehidupan manusia itu sendiri. *Wallahu A'lam*.

BAB VI

KORUPSI

Mengakhiri Gempa (di) KPK[1]

Oleh: Imam Musthafa

Akhirnya aspirasi dari berbagai elemen masyarakat terkabulkan setelah kedua pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah dikeluarkan dari penjara. Rekaman rekayasa kriminalisasi yang berdurasi 3,5 jam (seluuhnya 4,5 jam) itu menjadi bukti kuat kedua pimpinan KPK tersebut tidak bersalah. Terdapat skenario sistemetis untuk melemahkan lembaga terebut, lebih khusus menonaktifkan kinerja kedua pimpinannya.

Sekalipun kedua pimpinan tersebut keluar, belum bisa dikatakan KPK bisa menang. Sebab pihak lawan KPK belum tertangkap semuanya. Sehingga masih banyak pihak menghendaki kelemahan KPK. Mereka belum menerima terhadap kejadian ini yang membalikkan bola permainan. Dahulunya, KPK senantiasa kewalahan melawan para pengendali hukum (mafia). Perseteruan tersebut diibaratkan dengan "Cicak dan Buaya". Ironis tidak? Negara kita tidak bisa bersih dari sarang koruptor.

1 Dipublikasikan Koran Republika, 07 November 2009

Untuk memuluskan perjalanan KPK supaya tidak lagi digoyang permasalahan. Anggodo Widodo, adik Aggoro Widodo, buronan KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SK RT), yang juga terkenal dengan kebal hukum. Posisinya setelah menjadi tersangka rekaman, secepat mungkin untuk dihakimi. Sebab tokoh itu merupakan pengatur skenario utama untuk memasukkan kedua pimpinan KPK ke penjara. Sebelum dia masuk ke penjara, para mafia lainnya akan turut memberikan perlawanan dan ancaman untuk mengjungkarbalikkan keadaan.

Kita pun menyaksikan secara bersama-sama proses perjalanan perseteruan di KPK. Bagaimana persekongkolan terjadi di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan Mahkamah Agung. Seakan keberadaan lembaga itu berada di tangan mafia yang lihai mengendalikan hukum. Proses penegakan hukum amat lambat dalam menyelasaikan kasus ini, sekali pun telah ada tanda rekayasa terhadap kedua pimpinan KPK. Keputusannya masih menunggu desakan dari publik untuk segera mengusutnya.

Melihat keadaan negara kita yang banyak mafia amat sulit untuk mengungkap para tangan setan yang cukup kuat di tanah air. Tidak heran kedudukan KPK yang baru dibentuk oleh pemerintahan SBY-JK secara perlahan-lahan kondisinya genting dengan banyaknya masalah, semuanya menusuk terhadap identitas lembaganya untuk dilemahkan.

Mengambil bahasanya Martin Luther King (1929-1968), Pemimpin Perjuangan Hak sipil Amerika Serikat, mengatakan ketidakadilan akan menjadi ancaman bagi keadilan. Terbukti dengan hadirnya KPK yang merupakan lembaga penegak keadilan. Akhir-akhir ini keberadaannya digoyang oleh para mafia. Mereka telah menyusun strategi supaya KPK tidak berjalan (non-aktif). Dalam catatannya, KPK sangat kuat dalam meburu para koruptor. Sekian banyak koruptor yang telah ditangkap dan tidak bisa lolos dari incaran KPK.

Sekalipun ada lampu hijau ditemukannya figur skenario pelemahan KPK. Tidak menunjukkan posisinya aman dari serangan. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, para mafia kian mengamuk dengan mencari strategi baru dan jitu. Sebab para mafia akan merasa terancam dengan ditemukan kawan persekongkolannya.

Jejak sementara untuk mengungkap konspirasi busuk itu adalah sosok yang tergabung dalam dialog rekaman rekayasa itu. Dia akan menjadi saksi sosok persekongkolan lainnya. Sehingga para mafia ke depan juga akan merasa ketakukan untuk melemahkan KPK yang mendapatkan pelindungan payung hukum.

Dukungan Pemerintah

Hari ini merupakan momen efektif untuk menunjukkan keseriusan Presiden SBY menangani KPK. Membuktikan pernyataan sebelumnya, yang bakal berdiri di garda depan bila ada upaya yang melelemahkan KPK. Saatnya untuk mereformasi kepolisian dan kejaksaan yang terlibat dalamnya. Kasus ini juga berkaitan dengan kejaksaan dan kepolisian.

Ingatkan sekali lagi, posisi KPK tidak akan aman dari bahaya. Aneka macam pengkerdilan akan datang secara berganti-ganti. Sehingga pejabat yang terlibat dalam rekayasa ini supaya dihentikan guna tidak menciptakan penyakit di internal KPK. Apalagi saat ini merupakan awal dari priode pemerintahannya. Setelah menghadapi tantangan yang cukup serius, presiden kurang menberikan jaminan penyelesaiannya, kecuali mendapatkan tekanan dari publik untuk segera menyelesaikannya.

Tugas presiden sekarang adalah mencopot pihak kepolisian dan kejaksaan yang terlibat dialog dengan Anggodo Widodo dalam rekaman itu. Kasus ini telah menbuat hukum Indonesia tercoreng dan rendah di mata masyarakat. Penegak hukum diklaim tidak optimal dalam menjalankan mandatnya. Oleh karena itu, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan kepolisian. Presiden secepat mungkin menyadap mereka untuk dinonaktifkan. Kedudukan mereka dalam struktur negara hanya menciptakan masalah.

Dukungan moral

Dukungan moral dari elemen masyarakat merupakan bukti kesediaannya terhadap KPK untuk tetap eksis menburu para koruptor. Namun dukungannya tidak cukup berhenti di sini. Jaminan keselamatan terhadap KPK belum teruji. Mengiringi langkah KPK ke depan patut mendapatkan dukungan dan pantauan serupa, bahkan semakin kuat.

Tantangan ke depan senantiasa menyelimutinya. Menjadikan posisinya dilematis dalam menjalankan roda kerjanya; bergerak diantara jurang keselamatan dan bahaya. Tidak bisa dipungkiri manakala tidak ada dukungan moral yang kuat. Kemungkinan besar secara beratahap maupun cepat, keberadaannya akan makin kacau. Dapat dikatakan, saat lembaga kejaksanaan dan kepolisian kurang memberikan jaminan terhadap KPK. Dukungan moral merupakan jalan salah satunya yang harus ditegakkan dan disatukan supaya gerakannya semakin kuat mengontrol perbagai permasalahan yang menimpa.

Secara sepintas, patut bertepuk tangan atas keseriusan elemen masyarakat menuntut keluarnya anggota pimpinan KPK. Mereka pantas mendapatkan apresiasi yang mempedulikan keadilan. Tuntutan semacam itu amat penting ditegakkan kembali setelah para aparat hukum dan kepolisian tidak manpu menunjukkan keadilan dan kebenaran. Dukungan dari bawah merupakan langkah efektif dalam mengungkap kebenaran. Dalam catatan sejarah menunjukkan, untuk mengubah nilai ketidakadilan oleh kekuatan penguasa, banyak direalisasikan melalui jalan dari bawah (rakyat) (baca: revolusi). Kesatuan dari seluruh elemen sosial, seperti lembaga keagamaan, sosial, politik dan lainnya mrupakan kunci utama keberhasilan perjalanan KPK ke depan.

Resolusi Pemberantasan Korupsi[2]

Oleh: Mohamad Fathollah

Ada yang menarik resolusi tahun 2012 dari pemerintah. Menanggapi banyaknya temuan kasus korupsi di berbagai struktur pemerintahan baik pusat atau daerah, wapres Boediono pada pada penghujung tahun di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (30/12/2011) mengumumkan akan lebih meningkatkan pemberantasan korupsi di berbagai elemen (terutama) dalam pemerintahan.

Langkah demikian barangkali dapat menjadi ukuran positif bagi perkembangan pemberantasan korupsi di negeri ini yang (seolah-olah) jalan di tempat. Bagaimana tidak, kasus-kasus besar korupsi belum menyentuh akarnya *(big fish)*. Selama ini yang terjerat kasus korupsi dan telah dipidanakan masih mengambang pada lapisan kulit. Belum mampu mengungkap keterlibatan mafia besar kerah putihnya *(big-white-collar)*.

Pemerintahan Indonesia Bersatu II yang berupaya menargetkan pencapaian indeks persepsi korupsi *(corruption perception index/CPI)*

2 Dipublikasikan Jurnal Nasional, Rabu, 12 Januari 2012

Indonesia mencapai 5,0 patut diapresiasi. Namun demikian, hal tersebut tidak lebih sama atau sebelas dua belas dengan beberapa kasus tahun-tahun sebelumnya, apabila tidak ada keinginan kuat dan kesadaran kemanusiaan secara massif dari berbagai elemen.

Dalam tataran struktural statistik CPI Indonesia pada tahun 2011 cukup menggembirakan. Terdapat peningkatan persepsi korupsi mencapai 3,00 atau meningkat 0,2 dari tahun sebelumnya. Sebagaimana menjadi rujukan *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* bahwa penerimaan statistikal CPI yang tinggi dari suatu negera mengindikasikan negera bersangkutan baik dalam upaya pemberantasan korupsi. Walaupun tidak begitu mengakar dan masih mengguritanya perilaku korupsi dari masyarakat, hal demikian sedikit banyak dapat menjadi tolak ukur keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Impian Welfare State

Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia sudah sangat akut, praktek korupsi setiap tahun kian bertambah. Tahun 2009 Indonesia berada di peringkat 126 negara terkorup di dunia dengan Indeks Prestasi Korupsi (IPK) sebesar 2,6. Pada saat yang sama survei *Political & Economic Risk Consultancy* (PERC) yang berbasis di Hongkong, menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup dari 16 negara Asia Pasifik. Posisi kedua ditempati Kamboja, kemudian disusul Vietnam, Filipina, Thailand, India, China, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Makao, Jepang, Amerika Serikat, Hongkong, Australia, dan Singapura sebagai negara yang paling bersih (Mendra Wijaya, 2010).

Dalam ukuran matematis barangkali pemberantasan korupsi di negeri ini semakin tahun semakin meningkat. Namun dari peningkatan tersebut adakah perubahan signifikan pada tata kelola birokrasi, pelayanan masyarakat, dan peningkatan sumber pendapatan masyarakat? Kalau tidak dikatakan sebagai orang pesimis, penulis beranggapan bahwa penanganan dan pemberantasan kasus korupsi tidak ubahnya melodrama politik kaum elit.

Tengok saja misalnya fluktuasi harga kebutuhan pokok di daerah yang belum stabil, semakin meningkatnya integrasi sosial di berbagai daerah, belum terjamahnya kasus korupsi di berbagai daerah dan ditambah lagi bebasnya para pimpinan daerah oleh Tipikor daerah. Hal tersebut walaupun tidak mempunyai hubungan langsung pada penanganan dan pemberantasan korupsi, namun demikian dapat menjadi ukuran sistemik dalam pemberantasan korupsi. Sebab tidak menutup kemungkinan adanya korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik disamping telah mencederai kemanusiaan, hal itu dapat berdampak sosial tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat. Bagaimana mengimpikan *welfare state* kalau korupsi masih menjadi darah dan daging elemen bangsa?

Semangat Baru

Langkah pemberantasan korupsi di negeri ini pada tahun 2011 cukup menggembirakan. Tertangkapnya Nazaruddin, Nunun, Gayus, dan lainnya dapat menjadi ukuruan keseriusan lembaga pembemberantas korupsi setingkat KPK dan Polri. Namun yang menjadi pertanyaan besar, akankah pada tahun 2012 dan tahun-tahun mendatang penanganan kasus korupsi lebih serius? Mengingat kasus korupsi yang disidangkan tipikor di daerah banyak yang bebas dan penanganan kasus korupsi besar seperti kasus Bank Century, cek pelawat, Wisma Atlet, dan lainnya belum ada kabar menggembirakan.

Rakyat cukup senang Nazaruddin kini disidangkan, namun akan lebih senang apabila kasus korupsi diusut tuntas hingga akarnya. Adanya testimoni tentang keterlibatan "bos besar" dalam sejumlah proyek negara misalnya, dapat menjadi pecut pasukan Abraham Samad di KPK untuk lebih tegas dalam melakukan pengusutan.

Memasuki tahun baru tentunya dapat menambah semangat baru yang lebih kokoh dalam memberantas tindak pidana kasus korupsi. Pada tahun ini pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 mengeluarkan enam strategi yang meliputi pencegahan pada lembaga

penegak hukum; pencegahan pada lembaga lainnya; penindakan; harmonisasi peraturan perundang-undangan; penyelamatan aset hasil korupsi; kerja sama internasional; dan pelaporan.

Semangat baru yang tercermin dari resolusi enam strategi pemberantasan korupsi tersebut seyogianya tidak hanya menjadi nafas baru, lebih dari itu menjadi gerak langkah dinamis dan progresif. Karena memberantas korupsi di Indonesia, membutuhkan kerja-kerja luar biasa. Apabila pertarungan terhadap segala bentuk korupsi di negeri ini setengah-setengah, pada gilirannya Indonesia menjadi negara *vulnerability* dan mudah di gempur oleh negara lain.

Disaat lembaga penegak hukum (baca: polri, kejaksaan, dan hakim) dipertanyakan dalam memberantas korupsi, maka menjadi penting mengagas kembali alternatif lain. Tidak hanya berfokus pada orang-orang di pemerintahan dalam memutus lingkaran korupsi. Menumbuhkan budaya antikorupsi dan kampanye anti korupsi di tengah-tengah masyarakat merupakan hal yang tidak kalah penting.

Karena hukuman pemutihan (mati) terhadap koruptor di negeri ini seakan sulit dilakukan, maka perlu alternatif perlawanan terhadap perilaku korupsi. Salah satu kesadaran tersebut ialah melakukan pemberantasan korupsi berbasis pendidikan anti korupsi dan *public harasment* atau demoralisasi terhadap para koruptor. Resolusi pemberantasan korupsi pada tahun-tahun mendatang yang paling efektif ialah menanamkan kesadaran perlawanan terhadap segala bentuk dan perilaku korupsi. *[f]*

Kawal Hibah Sampai ke Daerah[3]

Oleh Ahmad Maltup

Dalam rangka pengembangan kapasitas berkelanjutan untuk desentralisasi, 9 provinsi dan 37 kabupaten/kota mendapatkan dana hibah sebesar 43 juta dollar AS. Hibah yang diberikan oleh pemerintah pusat itu berasal dari pinjaman lunak Bank Pembangunan Asia. Seperti yang diungkapkan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Ngadisah, proyek ini dilaksankan sebagai salah satu upaya untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kabijakan desentralisasi dan otonomi daerah (Kompas, 24/12/2009).

Sudah menjadi wacana publik, praktik korupsi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia telah menjadi ideologi. Tidak terkecuali di daerah pasca pelaksanaan otonomi daerah semakin marak terjadi. Penangkapan 19 bupati/wali kota dan 5 gubernur karena kasus korupsi oleh KPK sepanjang 2004-2009 sejauh ini belum memberikan efek jera. Maka perlu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawal dana

3 Dipublikasikan Kedaulatan Rakyat, 19 Januari 2010

hibah tersebut guna mengantisipasi terjadinya praktik korupsi terjadi. Karena BPKP merupakan mitra pemerintah daerah dalam mengawasi penggunaan keuangan dan pembangunan daerah, terutama mencegah terjadinya korupsi.

Kasus teranyar praktik korupsi terjadi di Jawa Barat mengenai bantuan pembangunan perumahan nasional bisa dijadikan pelajaran. Kasus tersebut menggelapkan sekitar 30-60 persen dari 100 miliar dana yang dikucurkan. Andaikan saja kasus tersebut tidak terbongkar, berapa kerugian negara yang akan ditanggung dan berapa pejabat akan melakukan hal yang sama karena merasa aman dengan tidak tersentuh hukum

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra menemukan 10 modus penyalahgunaan dana APBD. Menurut The Habibie Center ada 20 modus korupsi yang berpeluang digunakan oleh anggota legislatif dan eksekutif di daerah. Tapi secara umum, hasil penelitian dua lembaga itu punya kesamaan: anggaran daerah sudah berpeluang dikorup sejak mulai dari perencanaan (usulan). Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang memberi kekuasaan besar untuk mengatur daerah, termasuk hak untuk mengatur anggaran rupanya telah dipahami secara salah kaprah oleh pelaksana eksekutif dan yudikatif di daerah. Sementara di sisi lain, undang-undang tersebut tidak mengatur mekanisme pertanggungjawaban yang transparan kepada publik. Maka tidak salah jika kemudian wewenang yang besar itu justru melahirkan banyak penyimpangan, seperti mengalirkan dana negara ke kantong pribadi— tentu bukanlah hal yang mengherankan.

Catatan dari Indonesian Corruption Watch (ICW) menunjukkan, sampai 2004 sudah lebih dari seratus perkara korupsi yang melibatkan para anggota DPRD di seluruh Indonesia. Sebanyak 1.500-an orang telah diproses secara hukum: Sebagian dalam tahap penyelidikan, sebagian sudah disidik dan sisanya menjalani hukuman. Mereka umumnya didakwa telah melanggar PP No. 110 tahun 2000. Itulah peraturan yang dibuat agar dalam menyusun APBD, para anggota DPRD dan pejabat pemerintah daerah memperhatikan asas kepatutan antara anggaran publik dan

anggaran kesejahteraan anggota. Asas kepatutan itu antara lain termasuk kejelasan penggunaan dari setiap rupiah dana APBD.

Berantas Korupsi

Pemberantasan korupsi sejak era Reformasi telah melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama pada 1998-2002, melaksanakan kebijakan hukum dalam pemberantasan korupsi untuk memenuhi janji reformasi, terutama terhadap mantan presiden Soeharto dan kroni-kroninya, dan dilanjutkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi empat bidang, yaitu hukum di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan; hukum di bidang politik; hukum di bidang sosial; serta hukum di bidang hak asasi manusia. Seluruh perundang-undangan dalam keempat bidang hukum tersebut telah diselesaikan dalam kurun waktu empat tahun pertama, disusul dengan beberapa perubahan atas perundang-undangan tersebut, yang telah terjadi dalam kurun waktu dua tahun selanjutnya sampai 2004.

Kalau merunut dari sejarahnya, penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1960-an, dan telah berganti undang-undang sebanyak 4 (empat) kali, dan terakhir dengan UU Nomor 20 tahun 2001. Sekalipun pergantian undang-undang sebanyak itu akan tetapi filosofi, tujuan dan misi pemberantasan korupsi tetap sama. Secara filosofis, peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi menegaskan bahwa, kesejahteraan bangsa Indonesia merupakan suatu cita bangsa, dan sekaligus cita pendiri kemerdekaan RI yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945, dan diadopsi ke dalam sila kelima dari Pancasila.

Oleh karena itu, setiap ancaman dan hambatan terhadap tercapainya kesejahteraan bangsa ini merupakan pelanggaran terhadap cita bangsa. Akan tetapi sebagai suatu negara hukum, langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dilandaskan kepada asas kepastian hukum dan seoptimalnya dilandaskan kepada cita keadilan sebagai cita hukum sejak zaman Yunani. Landasan yuridis, adalah UUD 1945 sebagai "*grund-*

norm" (hukum dasar) yang seharusnya diwujudkan ke dalam suatu UU yang mencerminkan cita dan tujuan hukum sebagaimana diuraikan di atas.

Perlu dikaji sejauh mana UU Pemberantasan Korupsi (UUPK) telah mencerminkan asas-asas hukum dan cita hukum dimaksud. Landasan sosiologis dari penegakan hukum pemberantasan korupsi adalah bahwa, kemiskinan yang melanda kurang lebih 35-50 juta penduduk Indonesia masa kini adalah disebabkan karena korupsi yang telah bersifat sistemik dan meluas ke seluruh lapisan birokrasi (30 % dana APBN terkuras karena korupsi), dan tidak lepas dari pengaruh timbal balik antara birokrasi dan sektor swasta.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi bukanlah sekedar aspirasi masyarakat luas melainkan merupakan kebutuhan mendesak (*urgent needs*) bangsa Indonesia untuk mencegah dan menghilangkan sedapatnya dari bumi pertiwi ini karena dengan demikian penegakan hukum pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengurangi dan seluas-luasnya menghapuskan kemiskinan.

Bertolak dari ketiga landasan politik pemberantasan korupsi di Indonesia di atas, langkah penegakan hukum pemberantasan korupsi merupakan kewajiban bersama. Bukan hanya BPKP sebagai pengawas tindak korupsi di daerah, melainkan juga seluruh komponen bangsa dengan bimbingan dan tauladan para pemimpin bangsa ini, mulai dari Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, wakil presiden sampai kepada pimpinan birokrasi di daerah, lembaga legislatif dan judikatif. Tidak kurang pentingnya juga peranan masyarakat sipil (*civil society*) dalam mendorong, monitoring dan evaluasi keberhasilan pemberantasan korupsi.

BAB VII

GERAKAN SOSIAL INDONESIA

PMII dan Keberagamaan Multikulturalis[1]

Oleh: Imam S Arizal

Setengah abad yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 April 1960, para kaum muda Nahdlatul Ulama (NU) dari berbagai daerah berkumpul di Surabaya memperbincangkan arah gerakan kader-kader muda NU di tingkatan mahasiswa. Pada hari itu pula didirikanlah suatu wadah gerakan kaum muda NU yang hari ini kita kenal dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Keberadaan PMII tidak bisa dilepaskan dari NU. Meskipun dalam dinamikanya, PMII pernah independen dari NU lantaran NU menjadi partai politik. Hari ini PMII dan NU kini berhubungan secara interdependen yang masih terkait secara ideologis, emosional dan kultural walaupun tidak secara struktural. PMII menjadikan aswaja (*ahlus sunnah wal jama'ah*) sebagai metode berfikir (manhaj al-fikr) dan metode pegerakannya. Ada empat prinsip aswaja yang menjadi landasan gerak PMII yaitu *tawasuth* (moderat), *tawazun* (seimbang), *tasamuh* (toleran) dan *ta'addul* (adil).

1 Dipublikasikan NU Online, 21 April 2011

Selama setengah abad PMII telah banyak memberi kontribusi besar terhadap bangsa, negara, dan agama. PMII sudah melahirkan banyak pemimpin, cendikiawan, akademisi, peneliti, dan sebagainya. Mereka menyebar di seantero jagad nusantara. Keberadaan PMII menjadi tonggak penting dalam menentukan sinar peradaban islam Indonesia. Kehadiran PMII yang lahir dari rahim NU memiliki perspektif yang berbeda mengenai keislaman, kebangsaan, dan persatuan sesama umat Islam.

Paham plularisme telah mewarnai pemikiran ulama-ulama NU terdahulu sejak mereka membentuk Komite Hijaz dan mendelegasikan perwakilannya ke Kongres Dunia Islam di Makkah untuk memperjuangkan kepada Raja Ibn Saud agar hukum-hukum menurut empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) mendapat perlindungan dan kebebasan dalam wilayah kekuasaannya. Paham pluralisme ini menjadi titik awal masyarakat NU dan PMII untuk menghargai perbedaan, baik perbedaan pemikiran, keyakinan, bahkan perbedaan agama sekalipun.

Sebuah Tantangan

Beberapa tahun terakhir, citra agama kian jatuh dalam keterpurukan. Agama sekan menjadi momok yang menakutkan. Teror dan segala bentuk kekerasan lainnya seringkali terjadi dengan label keagamaan. Di tingkat nasional, aksi-aksi kekerasan atas nama agama juga sering terjadi. Harian Kompas (14/2/2011) mencatat ada 17 aksi kekerasan yang bernuansa SARA. Penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten (6/2) dan pembakaran sebuah Gereja di Temanggung, Jawa Tengah (7/2) menjadi potret buram keberagamaan kita. Nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme yang menjadi ruh dari kebangsaan kita (Bhinneka Tunggal Ika) seakan runtuh dari kehidupan masyarakat.

Inilah yang harus disikapi secara serius oleh kader-kader PMII kedepan. Sebagai organisasi kemahasiswaan yang besar, PMII memiliki tanggungjawab sosial yang tinggi untuk kemudian menjaga serta merawat aneka ragam kekayaan bangsa ini yang berupa pluralisme dan multikulturisme.

Keberagamaan Multikulturalis

Adalah tugas kader PMII dan NU untuk terus merawat multikulturalisme guna mewujudkan kerukunan umat beragama. Multikulturalisme pada dasarnya merupakan kekuatan pemikiran yang memandang adanya berbagai pluralitas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum, maupun agama. Prof. Dr. Musa Asy'arie (2010) mengemukakan bahwa jika pemikiran multikulturalisme terjaga, maka akan terjadi pengkayaan spititualitas untuk memperkuat pandangan kesatuan dalam keberagamaan yang sesungguhnya telah mendasari bagi kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara.

Menurut Muhammad Ali (2003), seorang multikulturalis tidak beragama secara mutlak-mutlakan. Artinya, ketika klaim kebenaran yang dianutnya dilihat dari luar, maka ia menjadi tidak mutlak. Ini bisa disebut dengan sikap keberagamaan *'relatively absolute'*—dengan mengatakan, "Aapa yang saya anut memang benar dan saya berjuang untuk mempertahankannya, tetapi tetap saja relatif ketika dihubungkan dengan apa yang dianut orang lain, karena orang lain melihat apa yang saya anut dari kacamata anutan orang lain itu." keberagamaan mutlak-mutlakan dalam banyak kasus cukup berbahaya dalam konteks interaksi antar-agama dab antar-budaya. Klaim kebenaran absolut merupakan benih dari tumbuhnya fundamentalisme radikal yang bisa membenarkan segala cara.

Keberagamaan multikulturalis lebih menitik beratkan pada makna, bukan simbol semata. Simbol bukan tidak penting, tetapi terkadang simbol-simbol keagamaan hanya melahirkan ketegangan-ketegangan yang berakhir dengan benturan dan kekerasan agama. Di sinilah kemudian pentingnya memahami bahwa esensi dari beragama bukan terletak pada simbol dan ritualisme semata, melainkan sejauh mana kita mampu membumikan ajaran-ajaran agama sehingga agama tersebut menjadi rahmat bagi seluruh alam *(rahmatan lil alamin)*.

Setidaknya ada dua hal penting yang menjadi kelebihan kader-kader PMII dalam merawat spirit multikulturalisme. *Pertama*, PMII memiliki

banyak kader yang menyebar di seluruh nusantara. Mereka lahir dari kebudayaan dan tradisi keagamaan yang berbeda-beda. Di daerah masing-masing para keder PMII bisa menjadi agen perdamaian dan pemersatu ummat yang berjuang untuk saling menghargai perbedaan; saling menghormati satu dengan yang lain; adanya rasa kepedulian sosial antara anggota suatu komunitas; dan terjalinnya kerja sama atas dasar kesadaran untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan yang terjadi di lingkungannya.

Kedua, kader-kader PMII mewarisi khasanah ke-NU-an sangat mudah untuk menafsirkan. Kader-kader PMII yang notabene lulusan pondok pesantren tidak hanya belajar *fiqh,* melainkah juga *ushul fiqh, qawaidul fiqhiyah, maqosidussyari'ah, dan ilmu mantiq*. Dari tradisi yang kuat itulah kemudian cara pandang kaum nahdliyyin (PMII) relatif lebih fleksibel dan moderat.

Salah satu contoh dari sikap fleksibilitas orang NU adalah dengan mudah menerimanya terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Oleh ulama-ulama NU, Pancasila sebagai dasar negara dianggap sudah final. Pancasila tidak bertentangan dengan *maqosidussyari'ah,* dimana Syariat Islam dipahami dalam lima wujud, yaitu menjaga agama, menjaga akal sehat, menjaga harta benda, menjaga kehormatan dan keturunan.

Keunggulan yang dimiliki kader-kader PMII ini kiranya menjadi modal dasar untuk menanamkan pemahaman keagamaan yang moderat di tengah-tengah masyarakat. Bersama dengan NU, PMII harus berada di garda depan untuk terus menanamkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian, khususnya di kalangan pemuda. Komitmen dan perjuangan kaum muda ini jika dilakukan secara kontinyu dan *sustinable* akan menentukan nasib keberagamaan kita, keberagamaan yang multikulturalis.

Arti Demonstrasi bagi Demokrasi[2]

Oleh: Imam Musthafa

Demonstrasi telah mewarnai satu tahun kinerja pemerintahan SBY-Boediono yang dinilai mengalami kegagalan. Terlihat dari 24 kota di tanah air, selain Jakarta, yaitu, Bandung, Bogor, Semarang, Solo, Sukoharjo, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Makasar dan lain-lain. Aksi yang disuarakan oleh para demontrasi adalah masalah politik, hukum, sosial, dan ekonomi, dan penyelesaian kasus century yang belum dituntaskan oleh Presien SBY-Boediono.

Model yang diekspresikan oleh para demonstan saat di tengah jalan, seakan-akan mereka memiliki leluasa dengan melakukan berbagai cara, sekiranya dapat merebut perhatian publik. Yaitu, membakar ban, menutup jalan, serta memasang berbagai atribut dan bendera. Adapun peserta unjuk rasa kebanyakan dari kalangan mahasiswa, LSM, dan organisasi massa. Tidak heran manakala sempat terjadi tindakan saling dorong-mendorong antara peserta demonstran dan aparat kepolisian.

2 Dipublikasikan Bali Post, 23 Oktober 2010

Melihat geliat demonstrasi yang makin berkecamuk, seolah-olah demonstrasi menjadi solusi tunggal bagi rakyat Indonesia dalam menyampaikan aspirasinya. Akibatnya, setiap terjadi berbagai polemik dan kegagalan dalam membangun negeri ini. Germa demonstran senantiasa mewarnai ke permukaan. Itu merupakan bentuk dari kekecewaan rakyat terhadap para jajaran kabinet yang tidak serius dalam menanganinya.

Lantas, kenapa suara demonstrasi makin melonjak dan tidak pernah pupus? Terkadang perjuangannya dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Memang ini merupakan dampak sejarah 1998, aksi yang sempat menggulingkan pemerintahan otoriter Soeharto (Orde Baru), yang melahirkan era reformasi besar-besaran di negeri ini. Masyarakat tidak takut lagi akan ancaman dari pihak pemerintah demi tercapainya sebuah pemerintahan yang baik.

Mengurai demontrasi, tampaknya penting mengurai sejarah Indonesia. Dalam catatannya, mahasiswa terlihat berperan besar sebagai kaum *Creative minority*. Arnold Toynbee mengatakan, mahasiswa selalu menjadi motor penggerak perubahan sejarah Indonesia. Terbukti, saat peristiwa tumbangya Soeharto. Akibatnya prestasi tersebut mengokohkan kredibilitas predikat mahasiswa sebagai *agent of change* (baca: Mahasiswa).

Dengan demikian, ramainya aksi demonstrasi tidak bisa dipisahkan dari liberalisasi politik yang diadopsi oleh berbagai negara demokrasi. Setiap individu memiliki hak dan kebebasan berekspresi secara resistensif. Fenomena tersebut menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson mengatakan, partisipasi politik yang meluas ini adalah ciri khas dari modernisasi politik.

Indonesia telah termakan dengan uforia kebebasan tersebut. Batas-batas hukum diinjak untuk dapat memenuhi aspirasinya. Tidak mempedulikan stabilitas nasional yang rusak. Impian bagi para demonstran adalah menggebol aspirasinya terhadap pemerintah yang melalaikan aspirasi rakyat. Karena amat kesulitan bagi rakyat dalam menyuarakan asprasinya untuk didengar oleh pemerintah.

Para demonstran tidak memperdulikan nasihat presiden untuk melakukan aksi perdamaian. Tujuannya tidak merusak stabilitas keamanan. Konsekuensinya negara akan menelan kerugian. Pidato politik yang sering diutarakan tidak masuk ke hati rakyat. Terbukti hingga kini masyarakat masih getol meneriakkannya. Dengan langkah unjuk rasa manakala direspon dengan baik, gerakan demonstrasi merupakan bentuk gebrakan terhadap pemerintah yang terlena dengan jabatan. Seringkali, para wakil rakyat tidak mempedulikan nasib rakyat manakala tidak di desak dengan gerakan-gerakan yang sifatnya anarkis.

Sesuai dengan pendapat Daniel T. Sparingga mengatakan, setelah tumbangnya rezim Soeharto yang mamsauki masa kritis. Masa depan Indonesia tidak lagi ditentukan sepenuhnya oleh apa yang berkembang pada tingkat negara tetapi terutama oleh apa yang sedang terjadi dalam *civil society* dan bagaimana *cicvil society* merespon apa yang sedang terjadi pada tingkat Negara. Benar sekali ketika melihat perjalanan kondisi negara hingga sekarang. Kontrol dari masyarkat tanpa henti dilakukan, karena negara tidak mampu menciptakan perubahan yang dinamis dan masif, bahkan kian menunggagi hak rakyat.

Demokrasi

Setelah mereka merealisasikan demonstrasi, mampukah mereka membangun demokrasi yang lebih baik atau sebaliknya, memperlemah sistem demokrasi. Sementara perbagai pihak pesimis, serta apatis terhadap gerakan kaum demonstran yang senantiasa bersifat anarkis, tidak memainkan politik demokratis.

Bila ditelusuri lebih mendalam, sebenarnya para demonstran mengidolakan politik anarkis tidak terlepas dari ambruknya politik dalam negeri. Para wakil rakyat masih belum bisa menciptakan stabilitas politik yang menbangun terhadap sistem demokrasi. Tidak layak untuk disalahkan manakala rakyat bergerak melalui jalur demonstrasi yang sifatnya anarkis.

Sistem demokrasi tidak sepenuhnya dipasrahkan kepada pemerintah, menpermudah mereka dalam menerapkan rezim yang otoriter. Sejatinya dalam demokrasi menbutuhkan keseimbangan dari pihak oposisi. Sekiranya dapat menciptakan jalannya pemerintahan yang stabil dan memihak terhadap rakyat.

Meminjam istilah Arief Budiman, demokrasi pada akhirnya kembali kepada bangkitnya kekuatan masyarakat untuk mengimbangi kekuatan negara. Demokrasi tidak bisa diandalkan kepada sang pemimpin karena demokrasi yang tidak berdasarkan kekuatan rakyat merupakan demokrasi yang rapuh.

Pemerintahan Orde Baru menjadi bukti demokrasi kita rapuh. Oleh karenanya, ke depan menbutuhkan kontrol dari rakyat secara ketat demi menciptakan sebuah perubahan yang lebih baik—menggapai kesempurnaan sistem demokrasi. Tidak mempedulikan berapa kerugian yang ditelan negara, intinya misi utama yang ditawarkan manpu memberikan peringatan terhadap pemerintah.

Sebagai catatan penting, pasca menbeludaknya reformasi 1998, kesahihan politik belum tergapai. Tidak berlebihan bila tindakan anarkis kian merajalela di perbagai daerah. Sejatinya mereka menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Sementara jalan perdamaian dalam menuntut aspirasinya kurang direspon secara baik oleh pemerintah.

Apakah rakyat, lebih khusus mahasiswa tidak beretika bila melakukan aksi kriminal secara besar-besaran? Tindakan mereka melakukan konsolidasi demokrasi. Karena tidak ada bentuk solusi lain, untuk merubah Indonesia kecuali dengan demonstrasi. Fenomena semacam itu tidak bisa dielakkan selama kesahihan politik dapat tercipta dengan baik.

Untuk itu, bila para wakil rakyat berkehendak untuk menghentikan sistem perlawanan politik secara anarkis. Pihak pemerintah berintropeksi terlebih dahulu. Apakah tindakan dan programnya berada di jalur yang benar atau tidak. Rakyat tidak akan berbuat semena-mena dalam bergerak manakala pihak pemerintah bersikap adil dan profesional.

Patut bersukur atas lahirnya berapa golongan yang memiliki kesadaran berpolitik tigggi terhadap negara. Menunjukkan kecerdasan rakyat dalam melihat pencaturan politik pemerintah. Untuk itu, selama visi dan misi pemerintah belum tercapai, mereka tidak akan kenal lelah melakukan perjuangan demi tergapainya kesahihan demokrasi. Sekalipun dirinya telah menjadi korban akibat tekanan dari aparat keamanan.

Aktifis La Raiba Fihi[3]

Oleh: Muhammad Arif

Adalah kerugian besar kalau menjadi mahasiswa hanya untuk kuliah. Ada banyak hal positif, penunjang kesuksesan studi, yang dapat dilakukan mahasiswa dalam masa belajarnya. Salah satunya adalah dengan bergerak aktif di organisasi (baca: politik mahasiswa).

Namun, belakangan ini minat mahasiswa untuk mendedikasikan diri mereka menjadi aktifis politik di kampus menunjukkan angka yang memprihatinkan. Ada berbagai alasan berkaitan dengan semua itu. *Pertama,* menjadi aktifis politik di kampus jelas memiliki banyak konsekuensi, seperti terlambat lulus dan harus ekstra keras mengatur jadwal hidup. Sementara dewasa ini kampus mulai bergerak pragmatis. Biaya kuliah mahal, dan menuntut mahasiswa harus fokus terhadap kuliah dan lulus tepat waktu. *Kedua,* kencangnya arus globalisasi telah membuat budaya hedonis menjangkiti banyak mahasiswa dan membuat mereka individualis.

3 Dipublikasikan Suara Merdeka, Sabtu, 1 Oktober 2011

Menjadi aktifis atau tidak selama masa kuliah memang pilihan masing-pasing pribadi mahasiswa. Tetapi, pilihan untuk sekedar duduk manis di bangku kuliah lalu pulang begitu saja adalah tindakan kurang bijaksana. Karena dengan demikian, mahasiswa yang bersangkutan telah teralienasi dengan dirinya.

Argumen di atas tentu tidak berlebihan. Kita tahu, manusia secara kondratnya adalah makhluk sosial. Dalam organisasi kampus mahasiswa tidak hanya dididik untuk mengikuti ideologi tertentu, melainkan juga digiring untuk memperkuat silaturahmi. Dalam organisasi kampus mahasiswa diajak untuk mengukuhkan budaya komunalisme dan gotong royong yang pada hakikatnya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Jika kemudian, manusia (mahasiswa) enggan bergerak di sana, maka dapat dipastikan dia adalah seorang yang egois dan individualis karena enggan mendedikasikan dirinya dan kemampuannya untuk orang lain.

Masalah tidak lulus tepat waktu atau nilai kuliah anjlok karena harus berbagi waktu dengan organisasi, itu memang konsekuensi. Namun, perlu diingat kita berangkat kuliah tidak sekedar untuk mencari selembar ijazah, melainkan kematangan hidup. Oleh karena itu, yakinlah bahwa dengan aktif di organisasi, meski kita tidak lulus tepat waktu, kita akan lulus dengan lebih matang karena kita lulus pada waktunya bukan sekedar tepat waktu. *Waallahu a'lam*.

Menjaga Komitmen Gerakan[4]

Oleh: Romel Masykuri

Dalam balutan isu kenaikan harga BBM, arah pergerakan mahasiswa menemukan satu persepsi yang sama dan terpusat, yaitu menolak kenaikan harga BBM. Kita seakan kembali pada masa silam pada era 1998, di mana seluruh mahasiswa bergerak bersama dalam satu komitmen untuk segera menggulingkan rezim Soeharto yang otoriter.

Di seluruh daerah, baik kota maupun desa. Mahasiswa bergerak bersama untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, yaitu menolak kenaikan harga BBM yang dinilai sangat mencekik. Tak ada ketakutan dan kegetiran dalam gerak mereka. Semua berubah menjadi kobaran revolusi dan penyemangat. Terik matahari ibarat sinar rembulan yang dingin.

Api yang berkobar menjadi pemicu jiwa revolusioner mahasiswa. Nyanyian (orasi) berkumandang indah di tengah embusan udara. Tidak sedikit resiko yang harus dihadapi oleh mahasiswa. Ada yang luka di

4 Dipublikasikan Republika, 4 April 2012

kepala, ada yang patah tangan, dan bahkan ada pula yang meninggal. Represifitas aparat kepolisian sudah disadari oleh mahasiswa sebagai konskuensi dari gerakan jalanan.

Tapi, inilah mahasiswa, yang tidak sedikitpun gentar dan takut dalam melakukan gerakan sosial. Mulai dari prakemerdekaan, orde lama, orde baru, reformasi, sampai pada transisi demokrasi, mahasiswa selalu ada di garda depan dalam proses perjuangan sosial. Dalam fase inilah, stagnasi gerakan mahasiswa yang didengungkan oleh beberapa kalangan kembali bangkit dan menemukan musuh bersama (*common enemy*) dengan isu BBM.

Ya, disadari atau tidak, isu BBM ini telah menyatukan gerakan mahasisiwa yang beberapa tahun ini tidur pulas ditengah hiruk pikuk kebangsaan. Sekalipun ada gerakan, skalanya tidak sebesar efek isu BBM ini. Sehingga, disatu sisi rencana kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM menjadi obat jitu bagi gerakan mahasiswa untuk bangkit dan melakukan gerakan.

Mahasiswa tidak lagi menyoalkan kembali dari mana ia berasal (bendera organisasi). Seluruh elemen gerakan mahasiswa bersatu bersama dalam perbedaan dengan mengusung komitmen yang sama. Diskursus sosialpun terjadi dengan dialektik dan berakhir dengan penyikapan konkrit di jalanan.

Kenapa gerakan parlemen jalanan menjadi pilihan utama dalam penyikapan? Rasionalisasi yang diberikan pemerintah sudah tidak bisa dihadapi dengan jalan lain, kecuali aksi massa. Mahasiswa sudah sangat gerah dan apatis akan sikap pemerintah yang dinilai tidak peka terhadap penderitaan rakyat kecil. Mahasiswapun bergejolak.

Kiranya tepat ungkapkan tokoh revolusioner Tan Malaka (1926) dalam buku Aksi Massa, bahwa revolusi atau perubahan hanya bisa dilakukan dengan gerakan massa, dan dalam hal ini pelopornya adalah pemuda/mahasiswa. Pendek kata, gerakan mahasiswa sudah kembali pada garis jalan yang sesunggunya, yaitu *agen force* dan menjalankan kontrol sosial.

Di mana, kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat menjadi objek mahasiswa untuk dilawan.

Gerakan Kedepan

Tahun 2012 ini menjadi sejarah baru bagi mahasiswa dalam kebangkitannya. Setidaknya, perjuangan yang dilakuakan mahasiswa dalam penolakan kenaikan harga BBM sudah menyadarkan para penguasa negeri ini, bahwa kaum mahasiswa masih berada di garis idealis dalam mengawal proses pembangunan bangsa.

Walaupun kepastian (harga) BBM masih menggantung, ditandai dengan keputusan Sidang Paripurna DPR RI yg memilih opsi memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur harga BBM mengikuti mekanisme pasar selama 6 bulan kedepan, namun sekali lagi isu BBM telah membangkitkan semangat perlawanan mahasiswa terhadap anomali kekuasaan. Gerakan anti kenaikan harga BBM bukan hanya sekedar aksi (parlemen) jalanan, namun juga telah mempertemukan emajinasi dan kekuatan mahasiswa di pelbabagai daerah. Artinya, komitmen gerakan ini perlu dipertahankan kedepan.

Setidaknya, masih banyak lahan garapan kedepan yang perlu dilakukan oleh gerakan mahasiswa kedepan. Ada dua arus gerakan yang harus diperkuat oleh gerakan mahasiswa. Pertama, intlektual pengkaderan dan kedua advokasi. Intelektual pengkaderan diarahkan tidak hanya untuk memperkuat pengetahuan para kader gerakan, tapi juga merebut dan menguasai wacana di media massa dan jurnal ilmiah.

Perebutan wacana ini sebagai pengimbang atas maraknya pembentukan kesedaran publik lewat media massa yang cenderung politik dan jauh dari transformasi pengetahuan. Sehingga mahasiswa juga bertanggung jawab memberikan pemahaman kepada publik lewat media massa dengan cara mendistribusikan pengetahuannya lewat sebuah karya.

Selanjutnya, advokasi bisa diarahkan ke ranah pemberantasan korupsi dan kebijakan publik. Memang sudah banyak LSM yg bergerak di wilayah

ini, tapi menurut saya, gerakan mahasiswa bisa memberi warna yang lebih tajam dan kritis sebagai kaum idealis dan murni atas kepentingan masyarakat.

Yang lain adalah isu pemberdayaan lingkungan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan, dan problem sosial lain yang berkenaan dengan kebutuhan rakyat kecil penting untuk diadvokasi dan diberdayakan, baik dalam bentuk kerja sama dengan pemerintah, swasta maupun independen.

Terakhir, terlepas dari pro dan kontra atas gerakan perlawanan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam penolakan kenaikan harga BBM beberapa minggu kemaren, konsistensi dan komitmen kesatuaan gerakan yang sudah mapan ini perlu dipertahankan oleh seluruh elemen gerakan mahasiswa di Indonesia.

Disorientasi Gerakan Mahasiswa[5]

Oleh: Mohamad Fathollah

Rubrik Gelanggang Kompas, Jumat (19/3), mengulas tentang disorientasi gerakan mahasiswa. Berdasarkan analisis "tindakan anarkis" demonstrasi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, secara mendasar, tulisan itu seakan mendistorsi gerakan mahasiswa secara umum. Apalagi adanya komentar sinis Ari Sujito, sebagai narasumber primer, yang mengatakan gerakan mahasiswa sekarang tidak mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Menurut hemat saya, Ari terlalu dini menilai hakikat gerakan mahasiswa dan seakan-akan mengeliminasi ideologi gerakan mahasiswa.

Ari mengatakan, gerakan mahasiswa mengalami disorientasi dan tak memiliki tujuan yang jelas. "Mereka kehilangan peran sejak pemerintahan bergeser dari pemerintahan yang cenderung otoriter menjadi lebih demokratis. Peran mahasiswa dulu mengkritisi pemerintah karena masyarakat tidak mampu mengkritik, sekarang peran itu diambil alih

5 Dipublikasikan Kompas, Senin, 22 Maret 2010

media massa, lembaga swadaya masyarakat, maupun elemen masyarakat lainnya." (Kompas, 19/3)

Meski di beberapa hal pernyataan itu realistis, kita dapat berpikir lebih jauh tentang hakikat sebuah gerakan bahwa ada bagian-bagian yang kadang kita abai terhadapnya. Misalnya, mengenai tujuan, di mana pun dan hingga kapan pun tujuan gerakan sosial, demonstrasi, dan aksi yang melibatkan massa yang masif adalah satu, yakni menentang segala bentuk ketidakadilan dalam segenap aspeknya. Terlepas dari akibat negatif (anarkisme, misalnya) yang muncul di sela-sela aksi tidak dapat digeneralisasi dan dikreasikan pada ranah ideologi massa aksi.

Dewasa ini, banyak kalangan menyangsikan arah gerakan mahasiswa. Pasca reformasi 1998, gerakan sosial di Indonesia yang dipelopori (mayoritas) mahasiswa saat ini dipandang tak lebih sekadar kerumunan massa. Tujuan dan idealisasi ideologi dipandang jadi barang dagangan. Apalagi maraknya unjuk rasa kalangan mahasiswa yang berujung anarkis semakin mengerucutkan anggapan negatif masyarakat

Hal demikian terekam dari sejumlah aksi yang menggejala di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa mantan aktivis mahasiswa zaman Soeharto, misalnya, (Ari Sujito juga mengklaim dirinya aktivis 1998), sangsi pada gerakan mahasiswa yang akhir-akhir ini diberitakan negatif. Tindakan anarkisme yang terjadi di Makassar antara mahasiswa dan polisi, demonstrasi yang berujung perusakan infrastruktur di Jakarta perihal kasus Century, atau lainnya dipandang sebagai aksi membabi buta.

Kalau kita hanya melihat dengan mata telanjang sejumlah demonstrasi mahasiswa akhir-akhir ini dan buru-buru menilai gerakan anarkisme massa aksi di sejumlah daerah sebagai gerakan yang tidak mempunyai nilai dan arah yang pasti, saya pikir harus kita lihat konteksnya terlebih dahulu. Kalau kita bandingkan, aksi mahasiswa 1965-1966, 1972-1974, atau yang lebih masif demonstrasi 1997-1998 juga melahirkan anarkisme massa. Jadi, realitas anarkis tidaklah menjadi ukuran formal buntunya gerakan mahasiswa. Saya yakin, gerakan yang dilandasi niat dan mapping yang

jelas tak akan melahirkan tindakan anarkis. Kalaupun ada hanya bagian kecil massa aksi serta *out of control*.

Sikap konfrontatif gerakan mahasiswa dapat dikategorikan gerakan revolusioner. Hal ini karena gerakan itu dilakukan secara masif dan terstruktur dengan tujuan dan arah yang jelas. M Fadjroel Rahman (2006) menyebut gerakan 1998 sebagai tindakan peran oposisi ad hoc gerakan mahasiswa. Misalnya, perlawanan mahasiswa terhadap keotoriteran Orde Baru yang memicu sejumlah aksi mahasiswa di seantero negeri.

Gerakan revolusioner itu dapat juga kita identifikasi pada gerakan mahasiswa 1956 dan 1966 dengan tujuan penumbangan Orde Lama yang otoriter. Atau mosi tidak percaya pada pemerintah yang dikobarkan 1974. Gerakan ini menampilkan Arif Budiman, Adnan Buyung Nasution, dan Asmara Nababan sebagai garda depan gerakan antipemerintah.

Hingga era pemberlakukan NKK/BKK pada 1978 sebagai pengerdilan gerakan mahasiswa yang masif mencapai puncak pada 1990. Upaya pemerintah mengebiri gerakan mahasiswa dilakukan dengan berbagai cara, termasuk memasukkan pasal-pasal dan ketentuan khusus pada normalisasi kehidupan kampus. Akan tetapi, hal itu tak menyurutkan aksi mahasiswa dengan menumbangkan era Orba pada 1998.

Melihat gerakan mahasiswa yang masif sejak kemerdekaan hingga masa reformasi yang penulis kemukakan di atas dapat dikatakan sebagai gerakan murni kontrol sosial-politik. Hal itu berjalan efektif karena massa aksi (mahasiswa) mempunyai musuh bersama (*common enemy*) yang harus segera tumbang, yakni pemerintah dan segala kebijakan otoritatif Orba.

Musuh bersama

Yogyakarta adalah lumbung gerakan mahasiswa. Tidak hanya demonstrasi yang dapat dilakukan mahasiswa dalam melawan ketidak-adilan dan diskriminasi. Cara lain, misalnya gerakan literasi, *entrepreneurship*, dan gerakan yang lagi marak, adalah gerakan sosial berbasis *cyberspace*.

Kalau kita bandingkan gerakan mahasiswa sebelum reformasi dengan realitas gerakan mahasiswa pascareformasi, jelas-jelas penggambarannya sedikit berbeda. Tiap aksi massa mempunyai sejarah sendiri. Tidak dapat dibanding-bandingkan gerakan mahasiswa saat ini dengan satu dasawarsa yang lalu. Mengatakan yang sekarang salah dan yang terdahulu benar adalah sikap apatis. Sebab hingga kapan pun gerakan mahasiswa murni sebagai media perubahan. Terlepas dari motifnya politis atau ideologis. Yang pasti, gerakan mahasiswa mempunyai tujuan bersama menumbangkan ketidakadilan dan segala macam bentuk diskriminasi.

Demonstrasi adalah salah satu kehidupan mahasiswa di luar kampus. Hakikat demonstrasi yang kerap kali dilakukan baik oleh kalangan buruh dan mahasiswa merupakan aksi dari reaksi yang diterima atas sejumlah ketidakadilan, diskriminasi, alienasi, dan pengerdilan yang dilakukan pemerintah, penguasa (korporasi) atau siapa pun. Ini karena mahasiswa mempunyai peran ganda; sebagai insan akademik serta sebagai agent of social control.

Pemicu dan motif gerakan mahasiswa mungkin dapat berbeda. Tapi, musuh bersama gerakan mahasiswa yang dikatakan hilang dengan dibukanya gerbang demokratisasi politik hingga saat ini masih bertahan versus gerakan sosial mahasiswa. Musuh bersama gerakan bukan pemerintah saja, tapi segala bentuk keotoriteran yang dipraktikkan orang atau oknum yang melacuri kekuasaan demi kepentingan parsial. *[f]*

BBM, Polisi, dan Demonstrasi[6]

Oleh: Iksan Basoeky

Bentrok antara polisi dan gerakan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) di Yogyakarta (19/3) dalam rentetan demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM, merupakan bentuk tontonan kekerasan yang sangat mengerikan. Polisi yang setidaknya bisa merespons masalah dengan bijak, justru malah ikut terlibat anarki.

Dalam insiden berdarah tersebut, polisi bertindak malakukan serangan balik hingga sampai masuk ke dalam kampus. Jelas, tindakan pembalasan tersebut bukan merupakan solusi masalah, tetapi justru menambah persoalan semakin runyam. Seharusnya, sebagai aparat keamanan, polisi tahu diri bahwa keberadaan mereka adalah untuk mengayomi dan menyelesaikan problem yang terjadi di masyarakat.

Namun, akibat ketidaksadaran mereka, yang dihasilkan adalah disharmonisasi dan konflik kekerasan. Bahkan, kalau boleh dibilang, tindakan

6 Dipublikasikan Republika, 31 Maret 2012

polisi tersebut telah menyalahi aturan yang disandangkan pada meraka sejak awal bertugas dan menjalankan tanggung jawab. Tindakan anarkistis seperti yang kita lihat di Yogyakarta ini adalah buah dari watak represif yang tak patut hukum.

Sebagai rakyat kecil, tentunya kita sadar bahwa di mana-mana polisi mengenalkan konsep pengembangan dirinya lewat apa yang disebut pemolisian masyarakat (*community policing*).

Konsep ini percaya bahwa polisi akan berhasil mengemban misinya, jika polisi melebur bersama masyarakat, menempatkan dirinya agar terbantu oleh masyarakat untuk kemudian bersama-sama mengatasi masalah hukum, ketertiban, dan keamanan masyarakat yang semakin hari kian kompleks.

Masyarakat setidaknya merasa menyesal dengan tindakan anarkistis yang dilakukan pihak kepolisian di Yogyakarta tersebut. Aksi saling bentrok dan lempar batu antara polisi dan mahasiswa dalam menolak kenaikan harga BBM itu tentunya sangat miris. Apalagi, dalam kejadian tersebut polisi masuk ke lingkungan universitas.

Buntutnya, dalam menyikapi masa lah tersebut, aparat kepolisian lebih terlihat sebagai "preman jalanan" dan pengguna alat kekerasan negara ketimbang pelindung atau pengayom masya rakat. Serangan balik yang condong destruktif itu setidaknya mangakibatkan banyak yang terluka. Hal ini tentunya da lam penyelengaraan hukum tidak dapat dibenarkan, apalagi masuk kampus.

Walaupun polisi merasa diserang pertama kali dengan alasan ingin mencari dan melakukan penangkapan terhadap mahasiswa yang melakukan anarki, namun alasan yang demikian kurang tepat. Apalagi, disikapi secara emosional ikut melanggar hukum dan melakukan kekerasan.

Diakui atau tidak, perilaku yang ditontonkan kepolisian telah mencederai seluruh aparat kepolisian di negeri ini. Mereka yang terlibat perbuatan kekerasan mau tidak mau harus ditindak dengan tegas, kalau perlu mendapatkan sanksi. Jika tidak, polisi akan dipandang dengan baju

kekuatan untuk melakukan perbuatan "konyol" dan bersifat kekerasan, bukan meredam masalah tetapi menambah masalah, dan tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Inilah yang sekiranya mulai sekarang perlu ditegaskan dari oknum kepolisian. Masa depan polisi dan orang-orang yang masuk dalam stuktur kepolisian tetap berada dalam bingkai aturan yang ber laku. Mereka (polisi) seyogianya menyelesaikan masalah dengan lebih mengembangkan metode pendekatan negosiasi persuasif, yang diyakini lebih ampuh menyelesaikan masalah yang terjadi dalam demonstrasi dewasa ini.

Penyerangan pada Senin, 19 Maret 2012, setidaknya mengingatkan kita pada catatan sejarah aksi mahasiswa pada 1998 saat menurunkan rezim Orde Baru. Pada peristiwa itu, polisi melarang gerakan mahasiswa untuk melakukan aksi demontrasi dan menekan para mahasiswa turun jalan, seperti sekarang ini.

Polisi sebagai penegak hukum dalam melaksanakan tugas mestinya selalu memegang prinsip-prisip demokrasi, keadilan yang berpijak pada pelaksanaan aturan yang telah dibuat guna menjaga ketertiban soisal dan perdamaian di masyarakat.

Begitu juga dengan pemerintah yang harus tegas memberi sanksi aturan. Setiap penegak hukum harus mengutamakan pendekatan non-kekerasan dan harus mendahulukan prinsip sosial kemasyarakatan.

Dalam rentetan penyelesaiannya, aparat kepolisian harus sadar terhadap perbuatan mereka. Bahwa tindakan brutal dan bentrokan yang berujung pada konflik massa yang demikian telah menyalahi wewenang dalam kepolisian dan itu tidak patut hukum. Dengan kesadaran itu mereka juga akan paham bahwa sesuatu yang melanggar aturan harus dipertanggujawabkan.

Gerakan mahasiswa bukanlah musuh yang harus dibalas dengan kekerasan, namun apabila terdapat kekeliruan harus diluruskan. Tindakan selanjutnya, sebagai gerakan intelektual-akademis juga diharapkan peka membaca persoalan kenaikan BBM.

Setidaknya, mereka tidak gampang terpancing emosi untuk menimbulkan anarki. Sebab, hal itu akan mencoreng nama baik mereka sebagai kaum intelektual dan gerakan penyampai aspirasi masyarakat.

Memelihara Semangat Perlawanan Kaum Muda[7]

(34 Tahun Malari)

Oleh: Fathor Rahman MD

Pada 15 Januari 1974 silam, Jakarta gaduh riuh. Berjuta orang turun ke jalan melakukan demonstrasi. Peristiwa itu yang sekarang kita kenal dengan sebutan tragedi Malari. Menurut banyak berita, tragedi itu telah menyebabkan sedikitnya 11 orang meninggal dunia, 300 orang luka-luka, 775 orang ditangkap, sekitar 807 mobil dan 187 sepeda motor terbakar, serta 144 bangunan rusak. Lain lagi korban kerugian material yang lain. Sungguh betapa mengerikan peristiwa tersebut.

Sampai saat ini, akar keributan tragedi tersebut masih menjadi kontroversi. Menurut Asvi Warman Adam (2003), peristiwa itu merupakan bentuk resistensi masyarakat terhadap Jepang yang melakukan diplomasi untuk menanamkan modal ke dalam negeri. Peristiwa Malari memang

7 Dipublikasikan Jawa Pos, 14 Januari 2008

terjadi saat PM Jepang Kakuei Tanaka (kala itu) berkunjung ke Jakarta (14-17 Januari 1947).

Namun, bagi mantan Presiden Soeharto yang berkuasa saat itu, demonstrasi tersebut dipandang noda hitam yang mencoreng kebangsaan kita yang tidak bisa menghargai tamu. Karena itu, kekuatan militer yang merupakan anjing penjaga istana waktu itu bertindak galak bagi siapa pun yang berdemonstrasi. Selain dilihat sebagai tindakan mencoreng nama baik kebangsaan, demonstran juga dianggap mengganggu stabilitas keamanan, sehingga perlu diamankan.

Nilai apa yang dapat kita kenang hari ini dari peristiwa Malari 1974? Kita harus memahami sejarah perjuangan pendahulu yang berdarah-darah. Apabila nilai perjuangan itu tidak pernah digali kembali, kita gagal menjadi generasi yang mengindahkan sejarah. Kita akan menjadi generasi yang oportunis.

Tanda-tanda kegagalan itu ada di wajah kita yang merasa kaum muda. Tengoklah ke cermin-cermin masa silam, bagaimana bentuk perjuangan pendahulu kita membangun negeri. Tidak perlu kita menengok ke masa sebelum kemerdekaan. Cukup kita lihat bagaimana semangat perjuangan Hariman melawan realitas waktu tragedi Malari.

Mereka, para mahasiswa, turun ke jalan bukan bermaksud merebut kekuasaan, tapi benar-benar ingin menjauhkan negeri ini dari berbagai bentuk penjajahan. Hal itu terbukti dia tidak pernah berada di kursi kekuasaan.

Sungguh berbeda dengan kaum muda saat ini, lebih oportunis dan pragmatis. Tengoklah belakangan ini, posisi kaum muda atau peran mahasiswa kian mengendur. Kita harus mengakui bahwa kaum muda kita kian terjebak hedonisme-konsumtif. Coba kita lirik kembali pola hidup mahasiswa kini. Mereka kian menjauh dari kultur diskusi dan kritisisme. Nuansa gerakan mahasiswa seakan telah berakhir pada 1998.

Di ranah politik, banyak kaum muda kita saat ini yang oportunis-pragmatis. Ketika mahasiswa mereka lantang berteriak menentang ketidakadilan, selalu mempersoalkan kinerja pemerintah. Namun, ketika

mulut mereka disumbat uang, mereka diam seribu bahasa, memilih berkorporasi dengan pemerintah atau partai politik. Kaum muda kita hanya bisa berpikir positivistik, antara menang dan kalah, berkuasa atau dikuasai. Idealisme mereka lumpuh ketika dipertemukan dengan uang.

Itulah bedanya Hariman dan generasi kini. Sedikit sekali mahasiswa dan kaum muda yang kini benar-benar idealis seperti Hariman. Ironisnya pula, momentum Malari sudah kian dilupakan. Buktinya, momentum Malari tahun kemarin tidak banyak mendapat apreasiatif kaum muda. Hariman gagal melempar wacananya ketika turun jalan. Sungguh menyayangkan.

Idealnya, menurut hemat saya, momentum seperti hari Malari penting untuk selalu dikenang sebagai upaya membangkitkan semangat perlawanan. Sebab, kekuatan oposisi -meminjam istilah Ignas Kladen- adalah *advocattus diaboli* atau *advocate* yang mempunyai peran sebagai setan penyelamat. Artinya, kita harus memandang bahwa kekuatan oposisi kaum muda merupakan kontrol kekuasaan, bukan sebagai musuh penguasa.

Karena itu, menarik seandainya momentum ini mampu disinergikan dengan ikrar kaum muda Minggu 28 Oktober 2007, di Gedung Arsip Nasional. Mengapa demikian? Sampai saat ini gerakan tersebut hanya sebatas wacana yang bertambah hari kian memudar. Sekumpulan kaum muda yang hadir pada waktu itu sudah kembali sibuk dalam dunianya masing-masing. Tak ada *follow up*.

Padahal, gagasan rejuvenasi yang sempat terlontar di forum tersebut sangat penting diperjuangkan. Menarik seandainya wacana tersebut dihangatkan kembali melalui momentum Malari kali ini. Sebab, kondisi kaum muda kita kian merisaukan. Situasi seperti sekarang sangat potensial menjebak kaum muda untuk melajurkan idealisme di tangan-tangan kepentingan politik.

Namun, di tengah keramaian kita mengusung wacana rejuvenasi, kaum muda juga perlu mewaspadai permainan politik sejumlah parpol yang masih kuat berpaham status qou. Sebab, bisa saja wacana itu

ditunggangi partai politik. Mereka berpura-pura mendukung kaum muda, tetapi di balik itu sebenarnya ingin menuai suara kaum muda. Setelah mereka duduk di kursi kekuasaan, kaum muda dilupakan.

Politik semacam itu sudah berlangsung lama, namun acap kurang disadari kaum muda. Buktinya, pada masa Orde Baru posisi kaum muda tak ubah pendororng mobil mogok. Mereka ditinggalkan setelah mobilnya berjalan. Realitas tersebut terus berlangsung hingga saat ini. Padahal, keberhasilan gerakan reformasi 1998 meruntuhkan otoriterisme Soeharto adalah kontribusi terbesar berasal para pemuda.

Menggagas Ulang Gerakan Perempuan[8]

Oleh: Luluk Fadilah

Alvarez dalam bukunya *Engendering Democracy in Brazil: Women's Movement in Transition Politics* (terj,1990) mendefinisikan gerakan perempuan sebagai sebuah gerakan sosial dan politik yang terdiri dari sebagian besar perempuan yang memperjuangkan keadilan dan jender.

Definisi ini sangat sejalan bila melihat kondisi dilapangan, sekalipun muncul dengan berbagai corak dan bentuk, gerakan-gerakan perempuan yang ada di dunia memang memiliki kesamaan arah dan tujuan, yakni bertumpu pada usaha memperjuangkan nasib perempuan yang selama ini dianggap terbelenggu oleh dominasi tatanan sosial yang tidak berkeadilan jender.

Isu jender memang menjadi perspektif bagi hampir seluruh gerakan perempuan dalam berkiprah melakukan transformasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Mereka berangkat dari asumsi feministik bahwa

8 Dipublikasikan Radar Jogja, Kamis 17 November 2011

selama berabad-abad lamanya kaum perempuan telah mengalami penindasan dan ketidakadilan akibat adanya kultur patriarkat yang mendominasi kehidupan masyarakat.

Munculnya kasus-kasus kekerasan, praktek diskriminasi dan marjinalisasi yang dianggap merendahkan kaum perempuan, serta persoalan-persoalan lain yang saat ini diklaim sebagai persoalan perempuan kemudian dianggap sebagai manifestasi dari keadaan ini. Kondisi tersebut menyebabkan kaum perempuan saat ini berada dalam keterpurukan, baik secara psikologis pribadi maupun secara mentalitas organisasi.

Usaha pengkerdilan terhadap perempuanpun diakibatkan oleh berbagai sektor. Diantaranya yang berkembang saat ini adalah konstrkruksi media massa. Media massa yang dimaksud disini adalah sebuah media yang menjadikan perempuan sebagai bahan eksploitasi. Perempuan dengan fisiknya yang indah menjadi nilai tawar dalam usaha eksploitatif sehingga mampu menarik konsumen dan keuntungan modal yang kembali kepada penyedia jasa. Tapi, kondisi ini tidak disadari oleh perempuan bahwa hal tersebut merupakan pelecehan.

Kondisi selanjutnya, sebagaimana dikatakan oleh Widjajanti M. Santoso (2011) dalam bukunya Sosiologi Feminisme: Konstruksi Perempuan Dalam Industri Media, bahwa representasi di dunia industri media (televisi) telah memperlihatkan adanya streotipe dan stigma tertentu, berupa nilai dan ideologi misoginis yang sangat tiak menguntungkan perempuan. Adegan senetron yang marak berkembang di dunia televisi cenderung menghegemoni yang menyebabkan perempuan tidak bisa lepas dari konstruksi yanng mengikatnya.

Selain itu, kondisi perempuan dewasa ini cenderung mengabaikan terhadap keperempuannya, dalam artian tidak mau ikut andil dalam mengupayakan pemberdayaan perempuan, terutama dikalangan perempuan generasi muda. Mereka cenderung apatis melihat kenyataan yang menerpa perempuan dan lebih enjoy mengikuti gaya hidup hedon. Disamping itu kekuatan arus globalisasi telah menggerus kehidupan manusia menuju sistem kehidupan yang pragmatis. Sehingga tidak

heran, kaum perempuan memilih apatis terhadap situasi apapun. Rasanya lengkap sudah penderitaan kaum perempuan.

Berkaca Pada Sejarah

Maka dalam kondisi ini, peran organisasi perempuan sangat dibutuhkan untuk membangkitkan kembali semangat gerakan perempuan itu. Dalam catatan sejarah bangsa Indonesia, gerakan perempuan telah berhasil menbuktikan bahwa peran kaum perempuan sangat menentukan terhadap proses kemerdekaan bangsa Indonesia dan bahkan mampu mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan dan hal itu lahir melalui sebuah organisasi atau perkumpulan.

Kehidupan perkumpulan perempuan Indonesia (gerakan perempuan) bermula dari kegiatan para perempuan di dalam perkumpulan umumnya (perkumpulan yang beranggotakan campuran, perempuan dan laki-laki). Kaum perempuan di Nusantara, terutama yang mengecap pendidikan sekolah dasar atau menengah biasanya memulai aktivitas perkumpulan melalui kegiatan kepanduan (pramuka) atau dalam perkumpulan yang dibentuk berlatar belakang kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatra atau Jong Ambon. Melalui perkumpulan pemuda inilah perempuan Indonesia turut beraktivitas. Misalnya mereka turut bersama di dalam pendeklarasian Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Di samping itu, berbagai perkumpulan umum (pemuda) membentuk seksi perempuan seperti Wanito Tomo dari Boedi Oetomo, Poetri Indonesia dari Putra Indonesia dan Wanita Taman Siswa dari Taman Siswa. Sedangkan perkumpulan perempuan yang muncul pada awal gerakan di antaranya adalah Putri Mardika, pada tahun 1916.

Beberapa perempuan yang kemudian menjadi pelopor dan panitia pelaksana Kongres Perempuan Indonesia pertama ikut serta dalam deklarasi di Jakarta itu. Mereka ini antara lain Soejatin, Nyi Hajar Dewantoro, Sitti Sundari dan lain-lain. Seluruh Indonesia pun mengikuti jejak ini dengan menggalang persatuan perempuan Indonesia melalui Kongres Perempuan Pertama 22 Desember 1928, yang diselenggarakan

di Mataram (Yogyakarta, sekarang). Tanggal 22 Desember kemudian dijadikan sebagai icon kebangkitan gerakan perempuan Indonesia. Selain itu, di Indonesia, 22 Desember juga dijadikan sebagai Hari Ibu yang diambil dari spirit kongres Kongres Perempuan Indonesia I.

Peristiwa itu dianggap sebagai salah satu tonggak penting sejarah perjuangan kaum perempuan Indonesia. Pemimpin organisasi perempuan dari berbagai wilayah se-Nusantara berkumpul menyatukan pikiran dan semangat untuk berjuang menuju kemerdekaan dan perbaikan nasib kaum perempuan.

Dalam konteks dewasa ini, gerakan perempuan harus mampu mengagas ulang kembali format gerakan yang harus di lakukan untuk mengatasi sekian problematika perempuan yang ada. Spirit perubahan zaman harus dibaca dengan cermat sebab dinamika kehidupanpun saat ini hadir dengan beragam corak. Sehingga sangat dibutuhkan pembacaan ulang dan konsolidasi nasional gerakan perempuan untuk mengatur ulang gerakan perempuan masa depan.

Disini, yang paling menentukan adalah organisasi perempuan, baik organisasi perempuan yang ada dilingkungan kampus, maupun non kampus. Mengagas ulang disini mempunyai arti diskusi lebih lanjut terhadap problematika perempuan dan mencarikan solusi sesuai dengan spirit zaman yang dinamis.

BAB VIII

PENDIDIKAN

Hindari Sarjana Prematur[1]

Oleh: Romel Masykuri

Menjadi mahasiswa adalah sebuah kebanggaan bagi setiap anak bangsa, bukan persoalan status yang diperjuangkan, melainkan ketika menjadi mahasiswa kita akan bisa belajar banyak hal tentang pengetahuan. Sehingga tidak heran, jika setiap orang berbondong-bondong melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi. Terbukti, setiap tahun ajaran baru, kampus-kampus di seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta selalu di banjiri oleh peserta yang ingin mendaftar. Tapi pernahkah kita berfikir, bahwa menjadi mahasiswa tidaklah sesederhana itu. Jika salah pilihan, kita akan masuk ke jurang gelap dan keluar dengan kesesatan arah.

Salah satu pilihan yang salah bagi mahasiswa adalah memutuskan menjadi sarjana sebelum matang (sarjana prematur). Tanpa bermaksud mengklaim yang sudah sarjana, tapi inilah fakta yang terjadi di lapangan. Banyak kalangan sarjana muda setelah lulus kuliah (S1) masih kebingungan

1 Dipublikasikan Radar Jogja, Kamis 26 Januari 2012

arah dan tak tahu mau kemana. Ibarat kata, ia bagaikan bertapa dalam gua selama beberapa tahun dan setelah keluar dari gua tidak tahu arah dan tujuan. Akhirnya, mau tidak mau mereka memilih menjadi seorang pengagguran.

Hal ini sesuai dengan data yang di catat oleh BPS (Badan Pusat Statistik), jumlah pengangguran terbuka (tanpa pekerjaan sama sekali) di Indonesia pada tahun 2011 adalah 8,12 juta orang. Dari jumlah itu, sekitar 600 ribu orang adalah mereka yang telah lulus universitas alias sarjana. Inilah potret buram pengangguran terdidik di negeri kita. Para sarjana ini memaksakan diri lulus di usia dini, disaat potensi dirinya masih belum terasah dan kapasitas dirinya masih absurd. Padahal, para sarjana tersebut di idealkan membawa obor perubahan dan ikut andil dalam memajukan negerinya, tapi malah sebaliknya, menjadi bagian problematika kebangsaan.

Menurut pengamatan penulis, setidaknya ada beberapa hal yang melatarbelakangi lahirnya sarjana prematur di negeri ini. Pertama, disaat menjadi mahasiswa mereka hanya berkonsentrasi pada dunia akademik (bangku kuliah), tanpa mencari asupan pengetahuan di luar bangku kuliah. Mereka enggan menyibukkan diri untuk aktif di organisasi kemahasiswaan, baik organisasi yang berbasis pengkaderan maupun organisasi yang berbasis potensi. Akibatnya, yang ada di otak hanyalah kuliah dan kuliah serta cepat lulus.

Pandangan seperti ini juga didukung oleh sistem kampus yang menggiring mahasiswa untuk segera cepat lulus. Sistem perkulihan saat ini membuat mahasiswa terkungkung dari ruang kreatifitasnya. Tugas-tugas kuliah menumpuk serta targetan absensi 75% dalam satu semester membuat mahasiswa takut untuk beraktifitas di luar kampus. Padahal, kedirian seorang mahasiwa tidak ditentukan oleh seberapa besar asupan informasi pengetahuan yang diberikan dosen, melainkan yang menentukan adalah asupan pengalaman. Karena pengalaman itulah yang akan memberikan kita kedewasaan, ketegaran dan proses memahami realitas hidup yang sesungguhnya.

Kedua, nalar kritis mahasiswa sudah menumpul. Diakui atau tidak, paradigma berfikir mahasiswa hari ini terjebak pada suatu hal yang sifatnya simbolis dan pragmatis. Kebanyakan mahasiswa memahami dunia kampus hanya sebatas mencari ijazah dan pemenuhan gelar untuk memperoleh status sosial yang tinggi. Kampus tidak lagi dimaknai sebagai ruang proses pencarian jati diri dan pematangan pribadi sebagai kaum terdidik. Akibatnya, ruang dan dimensi kehidupan yang ada di kampus hanya dijadikan alat untuk mencari kepuasan lahiriah. Terbukti, meraka berlomba-lomba menjadi sarjana muda hanya untuk mengangkat status sosialnya. Padahal, sebagai mahasiswa yang oleh Gramsci disebut intelektual organik, idealnya mampu memahami ruang proses kampus sebagai penempaan keilmuan dan kedewasaan diri, bukan pada pemenuhan gelar semata.

Sudah cukup sindiran yang diungkapkan oleh Iwan Fals dalam lirik lagunya "Engkau sarjana muda, resah mencari kerja mengandalkan ijazahmu. Empat tahun lamanya bergelut dengan buku, sia-sia" menjadi tamparan keras bagi para sarjana muda di negeri ini. Jelas, menjadi sarjana prematur adalah pilihan bodoh dalam kaca mata pendidikan kritis, sebab ia hanya mengandalkan ijazah, bukan kemampuan personalnya. Efeknya, disaat lahan pekerjaan kosong, ia tidak bisa bergerak sebab modal pribadi sebagai sarjana belum di asah secara maksimal di saat menjadi mahasiswa.

Menunda kelulusan bukan berarti menunda kesuksesan, melainkan merancang langkah dan stretegi pasca kelulusan. Dalam catatan historisitas kampus, mahasiswa yang lama di kampus (tidak cepat serjana) rata-rata setelah lulus banyak yang sukses, utamanya yang aktif di organisasi kemahasiswaan. Kenapa hal ini bisa terjadi. Jawabannya sangat sederhana, selain mereka sudah banyak pengalaman, mereka juga punya jaringan (connection) di luar kampus, sehingga setelah lulus bisa digunakan untuk meraih kesuksesannya. Dan yang paling penting, mahasiswa yang lama di kampus kedirian dan kedewasaan dirinya sudah terbentuk sehingga cara berfikirnya matang, inspiratif, kreatif dan tidak bergantung pada keadaan.

Jadi, saran penulis, jangan tergesa-gesa dan memaksakan diri untuk lulus di usia dini (sarjana prematur) sebelum diri kita benar-benar matang dalam segala hal, baik dalam potensi diri, pengalaman, pengetahuan dan jaringan. Hal ini bertujuan agar kita sebagai mahasiswa tidak mengulangi kesalahan yang sama yaitu menambah angka pengangguran terdidik di masa depan.

Ironi Pendidikan Perempuan Desa[2]

Oleh: Luluk Fadilah

Dalam proses pembangunan, semua rakyat pada hakekatnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama, baik mereka yang berjenis kelamin perempuan maupun mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Akan tetapi, pada kenyataannya tidaklah demikian. Perempuan masih banyak terpinggirkan dalam berbagai tahapan proses pembangunan, utamanya pembangunan di sektor pendidikan. Apalagi bagi perempuan yang berada di pedesaan. Nasib mereka selalu menjadi orang yang terpinggirkan.

Rata-rata perempuan di desa mengenyam pendidikan hanya sampai tingkat sekolah menengah, setelah itu mereka akan dipaksa untuk merasakan kerasnya kehidupan, seperti bekerja sebagai buruh, bertani, dan bahkan ada yang langsung berkeluarga. Padahal mereka semua masih punya kesempatan lebih untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

2 Dipublikasikan Radar Jogja, Senin 08 Agustus 2011

Diakui atau tidak, hakikat pendidikan merupakan salah satu indikator penting untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Namun hal ini seakan-akan tidak berlaku bagi perempuan di desa yang seharusnya mempunyai kesempatan lebih untuk mengakses pendidikan. Salah satu penyebabnya adalah konstruk budaya yang mengekang kebebasan mereka, yang menjastifikasi bahwa perempuan tidak perlu sekolah terlalu tinggi karena pada akhirnya perempuan akan berkutat diwilayah domestik yang tugasnya hanya memasak, mencuci, dan melahirkan.

Konstruk budaya yang sudah mengakar di masyarakat itulah sehingga kebanyakan perempuan muda di desa mempunyai sikap yang pasif untuk berpartisipasi dalam sektor pembangunan pendidikan. Dan lebih tragisnya lagi, rata-rata kaum perempuan muda di desa berasal dari golongan keluarga kurang mampu sehingga mereka tereksploitasi. Misalnya, bekerja menjadi buruh yang diberi upah sangat rendah dan menjadi petani yang termarjinalkan karna lemahnya terhadap informasi dan kratifitas diri. Akibatnya, posisi kaum perempuan selalu berada di kelas bawah dalam strata sosial. Sungguh ironis, tapi inilah fakta sosial yang sampai saat ini masih bertahan.

Sebagai bagian dari kaum perempuan, penulis menyadari betul apa yang dirasakan oleh mereka yang terasingkan di desa. Pada dasarnya mereka hendak bergerak namun mereka selalu tersandung dengan kekuatan tradisi dan konstruk budaya yang membumi. Ditambah lagi, perhatian pemerintah daerah masih dirasa sangat minim, sehinga mau tidak mau mereka harus pasrah menerima kenyataan. Lantas, akankah kondisi ini terus berkembang dan membiarkan kaum perempuan desa terpenjara dalam konstruk budaya yang tidak memajukan bagi dirinya?.

Sudah saatnya kaum perempuan desa bergerak dan melakukan gerakan untuk mengubah mindside diatas, walaupun untuk mengubah kondisi tersebut cukup sulit dan membutuhkan proses yang lumayan panjang, sebab kondisi di desa pandangan semacam itu sudah menjadi paradigma masyarakat, ketika sudah menjadi paradigma menurut Thomas

S. Khun, maka ia akan menjadi suatu pandangan dan asumsi bersama yang dipakai oleh masyarakat, sehingga untuk mengubah pandangan tersebut dibutuhkan kerja-kerja ekstra dari seluruh pihak, khususnya perempuan sebagai korban dari pradigma negatif tersebut.

Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengubah paradigma tersebut. Pertama, adanya sosialisasi secara berkala kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai basis pengetahuan. Sosialisasi ini dapat menggunakan mediasi lembaga yang ada di pedesaan, seperti Karang Taruna Desa, PKK serta perangkat desa yang lain. Kedua, memberikan motivasi kepada kaum perempuan bahwa tidak selamanya kaum perempuan selalu termarjinalkan. Sebagai contoh Kartini sebagai pelopor pendidikan untuk perempuan. Ketiga, memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Keempat, membuka sekolah alternatif atau nonformal untuk mengasah kemampuan kualitas perempuan dalam keterampilan seperti diadakannya kursus jahit, dan keterampilan lainnya. Kelima, melakukan pendampingan secara continue dalam pelatihan-pelatihan yang mampu mengangkat kesadaran kognitif mereka untuk berubah.

Perlu diketahui catatan sejarah silam telah banyak merekam kontribusi perempuan dalam memberikan sumbangsih terhadap kemajuan dunia. Peran RA. Kartini dalam memajukan pendidikan di Indonesia merupakan salah satu contoh kontribusi perempuan yang dicetak dengan tinta emas dalam sejarah. Kartini mendobrak kondisi yang memprihatinkan tersebut dengan membangun sekolah khusus wanita. Selain itu, ia juga mendirikan perpustakaan bagi anak-anak perempuan di sekitarnya.

Tokoh perempuan lain yang mungkin layak disebutkan pertama kali adalah Aisyah ra. Pada masanya, Aisyah ra. banyak memberikan masukan dan ide-ide cemerlang dalam memajukan Islam. Selain itu, dia juga berperan besar dalam menjaga kemurnian sunnah nabi, yang menjadikannya salah seorang sumber rujukan pada zamannya. Aisyah ra. juga terkenal ahli dalam bidang fiqh, yang nyaris tak tertandingi kehebatannya dalam sejarah keilmuan Islam.

Nama lain yang juga pantas disebut adalah Marie Curie. Wanita yang bernama lengkap Maria Sklodowska Curie ini, adalah penemu unsur radium. Curie adalah satu-satunya ilmuwan yang berhasil memperoleh dua nobel, nobel yang pertama didapat pada tahun 1903 untuk bidang fisika, dan yang kedua didapat pada tahun 1911 untuk bidang kimia. Curie juga merupakan wanita pertama yang mengajar di Universitas Sorbonne, Paris. Dedikasinya yang sangat tinggi di bidang ilmu pengetahuan, sampai saat ini belum ada yang menandingi.

Deretan tokoh perempuan diatas adalah bukti konkrit bahwa pada dasarnya perempuan juga berkesempatan besar dalam memajukan bangsa ini, tak terkecuali perempuan yang ada di desa. Maka sudah sepantasnya di era demokrasi ini, generasi muda perempuan desa diberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk mengakses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Hikayat Bongkar Pasang Kurikulum[3]

Oleh: Najamuddin Muhammad

Kalau ditanya ihwal kebijakan apa yang paling menciptakan kegaduhan, kerisauaan dan kepanikan pada pelaksana pendidikan di tingkat bawah, mereka akan menjawab bongkar pasang kurikulum. Kalangan guru gaduh karena mereka harus berhadapan dengan sistem baru yang tiba-tiba datang dari pusat tanpa diajak rembuk sebelumnya. Orang tua siswa juga resah karena mereka harus membelikan buku pelajaran baru dari isi yang sebenarnya tak baru. Para siswa juga harap-harap cemas karena perubahan kurikulum hanya membuat jalan baru yang berliku dengan tetap melewati jembatan maut yang bernama UN.

Apa yang diharapkan dari setiap perubahan kurikulum yang ada di bangsa ini selalu berbentut kecemasan. Pemangku kebijakan yang sebelumnya optimis ketika kurikulum itu akan diterapkan, tapi beberapa tahun kemudian selalu kecemasan yang datang. Tak heran, sebuah bangsa

3 Dipublikasikan Harian Bisnis Indonesia, 28 Februari 2013

yang kebijakannya selalu mengalami bongkar pasang kurikulum adalah bangsa Indonesia. Tiap Orde dan bahkan bisa dikatakan tiap pergantian Menteri selalu menyisakan bekas-bekas perubahan kurikulum.

Pada masa Orde lama, ada tiga kurikulum yang dikeluarkan oleh Negara. Dari rentang waktu tahun 1945-1948, keluarlah Kurikulum 1947. Pada rentang waktu tahun1950-1961, keluarlah Kurikulum 1952. Kurikulum terakhir masa Orde Lama adalah kurikulum 1964. Pada masa Orde baru telah lahir empat kurikulum. Ada kurikulum 1968, kurikulum 1975, kemudian ada kurikulum baru yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 Yang Disempurnakan atau CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif). Kurikulum terakhir masa Orde Baru adalah kurikulum 1994. Masa reformasi ada kurikulum tahun 2004, Kurikulum Berbasis Kompetensi, ada kurikulum 2006, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan terbaru, kurikulum 2013 yang rencananya akan diterapkan tahun ini.

Secara akademik perubahan kurikulum itu menjadi keharusan. Tapi apakah perubahan kurikulum menuju 2013 sesuai dengan basis filosofis dan konteks sosiologis yang ada itu belum pasti. Pak Wamen Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan, Musliah Kasir, mengatakan bahwa perubahan ini merupakan suatu keharusan, karena pendidikan Indonesia sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan Negara lain. Kalau penerapan kurikulum ditunda, akan lebih lama mengejar ketertinggalan (Kompas/04/12/2013). Begitu juga dengan dengan alasan Pak Nuh, Menteri Pendidikan kita. dengan kurikulum baru, bagi beliau, diharapkan menghasilkan lulusan dengan kompetensi tinggi serta berpikir analitis (Kompas/03/12/2013). Itulah alasan dari pemegang kebijakan kenapa kurikulum kita harus berubah saat ini.

Tapi apakah alasan itu benar-benar mewakili dari realitas yang terjadi dilapangan? Apakah pendidikan kita tertinggal jauh dari negara-negara tetangga, layaknya Jepang, Thailand, dan Singapura karena kurikulum? Apakah benar siswa tidak mampu berfikir kritis dan analitis karena kurikulum yang konvensioanal? Saat ini pendidikan kita tertinggal jauh dari negeri tetangga itu harus diakui. Mengacu laporan McKinsey Global

Institute "Indonesia Today" dan sejumlah data rangkuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kompetensi pelajar Indonesia masih di bawah pelajar lain di Asia, seperti Jepang, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Hanya 5 persen pelajar Indonesia memiliki kompetensi berpikir analitis. Tapi kalau keterbelakangan ini langsung dilimpahkan pada problem kurikulum itu cukup gegabah. Ini bisa dikatakan gegabah karena pihak pemegang kebijakan pendidikan belum melakukan diagnosa menyeluruh ihwal kurikulum yang sebelumnya. Apakah karena kurikulum yang bermasalah atau ada faktor lain yang bisa menghambat proses implementasi kurikulum, seperti kualitas guru dengan metode yang dipakai dan proses evaluasi siswa.

Kualitas Guru

Kunci utama pendidikan adalah guru. Mari kita ingat sejarah pengeboman sekutu terhadap Jepang, 1945. Rakyat bergelimpangan tanpa nyawa, ada yang cedera parah dan ada yang sudah sekarat. Pembantu Kaisar melaporkan ihwal parahnya korban yang dialami. Tapi Kaisar Jepang Hirohito berkata, "Berapa guru yang hidup". Pembantu kaisar dan menteri pun terkejut, seraya bertanya, "mengapa paduka menanyakan jumlah guru yang hidup?". Hirohito berkata "selama masih banyak guru yang hidup, aku yakin masih ada kesempatan bangsa kita untuk bangkit dari kekalahan dan mengejar ketertinggalan". Pasca perang itu Jepang mengapresasi seluruh guru dengan memberi pendidikan, fasilitas dan memperbaiki nasib kesejahteraan guru. Jepang ingin bangkit dari keterpurukan bangsanya dengan pertama kali yang diperbaiki adalah kualitas dan profesionalitas guru. Tak heran berselang 25 tahun kemudian, Jepang bisa bangkit dari krisis multidimensi dengan lahirnya generasi-genari pintar, cerdas dan berkarakter. Itu semua berkat didikan para guru-guru.

Kita harus mengakui bahwa kualitas guru menjadi penentu utama proses sebuah pendidikan. Kurikulum yang paling bagus sekalipun tapi tidak di topang dengan kualitas guru yang mampuni, maka perubahan

itu akan berjalan sia-sia dan hanya memboroskan anggaran. Guru adalah pelaksana yang bersinggungan langsung dengan siswa. Kalau kurikulumnya bagus, tapi proses belajar mengajarnya masih konvensional; menekkankan pada hafalan bukan penalaran, maka siswa pun tidak akan mampu berfikir kritis dan analitis. Kondisi guru yang saat ini terjadi masih jauh dari standart berkualitas.

Kualitas guru yang ada di Indonesia masih perlu banyak perbaikan. Dari data Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2012, secara umum kualitas dan kompetensi guru di Indonesia masih belum sesuai harapan. Hingga saat ini baru sekitar 51 persen berpendidikan S1 sedangkan sisanya belum berpendidikan S1. Jadi baru ada 70,5 persen guru yang memenuhi syarat sertifikasi. Selaras dengan survei yang dilakukan oleh Putera Sampoerna Foundation, dimana sebanyak 54 persen guru di Indonesia masih berkualitas rendah.

Ironisnya kualitas guru bagi pemegang kebijakan hanya dipandang sebelah mata. Berkembang dan tidaknya pendidikan seakan jauh dari pengaruh guru. Guru dianggap sebagai faktor yang nomor sekian dari penentu kualitas pendidikan. Proses peningkatan kualitas guru pun terkesan setengah hati. Tak heran, ketika pendidikan kita tertinggal, prioritas utama bukan guru yang diperbaiki kualitasnya, tapi justru kurikulum yang akan dirubah. Kurikulum baru seakan menjadi penyelamat dari keterpurukan pendidikan kita. padahal, perubahan kurikulum tanpa perbaikan kualitas guru tak lebih seperti menggarami lautan.

Menunggu Lahirnya Guru Inspiratif[4]

Oleh: Najamuddin Muhammad

Upaya untuk meningkatkan kompetensi guru gencar dilakukan. Sertifikasi guru dan dosen adalah salah satunya. Betapa berharga dan pentingnya guru dalam transformasi pendidikan mulai disadari oleh semua elemen. Hingga mereka para calon guru yang tak lulus dalam uji sertifikasi harus rela dengan lapang dada untuk belajar ulang dengan mengikuti Diklat demi meningkatkan kompetensinya.

Kegembiraan bagi guru yang lulus sertifikasi adalah manusiawi. Tapi kurang wajar apabila guru menganggap jalan terjal yang harus dilalui alias perjuangan untuk memperbaiki pendidikan hanya berhenti dan stagnan saat itu pula. Setelah berkeringat belajar, lulus, kemudian guru menganggap tugas beratnya sudah selesai, itu adalah suatu ironi bagi masa depan pendidikan.

Uji sertifikasi hanya sekedar penyaringan. Setelah disaring, guru mempunyai tugas terberat untuk mengemban amanah mengajar secara

4 Dipublikasikan Bisnis Indonesia, 1 Desember 2011

lebih demokratis, humanis dan transformatif. Bagaimana kometmen dan spirit guru dalam menggugah kreatifitas dan memfasilitasi peserta didik adalah tantangan tersendiri bagi guru.

Tidak patut berbangga berlebihan bagi guru yang lulus uji sertifikasi. Karena sedah sekian lama label pemeo perihal kompetensi guru, tapi nyatanya tak sedikit guru kita yang menggunakan metode pengajaran konservatif dengan gaya bank. Istilah Paulo Fraire, atau guru-guru kurikulum yang hanya mengejar target kurikulum dengan abai terhadap kondisi psikilogis siswa dan lingkungan sekitar.

Rasa pasimis mungkin terlintas dari sebagaian banyak orang akan lahirnya kembali guru-guru kurikulum yang hanya kejar tayang keputusan Diknas. Karena kalau sepintas dilihat proses perekrutannya profesi guru berangkat dari menejemen pemerintah yang pelik dengan persyaratan akademis yang terkadang menjengkelkan bagi beberapa guru.

Dalam perjalanannya, meski sekat antara pendidik dan peserta didik kian membaik, tapi gaya intraksinya masih sebatas dialektika pengetahuan yang mengawang dengan berpatokan dan berkiblat penuh pada buku kurikulum, sehinga prosess internalisasi pengetahuan sangat sulit bagi peserta didik karena tak berangkat dari transformasi kesadaran terlebih dahulu. Tidak heran pada gilirannya siswa yang lulus merasa canggung terhadap realias kemasyarakatan.

Guru Inspiratif

Ada dua istilah guru bagi Rhenald Khasali (2007), yakni guru kurikulum dan guru inspiratif. Guru kurikulum adalah mereka mengajar hanya terpaku pada target-target kurikulum yang sangat kaku dan makanistik. Guru kurikulum mengajar tidak banyak mengupas sesuatu yang ada diluar kurikulum; kehidupan siswa, cita-cita, dan masalah-masalah yang tak tercantum dalam kurikulum. Di lembaga pendidikan kita jamak dijumpai tipe-tipe guru kurikulum. Tolak ukur keberhasilan mengajar bagi guru tipe ini adalah angka-angka kuantitatif yang diperoleh dalam evaluasi.

Guru inspiratif tidak hanya terpaku pada kurikulum, tetapi juga memiliki orentasi yang lebih luas dalam mengembangkan potensi dan kemampuan para siswanya. Guru inspiratif adalah guru yang mampu menyulut nyala semangat para siswa sehingga melahirkan siswa yang tangguh dan siap menghadapi aneka tantangan dan perubahan. Guru inspiratif memecahkan masalah tak terpaku pada kurikulum yang tekstual, tapi lebih melihat pada konteks masalah yang dialami pada siswa.

Ada sebuah kisah menarik ihwal guru inspiratif. Erin Gruwell adalah guru perempuan yang ditempatkan disebuah kelas "bodoh" yang para muridnya sering terlibat dengan kekerasan antar geng. Erin Gruwell memulai proses belajar mengajar dengan sangat sulit. Nyaris tiap hari tak ada murid yang tidak tawuran Muridnya banyak yang nakal, melawan, dan biasa ribut di dalam kelas antar geng. Erin Gruwel mengahadapi masalah yang cukup realistis dan jawabanya tak bisa ditemukan dari lembaran-lembaran buku kurikulum.

Setelah beberapa hari belum ada solusi yang tepat, Erin Gruwell mencoba menghadirkan solusi dengan membuat kurikulum baru yang lebih menyentuh pada pengalaman dan pengetahuan hidup. Ia mencoba menyentuh dan memasuki sisi kehidupan muridnya. Ia mulai dari sebuah permainan dengan menarik garis merah di lantai, membagi mereka dalam dua kelompok, kiri dan kanan. Permainan itu dimulai dengan beberapa pertanyaan sederhana, mulai dari album kesayangan, pengalaman keanggotaan geng, kepemilikan narkoba dan pernah dipenjara atau ada teman yang mati akibat tauran antar geng dan beberapa pengalam hidup lainya.

Lambat laun, permainan itu ternyata menyentuh perasaan antar siswa. Permainan itu mampu membangkitkan kesadaran. Mereka semua sadar dan mereasa ihwal dirinya yang satu nasib, sering berada dalam kondisi ketidakamanan, kecurigaan dan kekerasan. Pada akhirnya, mereka membangun satu komitmen kebersamaan untuk memperbaiki hubungan. Erin Gruwell, setelah semua damai, meminta semua menulis kisah hidupnya dengan tema yang bebas. Hasilnya sungguh mengagumkan.

Tulisan mereka disatukan dan diberi nama Freedom Writers yang juga didokumentasikan dalam film Freedom Writers.

Pendidikan kita butuh guru-guru layaknya Erin Gruwel. Beberapa permasalahan krusial pendidikan kita, layaknya kekerasan antar pelajar, tawuran, minuman miras hingga pada pemakaian obat-obat terlarang adalah realitas permasalahan yang penyelesaiannya tak cukup di kelas dengan hanya berpatokan pada buku kurikulum sekolah. Butuh guru yang mampu memasuki, menyelami dan mampu menginspirasi kehidupan anak untuk bisa mengembalikan kesadarannaya. Pendidikan kita butuh guru yang mampu menginspirasi kehidupan anak menjadi lebih kritis, kreatif dan produktif dalam kehidupan ini.

Pendidikan Indonesia, antara Isi dan Cangkang[5]

Oleh: Adang Saputra

"Proses pendidikan adalah proses mewujudkan eksistensi manusia yang memasyarakat dan membudaya"

(H.A.R. Tilaar dalam *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*, 2000; 29-32).

Pernyataan Tilaar diatas setidaknya mengingatkan kita akan esensi dari sebuah pendidikan, bahwa pendidikan suatu proses yang mempunyai nilai kemasyarakatan dan kebudayaan. Artinya bahwa sebuah pendidikan mau tidak mau harus berinteraksi dengan masyarakat dan budaya yang ada pada saat pendidikan itu diselenggarakan. Oleh sebab itu, pendidikan walaupun, secara esensi, yang dibangun itu sama, namun pada tahapan empiris dan praksis tentunya berbeda. Namun terkadang banyak orang, baik itu pemerintah dari sebuah negara atau

5 Dipubikasikan Radar Jogja, 16 Maret 2012

masyarakat itu sendiri, hanya memandang dengan pandangan mata 'seorang bajak laut'. Atau ibarat koin, mereka hanya melihat satu sisi, sedangkan sisi lainnya tidak.

Seorang bajak laut populer dengan penglihatannya yang satu mata, terlebih itu adalah kaptennya. Setidaknya sampai saat ini, pernyataan tersebut cocok jika dimetaforkan kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia –tentunya untuk tidak mengatakan secara keseluruhan. Bagaimana tidak, mereka hanya melihat 'cangkang' pendidikan atau sebuah formalisasi pendidikan dengan melupakan 'isi' dari pendidikan itu, yang itu dilakukan sebagai proses dari awal sampai akhir hidup manusia. Apalagi jika formalisasi pendidikan itu tidak menyentuh tiga kompetensi dasar pendidikan; kognitif, afektif, dan psikomotorik. Maka boleh dikatakan bahwa formalisasi pendidikan tidak lebih dari sebuah 'pabrik' yang disiapkan untuk kepentingan perusahaan. Atau dengan kata lain, peserta didik hanya disiapkan menjadi 'seorang pekerja' dengan ketimpangan moralitas pendidikan.

Untuk mengetahui tujuan dari pendidikan setidaknya UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 ayat 1 dapat menjelaskan secara tepat bahwa, "Pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudi mulia, sehat, berilmu, cakap, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air". Undang-undang ini tentunya memperkuat argumen yang dinyatakan oleh Tillar tentang tujuan pendidikan untuk memasyarakatkan dan membudayakan manusia.

Pertanyaan yang patut dikedepankan adalah apakah formalisasi pendidikan mampu membentuk apa yang diharapkan oleh undang-undang dan fitrah manusia? Jika iya, lalu bagaimana dengan program pendidikan yang hanya mementingkan aspek kognitif? Bukankah itu adalah ketidakseimbangan, dan bukan merupakan pendidikan secara utuh? Lalu, pendidikan seperti apa yang mampu meningkatkan tiga kompetensi pendidikan tersebut?

Tentunya, pernyataan yang diutarakan oleh Ira Shor dan Paulo Freire dalam *Menjadi Guru Merdeka: Petikan Pengalaman*, tidak kita inginkan bahwa sekolah – yang merupakan formalisasi pendidikan – publik ini menetapkan kurikulum yang akan mensosialisasikan setiap generasi ke dalam nilai-nilai perusahaan swasta raksasa. Mereka berdua kemudian menyimpulkan bahwa lembaga pendidikan kemudian menjadi lembaga yang rumit dan tidak langsung, lewat mana kepentingan perusahaan swasta dikampanyekan di sektor politik (Ira Shor dan Paulo Freire, 2001; 116).

Dalam paradigma pendidikan kritis, sekolah, atau formalisasi pendidikan, hanyalah salah satu corak pendidikan dan merupakan kaki tangan negara otoriter. Pada masa sekarang ini seiring merosotnya tanggung jawab personal, negara dan sistem persekolahan membuat anak-anak menjadi tidak dapat "didik" dalam arti pendidikan sejati. Akan tetapi tentunya, tidak dengan serta merta masyarakat harus menolak formalisasi pendidikan, buktinya sampai sekarang formalisasi pendidikan itu bisa bertahan sampai sekarang, tinggal pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana merumuskan formalisasi pendidikan yang juga memperhatikan 'isi', memasyarakatkan, membudayakan, dan memanusiakan manusia sesuai dengan konteks dimana mereka hidup.

Bukan Pilihan, Tapi Keharusan

Bahwa sekolah adalah 'cangkang' belaka", tentunya adalah pernyataan yang naif dan terlalu pesemis terhadap perkembangan sekolah sendiri. Akan tetapi terlalu optimis jika menyatakan bahwa sekolah hanyalah satu-satunya pendidikan sehingga lupa untuk bersikap *skeptis* dan kritis terhadapnya. Apalagi pendidikan itu tidak bisa dilepaskan dari faktor geografis, kultur sebuah masyarakat kultur dan perkembangan global.

Tak salah jika bahwa ada sementara pakar yang menyatakan bahwa manusia berpendidikan adalah manusia yang berbudaya (H.A.R. Tilaar, 2000; 29-32). Karena pada dasarnya pendidikan adalah aspek dari kebudayaan. Sehingga ketika seseorang yang mengaku berpendidikan pada

suatu tempat tertentu tetapi belum mewakili kebuduyaan yang ia miliki, maka dia bukanlah orang yang berpendidikan. Walaupun dengan adanya perkembangan global, tidak semestinya ia pun menghancurkan kekhasan dalam budaya yang menuntu pada sebuah sikap.

Inilah yang terjadi pada Indonesia, di satu sisi pendidikan Indonesia dituntut untuk memperhatikan faktor kebudyaan dan geografis namun di satu sisi ia pun harus mengikuti pendidikan dalam perkembangan global. Namun saat ini Indonesia malah belum secara maksimal memilih dan melakukan kedua-keduanya, sebaliknya pendidikan Indonesia malah terjepit dalam masalah 'matrealisasi', yang terpusat pada formalisasi pendidikan, sekolah.

Memang benar bahwa adanya pemerintah secara sadar mengubah paradigma mereka, bahwa sekolah bukan satu-satunya sebuah pendidikan. Akan tetapi mereka pun menyadari bahwa pendidikanlah formal-lah yang mampu memberikan wawasan yang seimbang dari tiga kompetensi yang menjadi tujuan pendidikan, kognisi, afeksi dan psikomotorik. Akan tetapi lagi-lagi kesadaran belum 'merumput' pada wilayah praksis, sehingga ada ketimpangan kompetensi pendidikan di sekolah, sekolah hanya menjadi 'latar belakang' pabrik-pabrik, yang tiada lain sekolah itulah pabrik.

Oleh sebab itu, 'cangkang' dan 'isi' pendidikan yang penulis maksud sebagai formalisasi dan esensi dari pendidikan itu bukanlah suatu pilihan namun sebuah keharusan. Akan tetapi sebuah keharusan ini harus dilandasi dengan sebuah kesadaran terhadap aspek geografis, kultur dan ekonomi suatu bangsa, sehingga pemerintah sendiri tidak salah salah dalam melangkah.

Namun sangat disayangkan jika pemerintah sajalah yang bertanggung jawab dalam hal ini. Karena untuk melengkapi 'isi' pendidikan itu sendiri masyarakat khususnya orang tua dan lingkungan harus memahami 'makna' pendidikan itu sendiri. Sehingga keharusan 'cangkang' dan 'isi' pendidikan ditunjukan bagi seluruh manusia yang hidup, yang kehidupan mereka tidak bisa lepas dari pendidikan itu sendiri. *Wallahu A'lam*.

Universitas yang Kehilangan Identitas[6]

Oleh: Najamuddin Muhmmad

Belakangan ini kita dikejutkan dengan membengkaknya angka pengangguran. Ribuan orang tidak punya pekerjaan. Mereka sebenarnya mempunyai keinginan untuk bekerja, tapi lapangan pekerjaan apa yang mereka akan masuki sedangkan kemampuan dirinya sudah tidak laku. Bukan berarti mereka tidak berpendidikan, tapi pengetahuan dan kemampuan yang mereka pelajari dari lembaga pendidikan sudah menjadi barang rongsokan di pasaran.

Kalau membludaknya angka pengangguran lantaran mereka tidak mengenyam pendidikan mulai sejak kecil mungkin masih lazim. Tapi sungguh ironis apabila statistik angka pengangguran dikerumuni oleh orang-orang berpendidikan yang rata-rata sudah mengenyam pendidikan di universitas. Badan Pusat Statistik menyimpulkan bahwa jumlah sarjana yang menganggur melonjak drastis dari 183.628 orang pada tahun 2006 menjadi 408.890 orang pada tahun 2007. Belum lagi

6 Dipublikasikan Suara Pembaruan, Februari 2008

pemegang gelar diploma 1, II, dan III yang angka penganguran yang kian hari terus bertambah.

Melonjaknya angka pengangguran merupakan tamparan bagi universitas. Jati diri universitas kian hari kian dipertanyakan melihat *out pout* yang tidak bisa beradaptasi dengan pesatnya perkembangan zaman. Tidak heran apabila hasil Survie *Times Higher Education* terakhir menunjukkan peringkat Universitas-universitas unggulan Indonesia melorot tajam, terdepak dari posisi 200 besar dunia. Padahal sebelumnya (2006) enam universitas terbaik di Indonesia (UGM, UI, ITB, UNDIP, IPB, dan UNAIR) termasuk jajaran 500 besar dunia, tapi saat ini mengalami kemerosotan dan tidak lagi masuk dalam jajaran 500 besar dunia.

Pengangguran

Suatu hal yang paradoks apabila sarjana lulusan universitas ternyata mengnggur. Universitas adalah ruang berdialektika untuk mencari kebenaran demi kebenaran dalam ruang lingkup personal maupun sosial kemasyarakatan. Universitas adalah ruang pengembangan keilmuan lewat *Tri Darma Perguruan Tingg*-nya, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Universitas adalah ruang untuk membentuk karakter kepribadian yang utuh sehingga nantinya dapat memposisikan dirinya di tengah hembusan angin perubahan yang kian kencang.

Tapi ironisnya Universitas-universitas yang ada di Indonesia kerapkali melahirkan sarjana-sarjana yang banci. Mereka gagap menghadapi perubahan. Mereka tidak mempunyai pembacaan yang cerdas dan kritis terhadap apa-apa yang sedang dan bakal terjadi di masa akan datang. Meski di pelbagai universitas mereka sudah terlatih dan profesional dalam bidang tertentu, tapi karena zaman senantiasa berubah maka tak ubahnya keterampilan yang didapat hanya menjadi barang rongsokan.

Membludaknya angka pengangguran yang lahir dari rahim universitas tidak akan pernah lepas dari kepribadian sarjana tersebut. Jati diri atau karakter sarjana bersangkut paut dengan tingkat pembentukan dan pengembangan pengetahuan di universitas. Sarjana yang lahir dari

universitas seharusnya mempunyai wawasan keilmuan luas, berfikir kritis, dan cerdas dalam menyelesaikan persoalan serta tanggap terhadap perubahan, tapi pada kenyataanya justru terbalik. Sarjana di negeri ini bukan mengobati penyakit politik yang kian parah, ekonomi yang tambah terbelakang, hukum yang justru pincang dan tumpukan masalah lainnya, tapi justru menambah deretan krisis dari masalah tersebut secara lebih akut.

Komodifikasi

Mandeknya pengembangan keilmuan menjadi masalah fundamental yang mengakibatkan lulusan universitas menjadi pengangguran. Darmaningtyas (*Pendidikan Rusak-rusakan* 2005) pernah menegaskan bahwa pada mulanya ilmu pengetahuan dikembangkan bersama-sama oleh dosen, mahasiswa dan *civitas akademika* lainya melalui propses dialog tiada henti, baik itu lewat pengajaran, maupun penelitian. Tapi perjalanan selanjutnya, pengetahuan yang sejatinya menjadi orentasi bersama berubah menjadi komoditas yang diperjual belikan. Dialog kritis lewat pengajaran dan penelitian kian hari kian ditinggalkan berganti dengan tembok pengetahuan yang seakan sudah mapan padahal itu hanya modifikasi pengetahuan.

Ilmu pengetahuan yang dikembangkan secara bersama-sama lewat dosen, mahasiswa dan seluruh *civitas akademika* melaui dialog pengajaran dan penelitian akan membuahkan pengetahuan baru yang bermamfaat bagi masyarakat umum dan akan melahirkan sarjana yang cerdas, kritis dan mampu beradaptasi dengan pesatnya perubahan. Universitas akan menjadi marcusuar peradaban. Dan para sarjana yang akan menjadi nahkoda penggerak peradaban.

Saat ini yang banyak berkembang di universitas bukan wacana pengembangan keilmuan, tapi lebih pada "pengkerangkengan" keilmuan atau dalam bahasanya Darmaningtyas komodifikasi keilmuan. Sebuah keilmuan lama yang dimodifikasi dan dipecahkan ke dalam banyak SKS untuk dijual kepada mahasiswa. Dosen sudah tidak lagi berminat

untuk mengadakan penelitian. Mahasiswa hanya menerima modifikasi pengetahuan lama. Sehingga tidak heran apabila lulus dan keluar dari universitas merasa canggung dan gagap terhadap realitas. Hal ini diserbabkan salama di universitas hanya diperkenalkan dengan modifikasi pengetahuan dan tidak diperkenalkan dengan hal-hal baru dalam realitas perkembangan sosial kehidupan.

Pasar

Wacana pengembangan keilmuan di universitas lewat riset, penelitian secara bersama-sama diganti dengan wacana pengembangan keterampilan, *skill* dan kemampuan yang bersifat tekhnis. Lambat laun ilmu humaniora (filsafat, seni dan ilmu logika) bergeser dan beralih pada proses pembentukan manusia-manusia tekhnis. Banyak universitas kita yang berlomba-lomba membuka jurusan teknis untuk mengikuti tuntutan pasar. Apabila pasar membutuhkan sarjana teknisi komputer, maka universitas berlomba-lomba untuk membuka jurusan teknisi komputer. Universitas seakan tidak ubahnya dengan pasar yang hanya tunduk pada pemenuhan kebutuhan konsumen para elit kapitalis.

Universitas yang tunduk pada kebutuhan pasar akan merasa kebingungan. Tuntutan pasar berubah dengan cepat. Bisa saja saat ini pasar membutuhkan sarjana teknisi komputer, tapi tahun depan sarjana komputer akan tidak dibutuhkan lagi seiring dengan kebutuhan yang mencukupi. Pada saat inilah sarjana-sarjana komputer merasa pengetahuannya menjadi rongsokan. Maka mereka kehilanagn pekerjaan yang pada gilirannya akan mencipta pengangguran.

Respek terhadap kebutuhan pasar bukan berarti tidak penting bagi universitas, tapi cukup ironis apabila hal yang demikian menghilangkan identitas universitas sebagai lembaga pendidikan yang bergerak dalam wacana pengembangan keilmuan secara berkesinambungan, lembaga pendidikan yang bertugas mencari kebenaran-demi kebenaran baru lewat penelitian dan risetnya serta lembaga pendidikan yang sejatinya

membentuk insan-insan akademis yang merdeka bukan menjadi kuli atau pekerja.

Dengan demikian, universitas sejatinya mengimbangi antara tuntutan pasar dan wacana pengembangan keilmuan lewat penelitian dan riset. Universitas yang hanya bergerak dalam wilayah pengembangan wacana keilmuan *an sich* berarti universitas kurang merespon terhadap perkembangan pasar. Universitas yang hanya berlomba-lomba menghamba pasar akan berimplikasi pada tereduksinya jati diri universitas dan juga orang-orang yang lahir tidak lebih sebagai budak atau pekerja yang tidak mempunyai kemerdekaan dan pembacaan yang cerdas terahadap perubahan. Universitas yang mengimbangi akan melahirkan sarjana yang profesional dalam bidang tertentu, cerdas, kritis, dan bisa melakukan pembacaan-pembacaan terhadap kemungkinan-kemungkinan masa depan.

EPILOG

Mencari Pemimpin yang Berani Bertindak

Oleh: Nur Khalik Ridwan
(Alumni PMII Jogjakarta, angkatan 98)

Pada saat ini, akibat reformasi kita sudah punya ruang bebas yang lebih untuk berekspresi, tetapi kita tidak punya perlindungan yang baik terhadap kelompok minoritas yang diperlakukan zalim. Kita punya kekayaan alam melimpah, tetapi tidak memiliki kedaulatan dalam mengelolanya, seperti di Freeport, dan lain-lain. Kita memiliki banyak partai, tetapi hanya hadir tatkala Pemilu. Kita punya banyak doktor di kampus dan pusat studi-pusat studi, tetapi selalu saja berhenti di tumpukan kajian. Kita juga punya banyak mahasiswa di kampus, tetapi sepertinya sudah "terdisplinkan". Kita juga punya pemimpin, tetapi hanya berkapasitas sebagai ketua partai. Dan kita punya ketua partai, tetapi tidak memiliki kreativitas kecuali mempertahankan kekuasaan. Kita terdiri dari banyak suku, ras, dan golongan, tetapi rasa kepercayaan kita antara sesama saudara sebangsa sudah menipis. Tepatnya kita menyaksikan berbagai kontradiksi.

Faktanya reformasi melahirkan berbagai metamorfosa yang menyebabkan orang tergerus dalam pusaran uang, kekuasaan, dan politik untuk kepetingan pribadi dan golongan semata; berbagai kebijakan dan UU yang saling tumpang tindih; berbagai tindakan yang menghalalkan berbagai cara, termasuk menghilangkan hak-hak saudara sebangsa untuk hidup dan korupsi; berbagai beban psikologis dari mulai banyaknya sarjana pengangguran sampai pada rakyat yang tidak kuasa menteorikan apa yang terjadi, buruh yang terkontraksi oleh beban hidup, dan lain-lain.

Dari segala perenungan, bermuara pada satu hal: kita butuh pemimpin yang mampu mengkonsolidasikan keadaan untuk beranjak maju. Memang kita perlu mencermati hal-hal seperti UU hasil reformasi, konflik masyarakat dalam dunia pertambangan, korupsi, dan sejenisnya. Akan tetapi pengalaman melihat reformasi selama ini, hal-hal seperti itu, semakin banyak dan tidak bisa diatasi oleh mereka yang berkomitmen kuat untuk mewujudkan impian Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu, pembenahan sistemik membutuhkan pemimpin yang berani dan bervisi kuat dalam memegang pembukaan UUD 1945 sebagai suluh, sambil memperhatikan hal-hal sektoral itu.

Kita sendiri yang harus berbuat melahirkan, mencari dan menjaring pemimpin yang demikian itu. Yang dibutuhkan adalah orang berani dan bervisi kuat dalam memegang pembukaan UUD 1945. Orang seperti itu telah terbukti, tidak kita dapatkan saat ini, di dalam tampilan para elit: lihai banyak teori, kepada rakyat bahasanya banyak terjangkiti virus terlalu *ngilmiah*, mampu menguraikan sampai *jlimet*, dan *ndakik-ndakik*; bergelimang kemewahan, lihatlah para menteri, anggota DPR, dan pejabat pemerintah, apalagi PNS yang gajinya sekarang berlipat-lipat; dan sok necis, perlente, ganteng, dan klimis, tetapi peragu, penakut, dan tidak berani bertindak.

Kita perlu yang kontras dari keadaan yang ada. Kita butuh alternatif. Orang yang biasa saja, berwatak apa adanya, punya komitmen tinggi terhadap pembukaan UUD 1945 untuk mewujudkan negara kesejahteraan Republik Indonesia; tidak perlu ganteng, dan tampilan lain yang kontras

dengan kemewahan, korupsi, dan sok perlente; dan tidak mengobral himbauan kepada rakyat, tetapi berani mengambil tanggungjawab, berada di garis depan dalam memimpin.

Pemimpin seperti itu harus berani bertindak, mengambil momentum, dan sikapnya jelas terhadap persoalan-persoalan yang mendasar bagi bangsa ini. Pemimpin yang tidak menghimbau rakyat, tetapi yang mendengar dan bertanya kepada rakyat. Tidak semuanya harus diselesaikan, karena dia harus berkejaran dengan waktu, dan perlawanan dari para pembokong bangsa. Tetapi tindakannnya harus memberi arti yang besar dan berpengaruh terhadap perjalanan bangsa ini.

Di antara yang perlu dan harus dilakukan, bagi pemimpin yang berani bertindak, meyangkut masa depan bangsa itu: Pertama, berani berbicara tentang hutang luar negeri lepas dari mainstream selama ini, dan mencari solusinya. Perlu visi baru tentang mengatasi HLN yang besar sekali, apakah akan menempuh jalan seperti Argentina, apakah menjadwal ulang, atau menghapuskan sama sekali. Sebab hutang ini telah menjerat Indonesia sampai ke akar. Kita memang tidak bisa meniru Rusia, yang membayar hutang dengan kontan karena berhasil mengambil momentum hasil-hasil dari kenaikan harga minyak mereka. Karena kita adalah para pemimpim yang menyia-nyaiakan kekayaan alam melimpah bangsa ini. Pemimpin yang demikian harus punya alternatif dan terobosan soal ini.

Kedua, memiliki pandangan yang jelas tentang penguasaan modal asing yang semakin besar, juga perusahaan multinasional yang kontrak-kontraknya puluhan tahun dan banyak merugikan Indonesia. Dia harus berani melakukan renegosiasi kembali kontrak-kontrak yang merugikan bangsa Indonesia, mulai dari emas, nikel, minyak, dan lain-lain sampai soal perbankan; apakah akan menasionalisasi, ataukah membiarkan berjalan seperti sekarang ini, dijadikan bulan-bulanan dan mangsa negara-negara maju. Kalau terakhir ini yang terjadi, maka bumi dan kekayaan alam di Indonesia bukan untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi untuk perusahaan-perusahaan multinasional dan elit-elit yang memantik keuntungan pribadi dan partainya semata. Freeport mungkin menjadi

hal paling penting dan pengalaman yang mengiris: bagaimana elit-elit bangsa dan perusahaan multinasional berkaolaborasi, telah melukai hati rakyat dan masa depan bangsa ini.

Ketiga, berani menindak praktik-praktik kekerasan sipil dan laskar-laskar semi militer yang mencederai kemajemukan bangsa dan negara yang beradab. Bukan malah korbannya yang dihukum seperti yang terjadi selama ini. Karena bangsa ini difondasikan mereka yang berbeda keyakinan tidak semestinya dihancurkan. Tanpa ada keberanian mempertegas kemajemukan bangsa, kita hanya akan terus menerus menjadi bangsa yang tidak beradab dalam menyelesaikan perbedaan warga negara. Kita akan mengulang seorang pemimpin, yang memperoleh pengharagaan hebat di luar, tetapi tidak malu membiarkan rakyatnya memelas, dihilangkan hak-haknya oleh kelompok lain.

Keempat, mengenakan pajak progresif kepada orang-orang terkaya di negeri ini dengan langkah-langkah tepat dan berimbang; berani melangkah maju untuk membangun rekonsiliasi nasional kasus-kasus penting tanpa harus menunggu KKR; memimpin pemberantasan korupsi secara proaktif, jangan hanya diserahkan Kepada KPK; dan memberi teladan bahwa dia berempati kepada rakyat dalam tindakan nyata yang berkaitan dengan haknya, sebagian gajinya diberikan untuk disumbangkan kepada rakyat.

Pemimpin yang demikian itu, memang harus berani menanggung, menderita dengan tidak bergelimang kemewahan, dan harus banyak berbuat untuk rakyat dengan terobosan-terobosan baru. Pemimpin yang demikian, meskipun dilawan banyak pembokong bangsa, dan hanya sedikit waktu bisa bertahan, akan dikenang. Kita trauma terhadap pemimpin yang hanya sibuk mempertahankan kekuasaan, sibuk memimpin partai, dan sibuk bernyanyi. Ya, terlalu lama kita trauma atas pemimpin yang lama memerintah, tetapi langkah perubahan mendasarnya bagi bangsa ini ke depan, untuk maju dan mengangkat derajat bangsa ini, sangat minim.

Kalau begitu kita harus berbuat sesuatu. Tida boleh ada kata frustasi menghadapi reformasi yang selalu laten di dalamnya penuh kontradiksi. Seorang yang beriman, mencintai Sang Nabi sebagai guru, akan selalu melakukan merenungan diri, untuk memperoleh kebenaran dan kejujuran, agar selalu memberikan yang terbaik bagi rayat, bangsa, dan umat manusia. Sambil berdoa kepada Allah agar memperoleh pertolongan kemudahan memajukan bangsa ini. Maka, tugas kaum aktivis, pergerakan, dan mahasiswa mencari pemimpin yang berani bertindak, lalu memperjuangkannya. ***

Menjadi Narator-Zaman:

Memegang Kembali Kepemimpinan Gagasan di Tengah Kebuntuan Perubahan

Muhammad Mustafied

"Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat **..."**

"Tahu kau mengapa aku sayangi kau lebih dari siapa pun? Karena kau menulis. Suaramu takkan padam ditelan angin, akan abadi, sampai jauh, jauh di kemudian hari…)"

Pramoedya Ananta Toer, 1984

Dari jauh, saya dapat merasakan bagaimana berat tantangan gerakan mahasiswa saat ini. Gerakan mahasiswa saat ini bukan hanya dikepung oleh berbagai arus *global design* yang begitu sistematik dan berbagai keterbatasan nasional kita. Gerakan mahasiswa juga dihimpit oleh situasi nasional yang dipenuhi fakta-fakta memuakkan yang melumpuhkan cita-cita perubahan sosial. Namun juga dimoderasi oleh basis material kampus dan organisasi mahasiswa yang dikondisikan oleh *popular-culture* yang hegemonik dan oleh kooptasi politik yang kuat.

Partai-partai yang dilahirkan oleh reformasi bukan saja gagal mengartikulasikan amanat penderitaan rakyat, namun telah menjadi bagian dari masalah bangsa itu sendiri. Para aktivis dan intelektual yang terjun dalam dunia politik nasional sebagai konsekuensi *ideal* intelektual organik, semakin tak kuasa bertahan dan berpergang teguh pada prinsip di tengah pusaran kapital dan godaan *hubbur-riyasah*.

Gerakan mahasiswa pun akhirnya semakin kesulitan melakukan terbososan-terobosan kreatif di tengah-tengah kebuntuan perubahan. Tidak banyak lagi pilihan formula, strategi, dan taktik gerakan yang bisa dimaterialisasikan untuk menginisiasi perubahan. Idealiasasi gerakan mahasiswa sebagai *kekuatan-strategis* bangsa karena mudah mengorganisir diri dan mengelak dari kooptasi kekuasaan semakin sulit ditemui. Idealisasi gerakan mahasiswa sebagai pemantik perubahan politik dan pendorong perubahan sosial serta *solidarity-maker*, semakin susah diwujudkan. Idealisasi gerakan mahasiswa sebagai *the fifth-estate* setelah legislatif, eksekutif, yudikatif, dan media, semakin jauh dari kenyataan.

Sederet akar dapat disebut di sini: budaya pop yang mengunci kesadaran kritis mahasiswa; pergeseran basis sosiologis gerakan mahasiswa; kampus yang meng-aquarium-kan mahasiswa dalam atmosfer akademik yang pragmatis; kooptasi naif kekuatan politik lokal dan nasional; hingga semakin lemahnya kualitas kaderisasi. Selesai sudahlah kapasitas gerakan mahasiswa sebagai agen perubahan sosial.

Akan tetapi, di tengah-tengah situasi pesimisme seperti itu, ternyata muncul seberkas cahaya, segenggam harapan, yang relatif berhasil menjadi *Narator-Zaman*. Kemampuan untuk merefleksikan situasi lokal, nasional, global dan menuliskannya secara kritis merupakan harapan baru terhadap kontribusi gerakan mahasiswa terhadap agama dan bangsa. Kumpulan tulisan sahabat-sahabat PMII UIN Yogyakarta ini mengabarkan bahwa gerakan mahasiswa tidaklah mandeg, nalar kritis tidaklah hancur, kebeningan nurani dalam memotret tanda-tanda zaman tidaklah tumpul. Namun tetap hidup dan terus menyala. Paling tidak, gerakan mahasiswa

yang menekuni format gerakan intelektual yang diekspersikan melalui bahasa tulis tetap menggeliat dan mampu untuk *kluruk*.

Bagaimana pun, gagasan tetaplah merupakan kekuatan penting dalam sejarah. Sejarah, dalam perspektif madzhab kritis, digerakkan oleh ide-ide besar yang mengkonsolidasikan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap realitas serta memandu sikap dan langkah masyarakat. Arus gerakan ini amat sangat dibutuhkan di tengah-tengah *global intellectual hegemony*. Lihatlah bagaimana publik dibius oleh diskursus hegemonik mengenai kenaikan BBM, privatisasi sektor publik, swastanisasi institusi publik, hingga, meminjam istilah Gayatri Spivak, seperti kaum *sub-altern* yang bahkan tidak mampu bersuara dan gagal merumuskan kepentingan strategisnya sendiri.

Relevansi dorongan pergerakan yang diformulasikan dalam bentuk bahasa tulisan semakin kuat di tengah ekonomi politik media yang dikuasasi oleh borjuasi dan oligarki politik, baik di Indonesia maupun dunia internasional. David Croteau dan Hoynes (2001) memetakan dua arus utama model media yang berkembang hingga sekarang, yakni model yang berbasis kepentingan pasar dan model yang berbasis kepentingan publik. Dengan gagasan-gagasan tersebut, media nasional yang selama ini didominasi kepentingan pasar mulai diwarnai dengan konten yang berorientasi kepentingan publik, menerjemahkan kepentingan publik, dan menjadikan publik sebagai warga negara dan bukannya sebagai konsumen semata.

Sebagaimana diungkapkan filsuf Jerman, Habermas, bahasa (tulisan) merupakan salah satu medium hegemoni dan kekuasaaan. Sebagaimana proses sosial kapitalisme yang menurut Marx mengandung relasi dominasi-penaklukan, maupun Gramsci yang menunjukkan adanya hegemoni ideologi, bahasa (tulisan) dalam media massa juga mengandung relasi-relasi kuasa hegemonik. Hegemoni dalam konteks ini, seperti ditulis Raymond William, merujuk pada suatu istilah yang menunjukkan adanya kekuasaaan tidak hanya dalam relasi antar bangsa, namun juga menunjuk pada dominasi politik dari suatu kelas kuat terhadap kelas yang lemah

dalam relasi sosial, dan dominasi ideologi kebudayaan dan pandangan hidup.

Dalam konteks itulah bahasa (tulisan) menemukan relevansinya dalam suatu sistem kekuasaan. Bahasa (tulisan) memegang peranan dominan dalam menentukan teks, tafsir atas teks, eksplisitasi realitas sosial, dan tafsir atas konstruksi realitas sosial tersebut. Jacques Ellul memperkuat fenomena hegenoni intelektual global di atas dengan menunjukkan bahwa salah satu fungsi bahasa adalah memanipulasi simbol-simbol. Melalui struktur bahasa simbol ini suatu ideologi disosialisasikan dan diinternalisasikan dalam kesadaran publik sekaligus dipertahankan kontinuasinya.

Meskipun demikian, bahasa (tulisan) bagi Habermas (Magnis Suseno, 1977) juga menyediakan ruang "pelarian" dari hegemoni. Kepentingan emansipatoris menemukan praksisnya dalam usaha keluar dari segala paksaan dalam merealisasikan dirinya dalam bahasa (tulisan) atau komunikasi. Setiap munculnya bahasa (tulisan) atau komunikasi sosial selalu mengandaikan adanya kebebasan dan terciptanya ruang publik. Karenanya, bahasa tulisan pergerakan merupakan salah satu dari alat komunikasi yang dapat dibebaskan dan bahkan dapat meruntuhkan hegemoni.

Dengan tulisan yang memotret aneka problem kebangsaan tersebut, kumpulan tulisan ini sebenarnya telah mengisi salah satu format gerakan mahasiswa yang selama ini relatif kosong: *gerakan intelektual berbasis media massa*. Dengan tulisan yang dikonsumsi publik secara luas tersebut, para sahabat PMII UIN Sunan Kalijaga memungkinkan untuk *secara kreatif menerobos kebuntuan-kebuntuan pergerakan, memandu, dan membangun orientasi perjuangan organ gerakan mahasiswa.*

Dan dengan demikian, telah menjadi Narator-Zaman yang kritis, yang melawan reifikasi, membongkar ideologi dominan, dan mengabarkan kepada publik perihal kebenaran yang sesungguhnya di tengah carut-marut bangsa dan gelontoran (dis)informasi tak terbendung. Inilah

yang disebut dengan kepemimpinan gagasan, sebagai komplemen tak terpisahkan dari kepemimpinan struktural-institusional.

Tulisan dalam buku ini juga memberi kontribusi dalam mendekonstruksi kekuasaan politik-ekonomi yang menjadikan diskursus sebagai salah satu pusat operasi. Sebab tulisan-tulisan tersebut sedikit banyak membangun dan memperluas narasi-narasi kecil di tingkat akar rumput publik untuk melawan, meminjam istilah Ignas Kleden, totalitarianisme epistemologis yang menghancurkan tumbuhnya gagasan-gagasan otentik-liberatif-transformatif rakyat.

Akhirnya, semoga ini adalah *bidayah* (permulaan) dan bukan *nihayah* (akhir) dari perjuangan gerakan PMII melalui pengembangan diskursus isu-isu besar negeri ini. Gus Dur konon selalu merindukan para kader muda *Nahdhiyyin* berbicara mengenai ide-ide besar alternatif pembangunan, pembangunan politik bangsa, dan bukan sekedar soal teknis-teknokratis, atau ngopi-tanpa-refleksi. Sayangnya, tulisan khusus mengenai gerakan mahasiswa tidak dijadikan suatu bab khusus namun dimasukkan dalam bab-bab lain. Pertanyaan menggelitik terakhir adalah, mengapa dari 17 penulis, 4 penulis tidak diketahui asalnya, 1 dari Jateng, 1 dari Jabar, dan 11 penulis dari Madura. Apakah ini produk sistem kaderisasi intelektual di PMII UIN Yogya, ataukah sahabat-sahabat dari Madura berhasil menciptakan kultur intelektual dan menulis yang bagus tersendiri..?.. :)

Pesantran Pelajar Mahasiswa "Aswaja Nusantara"

Mlangi Yogyakarta 26 Juni 2013

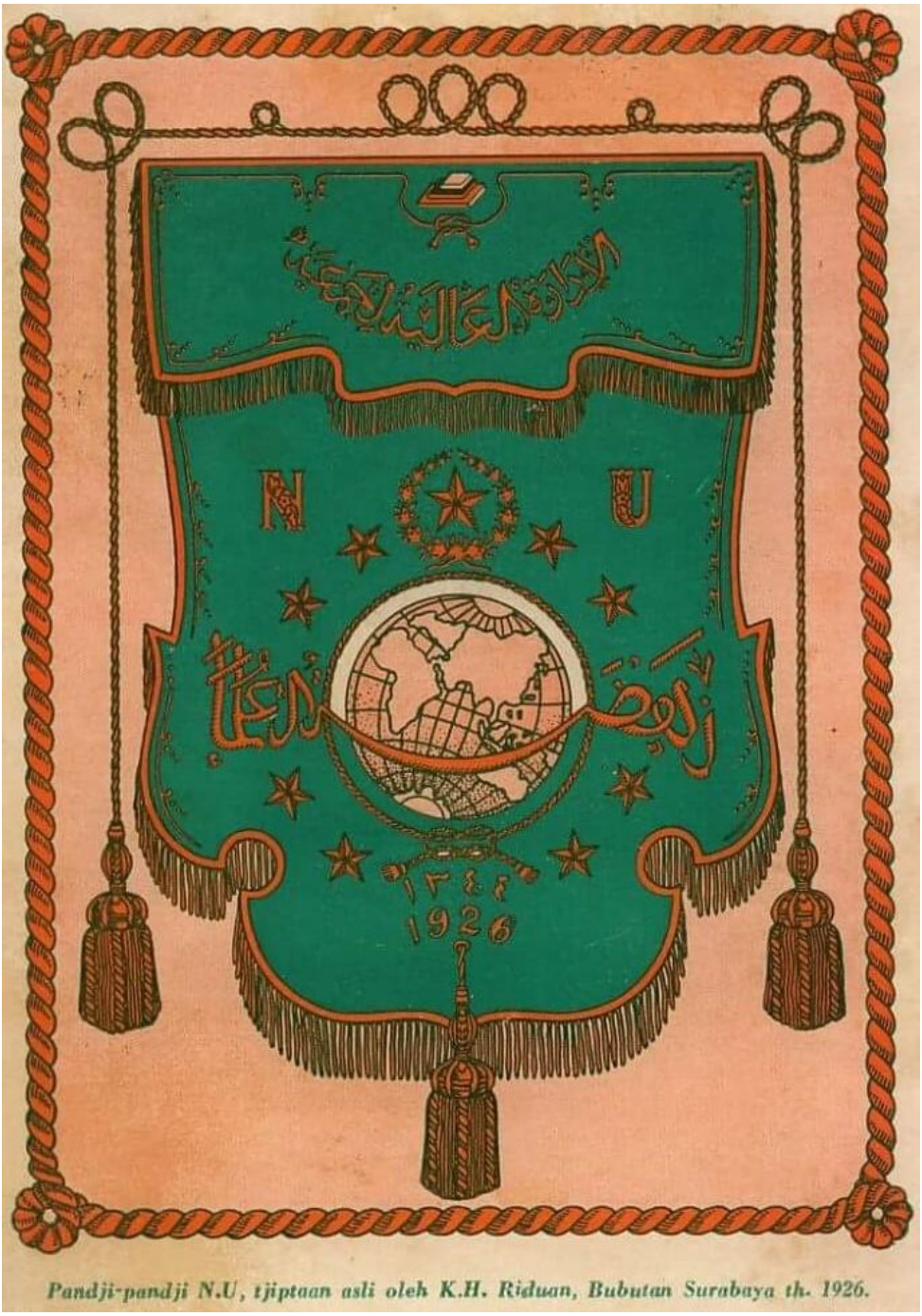

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

BILBIOGRAFI PENULIS

Ahmad Maltup, mahasiswa semester akhir Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Jogja. Mulai aktif menulis sejak SMP, tapi masih berbentuk cerpen dan puisi. Sejak menginjakkan kaki di Yogyakarta pada Oktober 2008, dan bergabung dengan Komunitas Kutub Yogyakarta, penulis mulai belajar menulis artikel. Disanalah proses sebenarnya dimulai ketika penulis mulai semakin dekat dengan dunia politik yang didapatkannya dari berbagai koran tiap hari.

Adang Saputra lahir di Majalengka pada 20 Agustus 1990. Sekarang tinggal di Jogja sedang menyelesaikan S-1 di Prodi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain aktif kuliah, ia juga aktif di berbagai organisasi. Aktif di CSS MoRA UIN Sunan Kalijaga sebagai anggota, anggota PMII Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga, dan Yayasan Al-Turats Indonesia (YAI) cabang Yogyakarta. Selain itu, ia gemar menulis opini di media masa. Beberapa artikelnya pernah di muat di media masa lokal Yogyakarta seperti *KR, Radar Jogja, Harian Jogja, Merapi dan Tribun Jogja. Pernah juga dimuat di Jawa Pos dan Republika*.

Nur Kholis Anwar, lahir 17 Maret 1989 di desa terpencil, Pasucen namanya. Kec. Trangkil, Kab. Pati. Mulai belajar menulis sejak tahun 2008 di komunitas Lesehan Sastra Kutub, dan aktif sesbagai kader PMII Ashram Bangsa, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, serta nyantri di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Yogyakarta di bawah naungan almarhum. KH Zainal Arifin Toha. Sampai sekarang masih menjadi kuli kertas. Tulisan yang lainnya bisa di temui beberapa media, baik lokal maupun nasional.

Fathor Rahman MD. Mahasiswa sosiologi nyaris DO. Kader PMII. Sempat tercatat sebagai wartawan Jawa Pos wilayah Yogyakarta. Sekarang aktif di *Institute for Research and Empowerment (IRE)* Yogyakarta. Kesibukan hariannya ngetwit di akun @fatur_md.

Fathorrahman Hasbul adalah mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, FISHUM, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Alumni PP Annuqayah dan sekarang aktif di PMII Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga. Beberapa kali melakukan penelitian terkait persoalan komunikasi politik dan media. Tulisannya berupa artikel, opini, dan resensi buku seputar komunikasi politik dan media, termuat di beberapa media nasional. Seperti, *Kompas, Jawa Pos, Koran Tempo, Media Indonesia, Bisnis Indonesia, Kontan, Investor, Republika, Jurnal Nasional, Suara Pembaruan, Sinar Harapan, Koran Jakarta, Solo Pos, Harian Jogja, Bali Post, Merapi, Jurnal Komunika,* dan beberapa media lain.

Habibullah, Kader PMII Ashram Bangsa, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, angkatan 2008. Selain aktif menulis, ia juga aktif di Renaisant Institute (RI) sebagai Direktur Eksekutif.

Imam Musthafa panggilan akrabnya M. Top, darah kelahiran Sumenep Madura. Semenjak menjadi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009). Sebelumnya memulai karirnya sebagai penulis di pondok pesantren mahasiswa Hasyim Asyari Yogyakarta (2008-2010). Kemudian aktif di PMII Asram Bangsa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2009) bersama sahabat-sahabat Korp Gerakan Transformatif dan Kritis (Gertak '09). Di akhir penghujung mahasiswa, kegelisahan berekspresi kian memuncak, bersama sahabat-sahabat Fakultas Syariah merintis Lembaga Bina Muda Indonesia (2012) sebagai ajang kreasi untuk berekspresi. Karya-karyanya, resensi maupun artikel, sudah dimuat di berbagai media massa, baik lokal maupun nasional, yakni, *Media Indonesia, Seputar Indonesia, Harian Jogja, Republika, Kedaulatan Rakyat, dll.*

Imam S Arizail, adalah Ketua Umum PMII Cabang D.I. Yogyakarta periode 2012-2013.

Iksan Basoeky adalah Alumni PP. Annuqayah dan warga PMII Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Juma Darmapoetra (nama pena dari Juma'), lahir di Sumenep, 12 Januari 1988 adalah Alumnus Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI) Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, aktif di PMII Rayon Civil Community Adab dan Ilmu Budaya serta menjadi santri di Pondok Pesantren Mahasiswa Hasyim Asy'ari Yogyakarta. Berbagai artikel dan esainya telah dipublikasikan di berbagai media massa, baik lokal maupun nasional, seperti *Media Indonesia, Bisnis Indonesia, Koran Tempo, Suara Pembaruan, Suara Merdeka, Jurnal Nasional, Koran Jakarta, Kompas Jogja, Kedaulatan Rakyat, Suara Karya, Harian Investro Dialy, Bali Post, Bernas Jogja, Harian Jogja, Koran Merapi, Majalah Gong, Lampung Post, dll.* CP/HP: 081904054599 Twitter; _jdPutra

Luluk Fadilah, lahir di Sidoarjo, 08 November 1990. Ketua Gerakan Gender Transformatif (GERGET), PMII Komisariat UIN Sunan Kalijaga, periode 2012-2013. Kontak: 085731157861

Mohamad Fathollah adalah alumnus Sosiologi UIN Sunan Kalijaga tahun 2011. Kader PMII Yogyakarta ini lahir di Sumenep 9 Desember 1985. Mendirikan Gerakan Pemuda Melawan Korupsi (GPMK) se-Indonesia dengan basis mahasiswa FISIP pada 2010. Tulisannya tersebar di berbagai media lokal dan nasional, diantaranya*; Kompas, Jawa Pos, Republika, Jurnal Nasional, Sinar Harapan, Media Indonesia, Seputar Indonesia, Harian Surya, Kedaulatan Rakyat, Suara Merdeka, Harian Jogja, Solo Pos, Jogja Raya, Bali Post, Aceh Serambi News, Kaltim Post, Koran Merapi, dll.* Bisa dihubungi di muhammad.ef@gmail.com

Muhammad Arif, lahir di Banyuwangi, 01 Agustus 1989. Alumnus Pondok Pesantren Al-Falah (Jember, Jawa Timur) ini sekarang sedang menyelesaikan studi S-1-nya di Aqidah dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), ia juga aktif di Lembaga AnalisiS Wacana Keislaman dan Nasionalisme.

M. Romandhon MK, lahir 15 Oktober 1989 di desa Nggotong, Tinawun, Malo, Bojonegoro, Jatim. Anak terakhir dari pasangan bpk Maskun (alm) dan ibu Sulbiyah. Pernah mengenyam pendidikan agama di Pondok Pesantren Al-Husna Malo, juga pernah *ngaso* ilmu di PP Sunan Drajat, meski hanya sebentar. Menekuni dunia menulis khususnya mengenai masalah isu-isu kebudayaan. Pernah nyantri di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari, Yogyakarta. Pengalaman organisasi Kordinator Kajian Editorial Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta (LKKY), Senat Mahasiswa Universitas UIN Sunan Kalijaga, dan aktivis PMII Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga. Pernah mengikuti sekolah Riset di Pusat Studi Hukum dan HAM, PUSHAM UII. Berbagai esai dan artikelnya tersebar diberbagai media, di antaranya *Kedaulatan Rakyat, Koran Jakarta, Koran Tempo, Harian Jogja, Suara Merdeka, Jawa Pos, Kompas Jatim* dan lain sebagainya.

Najamuddin Muhammad lahir di Sumenep 20 April 1985. Menempuh Pendidikan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan nama akademik Najanuddin. Aktif menulis Opini dan Resensi Buku di pelbagai media massa, baik lokal ataupun nasional. Aktif dalam beberapa organisasi; kordinator Kajian dan Penelitian Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta (LKKY). (2007-2008), pernah berproses di Korp Komunis, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007-2009), Pimpinan Umum Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Paradigma Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2010).

Romel Masykuri, lahir 01 Februari 1990 di Pamekasan, Madura. Kader muda PMII Ashram Bangsa, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, angkatan 2009. Tulisannya dalam bentuk opini, maupun resensi buku sudah tersebar di media lokal, dan nasional. Selain aktif menulis di media massa, ia juga aktif sebagai Peneliti Muda Renaisant Institute (RI), dan juga menjabat sebaga Ketua Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Twitter: @Romelmasykuri

نهضة العلماء
N U